LITERASI KEUANGAN

Hendra Halim, Mashud, Ika Prayanthi, Muhammad Ichsan Gaffar
Frisky Jeremy Kasingku, Lanemey Brigitha Pandeirot
Anastasia Sri Mendari, Billy Ivan Tansuria, Siti Rahmatia Machieu
Andrew Christian Aseng, Lina Krisnawati

LITERASI KEUANGAN

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Literasi Keuangan

Hendra Halim, Mashud, Ika Prayanthi, Muhammad Ichsan Gaffar
Frisky Jeremy Kasingku, Lanemey Brigitha Pandeirot
Anastasia Sri Mendari, Billy Ivan Tansuria, Siti Rahmatia Machieu
Andrew Christian Aseng, Lina Krisnawati

Penerbit Yayasan Kita Menulis

Literasi Keuangan

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2024

Penulis:
Hendra Halim, Mashud, Ika Prayanthi, Muhammad Ichsan Gaffar,
Frisky Jeremy Kasingku, Lanemey Brigitha Pandeirot,
Anastasia Sri Mendari, Billy Ivan Tansuria, Siti Rahmatia Machieu,
Andrew Christian Aseng, Lina Krisnawati

Editor: Abdul Karim
Desain Sampul: Devy Dian Pratama, S.Kom.

Penerbit
Yayasan Kita Menulis
Web: kitamenulis.id
e-mail: press@kitamenulis.id
WA: 0821-6453-7176
IKAPI: 044/SUT/2021

Hendra Halim., dkk.
Literasi Keuangan
Yayasan Kita Menulis, 2024
xiv; 180 hlm; 16 x 23 cm
ISBN: 978-623-113-257-4
Cetakan 1, April 2024
I. Literasi Keuangan
II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
Izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya penulis dapat merampungkan buku Literasi Keuangan ini. Literasi keuangan erat kaitannya dengan kesejahteraan individu. Pengetahuan dan keterampilan keuangan dalam mengelola keuangan pribadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan keuangan bukan hanya merupakan fungsi dari pendapatan saja (pendapatan rendah). Kesulitan keuangan juga dapat timbul akibat pengelolaan yang buruk seperti penyalahgunaan kredit, dan ketiadaan perencanaan keuangan. Keterbatasan keuangan dapat menyebabkan stres, dan rendahnya harga diri. Adanya pengetahuan keuangan dan literasi keuangan akan membantu individu dalam mengelola perencanaan keuangan pribadi, sehingga individu dapat memaksimalkan nilai uang dan manfaat yang diperoleh akan lebih besar dan meningkatkan standar hidup.

Buku ini merupakan panduan komprehensif untuk memahami dunia keuangan dengan lebih baik, dirancang khusus untuk membantu pembaca meningkatkan pengetahuan literasi keuangan. Dalam buku ini, pembaca akan dibimbing melalui berbagai topik penting, dimulai dari Pengantar Literasi Keuangan yang memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya mengelola keuangan secara bijaksana. Selanjutnya, pembaca akan diajak untuk memahami konsep dasar seputar uang dan bank, serta bagaimana mengelola uang dan membuat anggaran yang efektif. Topik selanjutnya mencakup Tabungan dan Investasi Dasar, yang membantu pembaca memahami pentingnya menabung dan berinvestasi untuk masa depan keuangan yang lebih baik.

Buku ini juga mengenalkan konsep Pengantar Pasar Modal dan Asuransi, memberikan wawasan tentang bagaimana pasar modal beroperasi dan pentingnya asuransi dalam melindungi kekayaan dan kesejahteraan finansial. Selanjutnya, pembaca akan diajarkan tentang Kredit dan Manajemen Utang, serta bagaimana merencanakan keuangan pribadi

yang lebih baik. Buku ini juga membahas Investasi Lanjutan, termasuk Analisis Portofolio, Diversifikasi, dan Manajemen Risiko, untuk membantu pembaca dalam mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas. Di bagian akhir buku ini, pembaca akan diajak untuk mempelajari Perencanaan Pensiun, Teknologi Keuangan (FinTech), Etika dalam Keuangan, dan Manajemen Risiko. Semua topik ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek keuangan yang dapat membantu pembaca mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya penyusunan buku ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak. Buku ini telah selesai penulis susun semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca. Penulis berharap pengetahuan yang diperoleh dari buku ini, pembaca dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola keuangan, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk skala yang lebih besar. Penulis sadar buku ini belum seutuhnya sempurna. Oleh sebab itu, penulis mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar penulis dapat terus meningkatkan kualitas buku. Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan manfaat yang berharga bagi Anda.

April 2024
Tim Penulis,

Daftar Isi

Kata Pengantar v
Daftar Isi vii
Daftar Gambar xi
Daftar Tabel xiii

Bab 1 Pengantar Literasi Keuangan
1.1 Pendahuluan 1
1.2 Definisi Literasi Keuangan 3
1.3 Manfaat Literasi Keuangan 5
1.4 Faktor Yang Memengaruhi Literasi Keuangan 8
1.5 Tantangan Literasi Keuangan 11
1.6 Peran Pendidikan Dalam Literasi Keuangan 13

Bab 2 Memahami Uang dan Bank
2.1 Pengantar 17
2.2 Pengertian Uang 18
2.3 Sejarah Uang 20
2.4 Fungsi Dan Jenis Uang 22
2.4.1 Fungsi Uang 22
2.4.2 Jenis Uang 24
2.5 Pentingnya Memahami Uang 26
2.6 Defenisi Bank 27
2.7 Jenis-Jenis Bank 28
2.8 Perkembangan Teknologi Dan Pengaruhnya Terhadap Perbankan 30

Bab 3 Pengelolaan Uang dan Anggaran
3.1 Manfaat Pengelolaan Uang dan Anggaran 34
3.2 Tips Praktis untuk Meningkatkan Kemampuan Mengelola Uang dan Menganggarkan Dana 37
3.3 Bagaimana Membuat Anggaran? 38

Bab 4 Tabungan dan Investasi
4.1 Berbagai Pemikiran Tentang Tabungan 43
4.2 Teori Tabungan (Saving Theory) 45
4.3 Teori Investasi Dan Teori Investasi Keuangan 48
4.4 Perspektif Keuntungan (Profit) Dalam Teori Investasi 52
4.5 Hubungan Tabungan Dan Investasi 53
4.6 Peran Tabungan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 55

Bab 5 Pengantar Pasar Modal
5.1 Pendahuluan 59
5.2 Investasi Dan Pasar Modal 60
5.3 Struktur Pasar Modal 62
5.4 Saham 64
5.5 Obligasi 66

Bab 6 Kredit dan Manajemen Utang
6.1 Pengenalan Tentang Kredit Dan Manajemen Utang 69
6.2 Konsep Dasar Kredit 70
6.2.1 Character 71
6.2.2 Capacity (Kemampuan) 72
6.2.3 Capital (Modal) 72
6.2.4 Collateral (Jaminan) 72
6.2.5 Conditions (Kondisi) 73
6.3 Jenis-Jenis Kredit 73
6.3.1 Kredit Konsumen 73
6.3.2 Kredit Bisnis 74
6.4 Pengelolaan Utang 77
6.4.1 Pemantauan Utang 78
6.4.2 Rencana Pembayaran Utang. 78
6.4.3 Pengendalian Pengeluaran 78
6.4.4 Pendapatan Tambahan 78
6.4.5 Hindari Utang Tambahan 78
6.4.6 Edukasi Keuangan. 79
6.4.7 Konsultasi Dengan Ahli Keuangan 79

Bab 7 Perencanaan Keuangan Pribadi
7.1 Definisi Perencanaan Keuangan 81
7.2 Proses Perencanaan Keuangan 82
7.2.1 Profil Risiko 84

7.2.2 Menyusun Kondisi Awal Keuangan 84
7.2.3 Mengelola Arus Kas (Anggaran) 88
7.2.4 Membangun Portofolio 90
7.2.5 Membangun Dana Darurat 90
7.2.6 Manajemen Risiko 91
7.2.7 Merencanakan Dana Pendidikan 92
7.2.8 Merencanakan Dana Pensiun 92
7.2.9 Instrumen Investasi 93

Bab 8 Pajak dan Pengelolaan
8.1 Pajak 95
8.1.1 Definisi Pajak 96
8.1.2 Karakteristik Pajak 96
8.1.3 Klasifikasi Pajak 98
8.1.4 Fungsi Pajak 99
8.2 Lembaga Pengelola Pajak 101
8.3 Pengelolaan Pajak Oleh Perusahaan 102
8.3.1 Jenis-Jenis Pajak 102
8.3.2 Objek, Tarif, Dan DPP 105

Bab 9 Pengelolaan Keuangan untuk Usaha Kecil
9.1 Pengertian Usaha Kecil (UMKM) 109
8.2 Konsep Pengelolaan Keuangan Usaha Kecil 112
8.3 Manfaat Pengelolaan Keuangan 114
8.4 Pengelolaan Ekonomi Desa 117
8.5 Balance Score Card Sebagai Penilaian Tata Kelola Keuangan dan Non Keuangan 120

Bab 10 Teknologi Keuangan
10.1 Pendahuluan Teknologi Keuangan 129
10.2 Perkembangan Teknologi Keuangan 131
10.3 Jenis-Jenis Teknologi Keuangan 134
10.3.1 Sistem Pembayaran 134
10.3.2 Pinjaman, Pembiayaan, Dan Penyediaan Modal 135
10.3.3 Manajemen Investasi Dan Risiko 137
10.3.4 Market Aggregator/Market Comparison 137
10.4 Manfaat Dan Risiko Teknologi Keuangan 138
10.5 Teknologi Keuangan Dan Literasi Keuangan 140
10.6 Tantangan Dan Prospek Teknologi Keuangan 141

Bab 11 Etika dalam Keuangan

11.1 Apa itu Etika dalam Keuangan? 145
11.2 Apa yang Dimaksud dengan Keuangan? 145
11.3 Apa yang Dimaksud dengan Etika Keuangan? 146
11.4 Pentingnya Etika dalam Keuangan 147
11.5 Permasalahan Etika di bidang Keuangan 148
11.6 Kode Etik dalam Keuangan 148
11.7 Etika dalam Pelaporan Keuangan 150
11.7.1 Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi 150
11.7.2 Keterbukaan dalam Laporan Keuangan 150
11.7.3 Menghindari Praktek Akuntansi yang Meragukan 151
11.8 Etika dalam Keputusan Keuangan 151
11.8.1 Investasi yang Berkelanjutan 151
11.8.2 Pinjaman dan Kewajiban yang Bijaksana 152
11.8.3 Pembayaran Pajak yang Wajar 152
11.9 Prinsip-prinsip untuk Investasi yang Bertanggung Jawab 152
11.10 Keuangan Berkelanjutan 153
11.11 Implementasi Etika dalam Keuangan 154

Daftar Pustaka 155
Biodata Penulis 173

Daftar Gambar

Gambar 1.1: Literasi Keuangan di 39 Negara Sampel 9
Gambar 4.1: Penentuan Tingkat Investasi 51
Gambar 4.2: Kurva Tabungan dan Investasi 54
Gambar 4.3: Loanable Funds 55
Gambar 5.1: Proses Investasi 61
Gambar 5.2: Struktur Pasar Modal di Indonesia 63
Gambar 5.3: Tren Harga IHSG 65
Gambar 7.1: Contoh: Pola Pengeluaran (Alokasi Dana) 89
Gambar 7.2: Instrumen Investasi, Faktor Risiko, Imbal Hasil, Jangka Waktu 94
Gambar 8.1: Klasifikasi Pajak 98
Gambar 8.2: Jenis-jenis Pajak Pusat dan Pajak Daerah 99
Gambar 8.3: Realisasi Penerimaan Negara 100
Gambar 8.4: Struktur Organisasi Kantor Pusat DJP 102
Gambar 10.1: Sejarah Teknologi Keuangan - Fintech 1.0 s.d. 4.0 131

Daftar Tabel

Tabel 7.1: Laporan Arus Kas Pribadi 85
Tabel 7.2: Neraca Keuangan Pribadi 87
Tabel 7.4: Contoh Dana Darurat Berdasarkan Jumlah Tanggungan 91
Tabel 9.1: Skor Penilaian Balanced Scorecard..... 122
Tabel 9.2: Analisis BSC Kinerja organisasi ditinjau dari perspektif keuangan 123
Tabel 9.3: Analisis BSC Kinerja organisasi ditinjau dari perspektif pelanggan 124
Tabel 9.4: Analisis BSC Kinerja organisasi ditinjau dari perspektif bisnis internal 125
Tabel 9.5: Analisis BSC Kinerja organisasi ditinjau dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 126
Tabel 9 6: Analisis BSC Kinerja organisasi Keseluruhan 127
Tabel 10.1: Evolusi Teknologi Keuangan (Fintech) dari Masa ke Masa 132

Bab 1

Pengantar Literasi Keuangan

1.1 Pendahuluan

Penerapan pendidikan dalam meningkatkan pemahaman tentang keuangan dalam masyarakat sangatlah penting. Dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, lembaga keuangan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat luas. Dengan adanya berbagai lembaga keuangan yang berusaha mendistribusikan berbagai produk dan layanan keuangan kepada masyarakat, maka masyarakat harus memahami dengan baik manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban, serta percaya bahwa produk dan layanan keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia harus dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global di era industry 4.0 dan society 5.0. Salah satu cara menghadapi keuangan adalah bagaimana individu mengendalikan pengeluaran keuangannya. Ketika pengeluaran terus-menerus dan tidak terbatas mengakibatkan individu sulit atau tidak mampu mengendalikan keuangan, ini menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah.

Literasi keuangan erat kaitannya dengan kesejahteraan individu. Pengetahuan dan keterampilan keuangan dalam mengelola keuangan pribadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan keuangan bukan hanya merupakan

fungsi dari pendapatan saja (pendapatan rendah). Kesulitan keuangan juga dapat timbul akibat pengelolaan yang buruk seperti penyalahgunaan kredit, dan ketiadaan perencanaan keuangan. Keterbatasan keuangan dapat menyebabkan stres, dan rendahnya harga diri. Adanya pengetahuan keuangan dan literasi keuangan akan membantu individu dalam mengelola perencanaan keuangan pribadi, sehingga individu dapat memaksimalkan nilai uang dan manfaat yang diperoleh akan lebih besar dan meningkatkan standar hidup.

Literasi keuangan adalah kebutuhan dasar bagi setiap orang untuk menghindari masalah keuangan. Kesulitan keuangan dapat timbul akibat pengelolaan yang buruk. Memiliki literasi keuangan adalah hal paling penting untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Dengan manajemen keuangan yang tepat didukung oleh literasi keuangan yang baik, diharapkan standar hidup masyarakat akan meningkat, karena tidak peduli seberapa tinggi tingkat pendapatan seseorang tetapi tanpa manajemen keuangan yang baik, keamanan keuangan akan sulit dicapai. Kebutuhan akan pendidikan masyarakat tentang produk keuangan bank dan non-bank sangat mendesak agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pentingnya literasi keuangan dalam semua aspek keuangan pribadi tidak hanya karena kesulitan dalam menggunakan uang yang dimiliki, tetapi individu diharapkan dapat menikmati hidup mereka dengan menggunakan sumber daya keuangan yang mereka miliki dengan tepat.

Banyak literatur tentang literasi keuangan telah beredar sejauh ini, mulai dari pengukuran literasi keuangan hingga menilai efektivitas program pendidikan keuangan untuk mengevaluasi hubungan antara literasi keuangan dan perilaku serta dampak literasi keuangan pada individu maupun perekonomian makro (Ingale & Paluri, 2022; Khan et al., 2022; Lusardi & Messy, 2023; Lusardi & Mitchell, 2023; Ouachani et al., 2021; Umri et al., 2024). Jumlah literatur tentang literasi keuangan telah meningkat secara eksponensial selama dekade terakhir. Literasi keuangan telah menjadi bidang studi resmi di beberapa pendidikan tinggi dunia. Oleh karena itu, tim penulis ingin menyusun salah satu buku yang didedikasikan untuk peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Tujuan buku ini adalah untuk memberikan referensi yang komprehensif untuk meningkatkan literasi keuangan.

Buku Literasi Keuangan ini mencakup topik, mulai dari Pengantar Literasi Keuangan, Memahami Uang dan Bank, Pengelolaan Uang dan Anggaran. Buku ini juga mencakup Tabungan dan Investasi Dasar, Pengantar Pasar Modal, Asuransi. Selain itu, buku ini juga membahas Kredit dan Manajemen

Utang, Perencanaan Keuangan Pribadi, Investasi Lanjutan (Analisis portofolio, diversifikasi, dan risiko), Pajak dan Pengelolaan, Pengelolaan keuangan untuk usaha kecil. Di bagian akhir buku ini mengupas tuntas terkait Perencanaan Pensiun, Teknologi Keuangan (FinTech), Etika dalam Keuangan, dan Manajemen Risiko.

1.2 Definisi Literasi Keuangan

Literasi keuangan telah menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak tahun 2002, ketika pasar keuangan menjadi lebih kompleks, dan orang rata-rata merasa sulit untuk membuat keputusan yang terinformasi. Literasi keuangan adalah alat penting untuk mempromosikan inklusi keuangan dan pembangunan, yang mengarah pada stabilitas keuangan. Menurut Alshebami & Al Marri (2022), literasi keuangan memungkinkan pengusaha untuk memahami sumber keuangan yang diperlukan untuk mendanai bisnis mereka. Karena signifikansinya dalam mendukung keputusan investasi, meningkatkan manajemen keuangan pribadi, dan meningkatkan kesejahteraan keuangan, literasi keuangan telah menarik perhatian yang cukup besar dari kalangan akademisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya (Alshebami & Al Marri, 2022).

Menurut studi, perkembangan keuangan adalah penggerak penting dari pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan (Levine, 2005). Para akademisi telah berpendapat bahwa kurangnya literasi keuangan adalah hambatan besar untuk permintaan layanan. Individu tidak akan menuntut produk jika mereka tidak familiar atau nyaman dengan produk tersebut (Ramakrishnan, 2011).

Noctor et al. (1992) termasuk di antara yang pertama kali mendefinisikan konsep literasi keuangan. Menurut mereka, literasi keuangan adalah pengetahuan keuangan yang mengarah pada pengambilan keputusan yang terinformasi. Kita dapat melihat bahwa ada dua dimensi dalam definisi ini. Yang pertama adalah pengetahuan keuangan yang merupakan konsekuensi dari program-program pendidikan keuangan. Yang kedua adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan keuangan yang diperoleh secara tepat untuk membuat keputusan yang terinformasi. Hilgert et al. (2003) melaporkan bahwa beberapa studi berangkat dari definisi ini dan tidak membedakan antara kedua dimensi tersebut. Mereka mengasumsikan bahwa pengetahuan keuangan yang

lebih banyak secara otomatis akan tercermin dalam perubahan dalam praktik dan perilaku manajemen keuangan.

Studi lain membatasi konsep literasi keuangan pada pengetahuan keuangan yang berasal dari program pendidikan keuangan. Mereka membedakan antara literasi keuangan dan dimensi pengambilan keputusan keuangan dan mengkaji interaksi antara kedua konsep ini (Bernheim, 1998). Misalnya, Hilgert et al. (2003) menyelidiki hubungan antara literasi keuangan individu dan perilaku keuangan mereka. Mereka fokus pada empat aktivitas manajemen keuangan, yaitu manajemen arus kas, manajemen kredit, menabung, dan investasi. Mereka menunjukkan bahwa orang-orang dengan skor pengetahuan keuangan yang lebih tinggi membuat keputusan keuangan terbaik. Van Rooij et al. (2011) mengkonfirmasi hasil yang sama dan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan adalah penentu penting dari partisipasi pasar saham.

Huston (2010) membedakan antara pengetahuan keuangan dan dimensi pengambilan keputusan keuangan. Dia menyarankan bahwa ukuran literasi keuangan harus mengintegrasikan kedua dimensi tersebut secara simultan. Dia menambahkan bahwa pengambilan keputusan keuangan bisa dipengaruhi oleh elemen lain selain pengetahuan keuangan, yaitu kondisi ekonomi, budaya, dan preferensi waktu.

Definisi Lusardi & Mitchell (2014a) melampaui pengetahuan keuangan yang dipertimbangkan oleh definisi sebelumnya. Mereka mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan analisis informasi ekonomi dan pengambilan keputusan keuangan yang terinformasi. Jika individu memiliki pengetahuan keuangan tetapi tidak dapat menggunakannya dengan tepat untuk membuat keputusan keuangan yang tepat, maka mereka dianggap oleh (Lusardi & Mitchell, 2014a) sebagai tidak melek secara finansial.

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk menjadi akrab dan memahami produk pasar keuangan, terutama imbalan dan risikonya, untuk membuat keputusan yang terinformasi. Dengan demikian, hal ini mengacu pada pengambilan keputusan yang terinformasi tentang pengelolaan uang dan keputusan keuangan yang efektif. Eksklusi keuangan di negara-negara berkembang disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan mengenai produk dan layanan keuangan (Atkinson & Messy, 2012). Selain itu, motivasi untuk menabung, meminjam, dan menggunakan produk dan layanan keuangan memengaruhi inklusi keuangan di negara-negara berkembang (Holzmann, 2010). Dalam beberapa tahun terakhir, literasi keuangan telah menerima

banyak perhatian dan pertumbuhan di banyak negara. Namun, perluasan ini disebabkan oleh kesulitan yang muncul dalam sistem keuangan yang dinamis, yang mengharuskan pelanggan keuangan untuk merumuskan alternatif keuangan dan penilaian lebih agresif (Lusardi & Mitchell, 2011).

1.3 Manfaat Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah kemampuan individu untuk memahami konsep keuangan dasar, seperti pengelolaan uang, investasi, asuransi, dan perencanaan keuangan (Arianti, 2022). Pentingnya literasi keuangan telah diakui secara luas dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak krisis keuangan global pada tahun 2008. Literasi keuangan memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang keuangan mereka, menghindari kesalahan yang dapat merugikan, dan mempersiapkan mereka untuk keadaan darurat keuangan. Manfaat dari literasi keuangan sangat penting untuk keberlangsungan keuangan di masa depan.

Beberapa manfaat tersebut antara lain (Sherraden, 2010):

1. Mampu Mengelola Keuangan dengan Baik
   Dengan literasi keuangan yang baik akan lebih mudah mengelola keuangan secara efektif. Ini termasuk mengelola arus kas bulanan, membentuk dana darurat, asuransi, dan berinvestasi. Dengan pemahaman yang baik tentang literasi keuangan akan lebih mudah memilih strategi dan membuat keputusan yang tepat tentang keuangan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kekayaan finansial.
2. Menggunakan Keuangan dengan Bijaksana dan Menjadi Makmur
   Dengan memiliki keterampilan yang cukup dalam mengelola keuangan, seperti dalam produk dan layanan keuangan, standar hidup dapat meningkat secara signifikan karena mampu mengelola mereka dengan baik.
3. Menghindari Penipuan
   Dengan pengetahuan literasi yang memadai, kemungkinan terjerat dalam penipuan akan lebih kecil. Beberapa contoh penipuan yang

cukup umum termasuk kasus Skema Ponzi, Bisnis "Kera", Pinjaman Ilegal atau Investasi Bodong, dan lain-lain.

4. Distribusi Kekayaan
   Keberadaan literasi keuangan dapat berdampak positif pada masyarakat umum. Hal ini karena orang kaya cenderung menginvestasikan uang mereka di lembaga keuangan. Uang tersebut kemudian akan diolah menjadi produk dan layanan keuangan yang dapat digunakan untuk hal-hal yang baik, salah satunya adalah membuka usaha.

Selain manfaat-manfaat yang telah dibahas sebelumnya, ada manfaat lainnya dari literasi keuangan adalah mencegah kesalahan yang dapat merugikan. Misalnya, pengetahuan tentang perbedaan antara pinjaman dengan suku bunga tetap dan pinjaman dengan suku bunga mengambang dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik tentang jenis pinjaman yang sesuai dengan situasi keuangan. Selain itu, pemahaman tentang kontribusi IRA tradisional yang tidak dapat ditarik hingga pensiun dapat mencegah individu melakukan penarikan dana yang tidak perlu dan mengalami konsekuensi pajak yang tidak diinginkan.

Literasi keuangan juga mempersiapkan individu untuk menghadapi keadaan darurat keuangan. Dengan memiliki pengetahuan tentang cara mengelola uang dan menabung untuk masa-masa sulit, individu dapat lebih siap menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya tak terduga lainnya. Dengan memiliki rencana keuangan yang baik, individu dapat memiliki ketenangan pikiran dan mengurangi stres yang terkait dengan ketidakpastian keuangan.

Selain itu, literasi keuangan dapat membantu individu mencapai tujuan keuangan. Dengan memahami cara membuat anggaran yang efektif dan mengelola uang dengan bijaksana, individu dapat membuat rencana keuangan yang realistis untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, seseorang yang ingin membeli rumah atau memulai bisnis dapat menggunakan pengetahuan tentang investasi dan pengelolaan uang untuk membuat rencana keuangan yang memungkinkan mereka mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, literasi keuangan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri individu dalam mengambil keputusan keuangan. Dengan memiliki

pengetahuan yang memadai tentang keuangan, individu dapat mendekati keputusan penting dalam hidup dengan keyakinan bahwa telah mempertimbangkan semua informasi yang relevan. Hal ini dapat mengurangi risiko membuat keputusan yang buruk yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada keuangan.

Pertumbuhan ekonomi berasal dari perkembangan aktivitas di sektor ekonomi, yang menghasilkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi/disediakan oleh masyarakat dan ditandai dengan perubahan terus-menerus dalam kondisi ekonomi suatu negara menuju keadaan yang lebih baik (Hasyim, 2016). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengakibatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Indikator yang dapat digunakan sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan total semua orang dalam ekonomi (Kira, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Asian Development Bank (ADB) Institute yang membandingkan korelasi antara PDB per kapita dengan berbagai indikator perkembangan keuangan di beberapa negara Asia-Pasifik - yang dipublikasikan pada tahun 2015 dengan judul 'Pendidikan Keuangan di Asia: Penilaian dan Rekomendasi' - dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Di beberapa negara Asia, seperti Jepang, Korea, Australia, dan Selandia Baru, terlihat bahwa PDB per kapita yang tinggi tidak dapat dihindari akan diiringi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingkat literasi keuangan yang tinggi juga tanpa ragu meningkatkan kesejahteraan, mengingat peningkatan literasi keuangan memungkinkan orang untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik, sehingga mengoptimalkan perencanaan keuangan keluarga atau pribadi yang, pada gilirannya, lebih meningkatkan kesejahteraan keuangan. Keterampilan keuangan dapat membantu seseorang memahami dunia ekonomi dan membantu dalam pengambilan keputusan keuangan, mempromosikan bisnis, dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semua ini menggarisbawahi temuan penelitian bahwa literasi keuangan memiliki korelasi positif dengan PDB per kapita dan pertumbuhan ekonomi keuangan.

Manfaat literasi keuangan dari perspektif makro ekonomi juga sangat penting, mengingat bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat memiliki korelasi positif dengan pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang pada

gilirannya, tanpa terelakkan, merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Sethi & Acharya (2018), literasi keuangan dan inklusi memiliki dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (meningkatkan standar hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan). Sethi & Acharya (2018) menyatakan bahwa kebijakan literasi keuangan mendorong partisipasi masyarakat sisi permintaan dalam menggunakan fasilitas dan layanan produk serta layanan keuangan. Sementara itu, kebijakan inklusi keuangan, dalam bentuk pembangunan kapasitas, akses, distribusi, dan diversifikasi segmen produk, mengarah pada peningkatan partisipasi masyarakat sisi penawaran dalam menggunakan fasilitas dan layanan produk serta layanan keuangan.

Secara umum, pendekatan strategi nasional mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu menyediakan fasilitas layanan yang sesuai, menyediakan produk yang sesuai, dan menanamkan pola pikir keuangan yang bertanggung jawab melalui pendidikan keuangan dan perlindungan konsumen.

Meningkatnya literasi keuangan akan menghasilkan peningkatan stabilitas sistem keuangan dan pengurangan kerentanan di dalamnya, sambil juga membuat lebih mudah untuk mendapatkan modal. Hal ini kemudian akan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis mandiri milik keluarga miskin. Penyaluran pinjaman dalam bentuk kredit mikro dan kecil adalah cara yang tepat untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan, mengingat kunci untuk memberdayakan keluarga miskin adalah dengan mengubah mereka menjadi pengusaha yang tangguh. Penyediaan kredit usaha kecil dan mikro memberikan kesempatan bagi pengusaha skala kecil untuk muncul dan berkembang di berbagai tingkat masyarakat, memberikan kesempatan kepada orang untuk mengakses sumber daya ekonomi dan dengan demikian memastikan kesejahteraan yang lebih adil di seluruh masyarakat.

1.4 Faktor yang Memengaruhi Literasi Keuangan

*The Economic Cooperation and Development (*OECD) atau *the International Network on Financial Education* (INFE) berkomitmen untuk mengukur dan menilai tingkat literasi keuangan di seluruh dunia melalui pengukuran yang

terkoordinasi. Sebanyak 39 negara dan ekonomi, termasuk 20 negara Anggota OECD dan 8 negara G20, yang berasal dari Asia, Eropa, dan Amerika Latin, berpartisipasi dalam survei internasional ketiga tingkat literasi keuangan menggunakan Toolkit OECD/INFE yang diakui secara global untuk Pengukuran Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Berdasarkan hasil laporan tersebut menunjukkan rata-rata skor literasi keuangan untuk 40 negara dan ekonomi peserta menunjukkan heterogenitas yang signifikan. Rata-rata skor literasi keuangan secara keseluruhan di seluruh negara dan ekonomi peserta adalah 60 dari 100 poin (63 dari 100 di antara negara-negara OECD peserta) seperti yang tertera di Gambar 1.1 berikut.

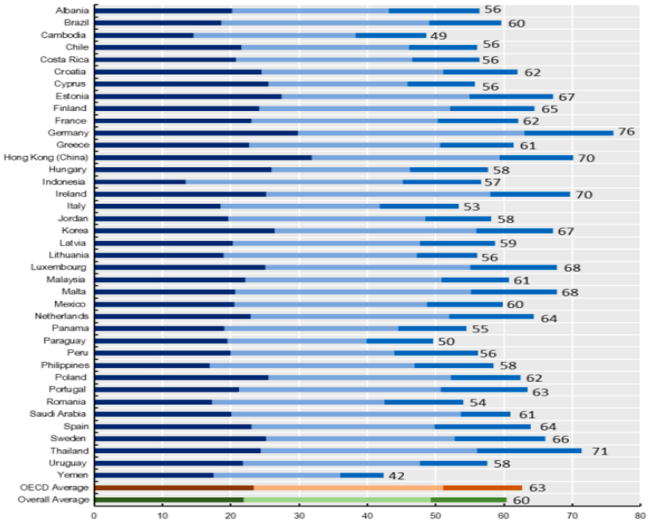

Gambar 1.1: Literasi Keuangan di 39 Negara Sampel Sumber: OECD/INFE 2023 Survey of Adult Financial Literacy

Skor literasi keuangan secara keseluruhan dihitung sebagai jumlah dari skor pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap keuangan. Skor literasi keuangan secara keseluruhan dikelompokkan dalam rentang antara 0 dan 100. Hasil untuk Yordania, Meksiko, dan Arab Saudi harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena sampel nasional mungkin tidak mewakili seluruh populasi dewasa. Hasil untuk Malaysia dan Spanyol yang disajikan berasal dari sampel yang diambil pada tahun 2021 menggunakan Toolkit 2018.

Selain menggunakan standar OECD/INFE 2023 Survey of Adult Financial Literacy, ada pendapat lainnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi tingkat

literasi keuangan. Beberapa faktor yang memengaruhi literasi keuangan antara lain pendidikan, pendapatan, kebijakan pemerintah, dan akses informasi keuangan.

1. Pendidikan
   Tingkat literasi keuangan cenderung lebih tinggi pada individu yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi memberikan individu pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang konsep keuangan yang kompleks (Lusardi & Mitchell, 2014b).
2. Pendapatan
   Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan edukasi keuangan. Mereka juga lebih mungkin memiliki kecenderungan untuk mengembangkan keterampilan keuangan yang lebih baik (Lusardi & Tufano, 2015).
3. Kebijakan Pemerintah
   Kebijakan pemerintah yang mendukung edukasi dan inklusi keuangan dapat berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan. Program-program pendidikan keuangan yang disponsori pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep keuangan kepada masyarakat (Infe, 2011).
4. Akses Informasi
   Akses yang mudah terhadap informasi keuangan yang akurat dan terpercaya juga dapat berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan. Informasi yang mudah diakses dapat membantu individu dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih baik (Lusardi & Mitchell, 2011).

Selain faktor-faktor tersebut, faktor lain seperti budaya dan lingkungan sosial juga dapat memengaruhi literasi keuangan seseorang. Budaya yang mendorong tabiat menabung dan investasi, misalnya, dapat membantu meningkatkan literasi keuangan di suatu negara (Lührmann et al., 2018).

1.5 Tantangan Literasi Keuangan

Meningkatkan literasi keuangan merupakan tantangan yang kompleks di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan literasi keuangan antara lain:

1. Kurangnya Edukasi Keuangan
   Kurangnya akses terhadap edukasi keuangan yang berkualitas menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan literasi keuangan. Banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang konsep keuangan seperti tabungan, investasi, dan manajemen risiko. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan keuangan yang tidak efektif dan berisiko.
   Menurut penelitian Lusardi & Mitchell (2011), kurangnya edukasi keuangan berkontribusi pada rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat. Mereka menemukan bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih rendah.
2. Kompleksitas Produk dan Layanan Keuangan
   Kompleksitas produk dan layanan keuangan juga menjadi hambatan dalam meningkatkan literasi keuangan. Banyak produk dan layanan keuangan yang memiliki struktur dan istilah yang rumit, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan membuat orang enggan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan tersebut.
   Menurut penelitian Hastings et al. (2013), kompleksitas produk dan layanan keuangan dapat membuat konsumen kesulitan dalam membuat keputusan keuangan yang tepat. Mereka menemukan bahwa konsumen cenderung memilih produk dan layanan keuangan yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
3. Informasi yang Menyesatkan
   Beredarnya informasi yang menyesatkan tentang keuangan juga menjadi hambatan dalam meningkatkan literasi keuangan. Informasi yang tidak akurat atau tidak jelas dapat membingungkan orang dan

membuat mereka mengambil keputusan keuangan yang salah. Selain itu, adanya penipuan dan skema investasi ilegal juga dapat merugikan masyarakat yang kurang berpengetahuan tentang keuangan.

Menurut penelitian Fernandes et al. (2014), informasi yang menyesatkan tentang investasi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi konsumen yang kurang berpengetahuan. Mereka menemukan bahwa konsumen yang kurang literat keuangan cenderung menjadi korban penipuan investasi.

Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat telah menjadi isu penting di berbagai belahan dunia. Hal ini telah mendorong berbagai negara untuk merancang kebijakan dan program-program yang dirancang untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan mereka masing-masing, terutama melalui penyusunan rancangan strategi literasi keuangan nasional. Hanya pada tahun 2015, data dari *International Network for Financial Education* (INFE) dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menunjukkan bahwa 59 negara/otoritas pemerintah telah menerapkan strategi literasi keuangan nasional. Angka ini tentu telah meningkat, karena beberapa negara akhirnya mengejar ketinggalan dengan merilis strategi nasional dan negara lain, seperti Indonesia, yang telah menerbitkan versi terbaru dari strategi nasional yang sebelumnya telah dirilis, berikut beberapa strategi sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat di beberapa negara (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong, Spanyol, Zambia, Kanada, dan Australia telah meluncurkan strategi literasi keuangan nasional dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan keuangan masyarakat. Malaysia, misalnya, meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan 2019-2023 setelah menemukan potensi peningkatan literasi keuangan berdasarkan hasil survei Bank Negara Malaysia pada 2018. Pendekatan yang diambil termasuk meningkatkan kemitraan publik-swasta, mempromosikan komunikasi yang efektif, mendorong perubahan perilaku, dan meningkatkan akses terhadap produk dan layanan keuangan. Di sisi lain, Hong Kong merilis Strategi Literasi Keuangan 2019 untuk meningkatkan kualitas pendidikan keuangan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan target kelompok sosial tertentu seperti anak sekolah, pemuda, dan orang tua.

Spanyol, sejak 2008, telah meluncurkan beberapa strategi literasi keuangan nasional, dengan yang terbaru adalah Rencana Pendidikan Keuangan 2018-2021. Tujuan strategi terbaru ini adalah membantu masyarakat Spanyol membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan karakteristik pribadi dan keluarga mereka, serta meningkatkan pengelolaan risiko. Australia, melalui NFLS 2014-2017, fokus pada lima prioritas strategis, seperti mengembangkan kurikulum pendidikan keuangan dan meningkatkan koordinasi dan kemitraan yang efektif.

Di sisi lain, Zambia, dengan Strategi Nasional Pendidikan Keuangan untuk Zambia 2019-2024, berusaha mendukung pencapaian target literasi keuangan untuk masyarakat Zambia hingga tahun 2030. Program-program pendidikan keuangan dalam fase kedua ini diprioritaskan untuk anak-anak, pemuda, dewasa, dan semua usia, dengan rencana tindakan atau program kegiatan pendidikan keuangan yang terperinci untuk setiap kelompok ini sebagai bagian dari strategi.

Kanada, melalui strategi literasi keuangannya 2015-2019, berfokus pada tiga tujuan dasar, yaitu mendorong orang untuk mengelola uang dan utang dengan bijaksana, merencanakan keuangan dan menabung untuk masa depan, serta mencegah dan melindungi dari penipuan keuangan. Pendekatan unik yang diambil oleh Kanada adalah dengan merancang program-program sesuai dengan kebutuhan dari setiap segmen target, seperti Aplikasi Small Change untuk penduduk berpenghasilan rendah, Money Matters untuk penduduk asli, dan *Talk With Our Kids About Money Day* (TWOKAM) untuk pemuda.

1.6 Peran Pendidikan dalam Literasi Keuangan

Memperkuat pendidikan keuangan merupakan langkah penting dalam membentuk perilaku keuangan yang bijaksana. Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk memperkuat pendidikan keuangan di berbagai tingkatan pendidikan. Pendekatan yang diambil mencakup integrasi pendidikan keuangan ke dalam kurikulum pendidikan formal, pelatihan keuangan untuk guru dan orang tua, program edukasi

keuangan di komunitas, dan pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan informasi keuangan yang akurat dan terpercaya.

Integrasi pendidikan keuangan ke dalam kurikulum pendidikan formal menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat pendidikan keuangan. Dengan memasukkan konsep dasar keuangan ke dalam kurikulum, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengelola keuangan mereka secara efektif. Sebuah studi oleh Cole & Shastry (2009) menunjukkan bahwa integrasi pendidikan keuangan ke dalam kurikulum sekolah dapat memiliki dampak positif pada pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan siswa.

Selain integrasi ke dalam kurikulum, pelatihan keuangan untuk guru dan orang tua juga merupakan langkah yang penting dalam memperkuat pendidikan keuangan. Guru yang terlatih dalam bidang keuangan dapat memberikan pengajaran yang lebih efektif kepada siswa mereka. Sementara itu, orang tua yang teredukasi keuangan dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka dalam hal pengelolaan keuangan pribadi. Hasil penelitian Fernandes et al. (2014) menunjukkan bahwa pendidikan keuangan bagi orang tua dapat memiliki dampak positif pada pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan keluarga.

Mendorong program edukasi keuangan di komunitas juga merupakan langkah yang efektif dalam memperkuat pendidikan keuangan. Program-program ini dapat mencakup seminar, lokakarya, dan pelatihan keuangan yang ditujukan untuk masyarakat umum. Melalui program ini, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan mereka dengan baik. Riset Lusardi & de Bassa Scheresberg (2013) menemukan bahwa program edukasi keuangan di komunitas dapat meningkatkan pengetahuan keuangan dan kepercayaan diri dalam mengelola keuangan.

Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu memperkuat pendidikan keuangan dengan menyebarkan informasi keuangan yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat luas. Dengan menggunakan platform digital seperti situs web, aplikasi seluler, dan media sosial, informasi keuangan dapat disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Sebuah studi oleh Kusumawardhani et al. (2023) menemukan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan keuangan dapat meningkatkan pemahaman keuangan dan keterampilan keuangan individu.

Pendidikan literasi keuangan di berbagai negara didasarkan pada berbagai inisiatif dan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah, organisasi layanan keuangan, sekolah, pengusaha, organisasi nirlaba, dan pemangku kepentingan lainnya dalam komunitas. Peran yang dimainkan oleh berbagai pihak dalam upaya pendidikan keuangan bervariasi di setiap negara, namun ada beberapa negara menggunakan strategi pendidikan literasi keuangan sejak di sekolah.

Pendidikan keuangan di berbagai negara didukung oleh beragam inisiatif dan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah, organisasi layanan keuangan, sekolah, pengusaha, organisasi nirlaba, dan pemain komunitas lainnya. Di Australia, pendidikan keuangan tidak hanya ditujukan untuk siswa, tetapi juga orang tua dan anggota keluarga lainnya, terutama di daerah terpencil di mana sekolah menjadi pusat komunitas (Australia Securities & Investments Commission (ASIC), 2014).

Di Kanada, Task Force on Financial Literacy, meskipun memiliki kritik atas over-representasi dari sektor keuangan, menyarankan agar Kementerian Pendidikan Provinsi bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan keuangan, dan pada tahun 2020, sebagian besar provinsi telah memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum sekolah menengah mereka (Pinto, 2013, 2016).

Di Finlandia, meskipun tersedia pendidikan keuangan di sekolah namun tidak termasuk dalam wewenangnya melatih siswa, hanya pendidikan untuk guru (Pankki, 2021; Raijas, 2020). Di Jerman, pendidikan ekonomi diberikan baik diintegrasikan dalam mata pelajaran lain atau sebagai topik mandiri, namun pendidikan keuangan pribadi tidak menjadi bagian dari kurikulum (Erner et al., 2016; Frühauf & Retzmann, 2016).

Di Belanda, pendidikan keuangan memiliki representasi terbatas dalam kurikulum sekolah, umumnya melalui presentasi dan proyek satu kali (Van der Schors & Simonse, 2016). Di Inggris, pendidikan keuangan secara resmi menjadi bagian dari kurikulum di sekolah menengah pada tahun 2014, meskipun termasuk dalam persyaratan Pendidikan Pribadi, Sosial, dan Kesehatan (PSHE) dan bukan subjek inti yang wajib (Farnsworth, 2016; Stillwell, 2016).

Bab 2

Memahami Uang dan Bank

2.1 Pengantar

Di era globalisasi dan digitalisasi yang pesat, pemahaman tentang uang dan bank menjadi semakin penting bagi individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Uang dan bank bukan sekedar alat tukar atau lembaga keuangan tetapi juga landasan sistem perekonomian modern.

Uang memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Uang sebagai alat pembayaran digunakan untuk transaksi jual beli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain mengenal uang sebagai alat pembayaran, kita juga perlu memahami pengertian uang, sejarahnya, syarat-syarat dan jenis dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari..

Bank sangat erat kaitannya dengan uang. Bank berperan dalam lalu lintas uang dan surat berharga dalam perekonomian. Bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun perlu diketahui bank juga menerima berbagai bentuk pembayaran.

2.2 Pengertian Uang

Uang adalah sebuah medium pertukaran yang secara luas diterima dalam sebuah pasar sebagai pembayaran atas barang, jasa, dan utang. Uang memiliki beberapa fungsi utama dalam ekonomi, termasuk sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan standar nilai. Uang dapat berupa kertas, logam, atau bentuk elektronik dan digital.

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Uang adalah alat-alat untuk mencapai suatu maksud, yakni sebagai suatu alat perantara saja tidak untuk yang lain (Satriak Guntoro & Husni Thamrin, 2021).

Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya juga untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Berikut ini pengertian uang menurut para ahli:

1. Mankiw
   Uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi, selain itu uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang, uang memiliki satu tujuan fundamental dalam sistem ekonomi, memudahkan pertukaran barang dan jasa, mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan.
2. Menurut Albert Gailort Hart
   Pengertian uang menurut Albert Gailort Hart adalah suatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi hutang dalam jumlah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula.
3. Menurut Walker
   Pengertian uang secara umum adalah semua hal yang dapat dilakukan oleh uang itu. Dengan kata lain, uang adalah uang karena fungsinya sebagai uang dan bukan karena fungsi-fungsi yang lain.

4. Menurut A. C. Pigou
   Menurut pendapat dari A. C. Pigou, pengertian uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar.
5. Menurut Rollin G.
   Thomas Rolling G. Thomas menyatakan arti uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta untuk pelunasan utang.
6. Menurut R. S. Sayers
   Pengertian uang menurut R. S. Sayers dalam bukunya berjudul Modern Banking adalah segala sesuatu yang umum diterima bagi pembayaran utang.
7. Menurut Irma Rahmawati
   Irma Rahmawati mengemukakan pendapat bahwa uang merupakan suatu benda yang mampu untuk disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat untuk penukaran dalam perdagangan.
8. Menurut H. Robertson
   Arti uang menurut H. Robertson merupakan segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa dalam masyarakat.
9. Menurut Rismsky K. Judisseno
   Definisi uang merupakan satu media yang mampu untuk diterima yang digunakan oleh setiap pelaku ekonomi atau pun pelaku pasar uang guna mempermudah pada saat bertransaksi.
10. Menurut Kasmir
    Pengertian uang merupakan alat tukar menukar, dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.

11. Menurut George N. Halm
    Pengertian uang adalah hal untuk mempermudah perantara tukar-menukar dalam mengatasi masalah sistem barter atau kesulitan-kesulitan dalam transaksi kredit.

2.3 Sejarah Uang

Uang saat ini berbeda dengan uang di masa lalu. Sebelum uang ditemukan, masyarakat menggunakan sistem barter, yaitu sistem pertukaran barang dan jasa dengan barang dan jasa lainnya. Dalam pertukaran barang dengan sistem barter, uang digunakan dan mudah diterima sebagai alat pembayaran yang sah karena sulitnya menemukan keinginan bersama. Pada zaman dahulu, uang belum ada dalam bentuk koin atau kertas seperti saat ini. Dahulu masyarakat memanfaatkan kerang dan garam untuk transaksi ekonomi.

Kesulitan dalam sistem barter mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran adalah benda-benda yang diterima oleh umum (*generaly accpeted*). Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya, garam oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar, maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang; orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin salarium yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga sulit menentukan nilai uang, penyimpanan (*storage*) dan pengangkutan (transportation) menjadi sulit dilakukan; serta timbulnya kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas

dan perak juga disebut sebagai uang penuh (full bodied money), artinya nilai intrinsik (nilai bahan uang) sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang menempa uang, melebur, menjual, dan memakainya dan setiap orang mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah, sedangkan jumlah logam mulia (emas dan perak) terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar (sulit dalam pengangkutan dan penyimpanan). Sehingga lahirlah uang kertas

Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.

2.3 Syarat-Syarat Uang

Banyak sekali komoditi yang pernah dijadikan uang, apapun komoditi itu, agar sah diakui diterima sebagai uang oleh masyarakat maka uang sebagai alat tukar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Triandaru & Budisantoso, 2006):

1. Dapat diterima oleh umum (*Acceptability*),
2. Tahan lama dan tidak mudah rusak (*durability*),
3. Mudah disimpan dan nilainya tetap (*stability*),
4. Mudah dipindah dan dibawa kemana-mana (*portability*), uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari.
5. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*),
6. Jumlahnya mencukupi *(elasticity of supply*)
7. Syarat psikologis, bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya.

2.4 Fungsi dan Jenis Uang

2.4.1 Fungsi Uang

Fungsi Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

1. Fungsi Asli Uang

   Suatu benda dapat dijadikan sebagai "uang" jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum (*acceptability*). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintahan.

   Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability)*, kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*). Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*). Fungsi asli uang terbagi menjadi:

   Sebagai Alat Tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat di atasi dengan pertukaran uang.

   Sebagai Satuan Hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran.

Sebagai Alat Penyimpan Nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang.

2. Fungsi Turunan Uang
   Uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan tersebut diantaranya:
   a. Sebagai Alat Pemindah Kekayaan: Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama.
   b. Sebagai Pendorong Kegiatan Ekonomi: Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat.
   c. Sebagai Alat Pembayaran yang Sah: Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang.
   d. Sebagai Alat Pembayaran Utang: Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang.
   e. Sebagai Alat Penimbun Kekayaan: Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang

2.4.2 Jenis Uang

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan.

Uang ini hanya beredar dikalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini.

Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.

1. Jenis Uang Berdasarkan Bahan Pembuatnya
   Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas.
   a. Uang Logam
      Uang logam terbuat dari logam; biasanya dari emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki tiga macam nilai, yaitu:
      Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang.
   b. Uang Kertas
      Selanjutnya Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

2. Jenis Uang Berdasarkan Lembaga yang Mengeluarkan
   Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi uang kartal (kepercayaan) dan uang giral (simpanan di bank):
   a. Uang Kartal (kepercayaan) yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas.
   b. Uang Giral (simpanan di bank) yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek bilyet, giro, atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank.
3. Uang Berdasarkan Nilainya
   Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi uang penuh (*full bodied money*) dan uang tanda (*token money*):
   a. Uang Penuh (*full bodied money*) – Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya.
   b. Uang Tanda (*token money*) – Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut.

2.5 Pentingnya Memahami Uang

Memahami uang dan bank memiliki beberapa kepentingan yang sangat relevan dalam konteks kehidupan ekonomi modern. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemahaman tentang uang dan bank sangat penting:

1. Manajemen Keuangan Pribadi
   Manajemen keuangan pribadi merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur mulai dari perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Pemahaman tentang uang dan bank membantu individu dalam manajemen keuangan pribadi mereka. Ini meliputi pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan investasi secara bijaksana.
2. Menghindari Penipuan Keuangan
   Dengan memahami cara kerja perbankan dan layanan keuangan, individu dapat lebih waspada terhadap penipuan keuangan. Mereka dapat mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dan melindungi diri mereka dari kehilangan uang.
3. Pengambilan Keputusan Keuangan yang Bijaksana
   Pemahaman tentang produk dan layanan perbankan membantu individu dan bisnis dalam mengambil keputusan keuangan yang bijaksana. Mereka dapat memilih produk dan layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan mereka.
4. Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
   Pengetahuan tentang peran bank dalam ekonomi membantu individu dan masyarakat dalam memahami bagaimana kegiatan perbankan memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ini termasuk pendanaan investasi, peran bank dalam menciptakan lapangan kerja, dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan.
5. Perlindungan dan Pengaturan Keuangan
   Pemahaman tentang regulasi perbankan membantu individu dan perusahaan dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan dengan lembaga keuangan. Ini juga membantu dalam

melindungi konsumen dan memastikan kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

6. Partisipasi dalam Perkembangan Teknologi Keuangan
   Dengan pemahaman tentang inovasi dalam industri perbankan, individu dapat lebih mudah berpartisipasi dalam perkembangan teknologi keuangan, seperti layanan perbankan digital dan teknologi finansial (*fintech*). Ini memungkinkan akses ke layanan keuangan yang lebih efisien dan mudah diakses.
7. Kesadaran akan Tanggung Jawab Sosial dan Etika Bisnis
   Memahami peran bank dalam tanggung jawab sosial dan etika bisnis membantu individu dan masyarakat dalam membuat pilihan yang lebih sadar secara sosial dan moral. Ini mencakup pemahaman tentang kontribusi bank terhadap pembangunan berkelanjutan dan prinsip etika dalam bisnis perbankan.

2.6 Defenisi Bank

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang (Harahap & Saraswati, 2020). Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya yang menghimpun dan menyalurkan dana (Kasmir, 2012).

Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Nasfi et al., 2022).

Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

2.7 Jenis-Jenis Bank

Di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan seperti diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Kasmir, 2012).

1. Jenis Bank dilihat dari Segi Fungsinya
   Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pasal 5 tentang Perbankan, jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:
   a. Bank Umum
   b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2. Jenis Bank dilihat dari Segi Kepemilikannya
   Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah:
   a. Bank Milik Pemerintah
   b. Bank Milik Swasta Nasional
   c. Bank Milik Asing
   d. Bank Milik Campuran
3. Jenis Bank dilihat dari Segi Statusnya
   Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:
   a. Bank Devisa
   b. Bank Non-Devisa
4. Jenis Bank dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga
   Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:
   a. Bank Konvensional
   b. Bank Syariah

2.8 Perkembangan Teknologi dan Pengaruhnya terhadap Perbankan

Perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan pada industri perbankan. Berikut adalah beberapa pengaruh dari perkembangan teknologi terhadap perbankan:

1. Digitalisasi Layanan Perbankan
   Perkembangan teknologi telah memungkinkan digitalisasi layanan perbankan, yang memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan secara online melalui perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau tablet. Ini termasuk layanan seperti internet banking, mobile banking, dan aplikasi perbankan.
2. Teknologi Finansial (Fintech)
   Kemajuan dalam teknologi telah memicu munculnya industri teknologi finansial (fintech). Fintech menghadirkan inovasi dalam produk dan layanan keuangan, seperti pembayaran digital, peer-to-peer lending, investasi online, dan teknologi blockchain. Fintech sering kali menawarkan solusi yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses daripada lembaga keuangan tradisional.
3. Layanan Perbankan Berbasis AI dan Analitik
   Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan analitik data telah meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, mendeteksi penipuan, dan memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Contohnya termasuk chatbot AI untuk layanan pelanggan dan analisis prediktif untuk pemahaman yang lebih baik tentang perilaku nasabah.
4. Pembayaran Digital dan Uang Elektronik
   Teknologi telah memfasilitasi pertumbuhan pembayaran digital dan penggunaan uang elektronik. Metode pembayaran seperti dompet digital, kartu prabayar, dan transaksi nontunai semakin umum digunakan, menggantikan pembayaran tunai tradisional.

5. Penyediaan Layanan Keuangan kepada Lebih Banyak Orang
   Melalui teknologi, bank dapat menjangkau lebih banyak orang di wilayah yang sebelumnya sulit diakses secara geografis. Layanan keuangan seperti rekening bank digital dan mikrofinansial dapat memperluas akses ke layanan keuangan kepada individu dan bisnis di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah.
6. Perlindungan Keamanan Data dan Privasi
   Seiring dengan manfaatnya, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru terkait keamanan data dan privasi. Bank harus memperkuat sistem keamanan mereka untuk melindungi informasi sensitif nasabah dari ancaman keamanan cyber yang berkembang.
7. Transformasi Model Bisnis Bank
   Perkembangan teknologi telah mendorong bank untuk mengubah model bisnis mereka agar lebih responsif terhadap perubahan pasar dan ekspektasi nasabah. Bank-bank tradisional mulai mengadopsi strategi digital dan kolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk tetap kompetitif dalam era digital.

Bab 3

Pengelolaan Uang dan Anggaran

Kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai kemampuan finansial, seperti investasi, penganggaran, dan manajemen keuangan pribadi, dikenal sebagai literasi keuangan. Kemampuan untuk mengelola keuangan dan membuat anggaran sangat penting untuk literasi keuangan (Yushita, 2017). Untuk mencapai kesuksesan dan stabilitas keuangan, orang perlu belajar bagaimana mengelola keuangan mereka secara efektif dan membuat anggaran (Panos & Wilson, 2020).

Untuk mencapai tujuan keuangan, pengelolaan uang memerlukan penganggaran, menabung, investasi, dan pengeluaran yang bijaksana. Distribusi pendapatan di antara pengeluaran, tabungan, dan investasi dikenal sebagai penganggaran. Literasi keuangan didasarkan pada dua ide yang saling berhubungan ini.

Berikut ini akan dibahas manfaat pengelolaan uang dan anggaran serta tips praktis untuk meningkatkan kemampuan mengelola uang dan menganggarkan dana.

3.1 Manfaat pengelolaan uang dan anggaran

Penganggaran dan pengelolaan uang adalah keterampilan hidup yang penting yang harus dimiliki setiap orang. Sangat mudah untuk membiasakan diri untuk berbelanja secara berlebihan, menumpuk utang, dan hidup dari gaji ke gaji dalam masyarakat yang serba cepat dan digerakkan oleh konsumen saat ini. Namun, orang dapat mengambil alih kendali atas keuangan mereka, mengurangi stres keuangan, dan bekerja untuk mencapai tujuan keuangan mereka dengan terlibat dalam pengelolaan uang yang efisien dan praktik penganggaran.

Kemampuan untuk mengelola uang dan membuat anggaran adalah kemampuan penting yang dapat sangat memengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan, merasa aman dalam keuangan mereka, dan secara umum bahagia. Orang-orang dapat mengambil alih keuangan mereka dan bekerja untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka dengan membuat anggaran, melacak pengeluaran mereka, dan menetapkan tujuan keuangan. Pada akhirnya, penganggaran yang baik dan teknik pengelolaan uang dapat menghasilkan masa depan keuangan yang lebih stabil dan memuaskan.

Berikut ini adalah beberapa manfaat pengelolaan uang dan anggaran:

1. Stabilitas Keuangan. Orang-orang dapat memantau pendapatan dan pengeluaran mereka dan memastikan mereka tidak membelanjakan lebih banyak daripada yang mereka hasilkan dengan membuat dan mematuhi anggaran. Dengan membantu orang menghindari utang dan kesulitan keuangan lainnya, teknik ini dapat mendorong stabilitas keuangan (Angrisani et al., 2020).
2. Keamanan finansial. Keamanan finansial yang lebih baik adalah salah satu keuntungan utama dari penganggaran dan pengelolaan uang. Orang dapat menemukan area di mana mereka mungkin membayar lebih dan membuat perubahan untuk memastikan bahwa mereka hidup sesuai kemampuan dengan membuat anggaran dan memantau pengeluaran mereka. Dengan melakukan hal ini, dapat dipastikan bahwa ada cukup uang yang disisihkan untuk keadaan

darurat atau kebutuhan tak terduga dan membantu mencegah pertumbuhan utang. Seiring berjalannya waktu, pengelolaan keuangan yang bijak juga dapat membantu orang mencapai tujuan keuangan lainnya, seperti kepemilikan rumah atau tabungan pension (Janposri, 2021; Klapper & Lusardi, 2019).

3. Pencapaian Tujuan: Menetapkan dan mencapai tujuan keuangan, seperti menabung untuk uang muka rumah, membayar biaya sekolah, atau mengumpulkan dana pensiun, dapat dilakukan dengan pengelolaan uang dan penganggaran yang baik (Koh et al., 2020).
4. Manajemen utang: Dengan membuat anggaran, masyarakat dapat menjadikan pelunasan utang sebagai prioritas utama dan menjauhi pinjaman berbunga tinggi (Chhatwani & Mishra, 2021). Orang-orang dapat memperbaiki kesehatan keuangan mereka dan mengurangi utang mereka dengan mengelola uang mereka dengan bijak.
5. Kesiapsiagaan Darurat: Orang-orang dapat mengurangi stres dan ketidakpastian keuangan dengan menyisihkan uang dalam anggaran mereka untuk keadaan darurat dan biaya tak terduga (Fan & Zhang, 2021). Hal ini memungkinkan mereka untuk membentuk dana darurat untuk menangani tagihan tak terduga. Despard, Friedline and Martin (2020) menambahkan bahwa berbagai taktik harus digunakan untuk mendorong tabungan darurat, seperti edukasi dan konseling keuangan untuk memberikan lebih banyak ruang gerak keuangan, serta inisiatif dan peraturan untuk memperluas akses terhadap kemungkinan tabungan jangka pendek dan imbalan.

   Charalambous (2015) mengatakan bahwa mengelola keuangan dan membuat anggaran dapat menolong untuk menghindari dan mampu mengatasi krisis. Keadaan hidup yang tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, mengalami kecelakaan hebat, atau mengalami masalah kesehatan, sering kali mengakibatkan meningkatnya pengeluaran dalam jumlah besar. Bagaimana Anda dapat mengelola biaya seperti ini dengan anggaran? Jika Anda baru mengenal penganggaran dan belum memiliki tabungan darurat, atau jika keadaan darurat sebelumnya telah menguras tabungan Anda, anggaran akan

membantu Anda mengidentifikasi biaya yang mungkin dapat Anda atur ulang atau tunda untuk membantu Anda menutupi biaya tak terduga. Misalnya, jika memungkinkan, Anda dapat membatasi pengeluaran akhir pekan Anda untuk makan di kafe, restoran, mal, atau toko bahan makanan.

6. Kemampuan yang Lebih Baik dalam Mengambil Keputusan Finansial. Keuntungan lebih lanjut dari penganggaran dan pengelolaan uang adalah pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik (Lusardi & Mitchell, 2023). Orang dapat membuat keputusan keuangan yang bijak ketika mereka memiliki informasi yang cukup tentang pendapatan dan pengeluaran mereka. Hal ini dapat membantu mengalokasikan dana untuk investasi dan tabungan serta membantu memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan seperti tempat tinggal, makanan, dan perawatan medis. Membuat anggaran juga dapat membantu orang dalam menentukan di mana mereka dapat melakukan pengurangan biaya atau di mana mereka bisa mengeluarkan biaya berlebihan. Orang dapat membuat keputusan yang disengaja tentang di mana membelanjakan uang mereka dan menghindari pembelian impulsif yang mungkin tidak sejalan dengan aspirasi keuangan jangka panjang mereka dengan melacak pengeluaran mereka dan menentukan tujuan keuangan.
7. Peningkatan Kesejahteraan Umum. Penganggaran dan pengelolaan uang adalah jalur tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum (Hudson & Young, 2023). Penelitian telah menunjukkan bahwa mereka yang merasa bertanggung jawab atas situasi keuangan mereka melaporkan kehidupan yang lebih bahagia dan lebih puas (Panos & Wilson, 2020). Orang-orang dapat meningkatkan kesehatan mental dan emosional mereka dengan mengelola uang mereka, yang akan mengurangi stres dan kekhawatiran.

3.2 Tips Praktis untuk Meningkatkan Kemampuan Mengelola Uang dan Menganggarkan Dana

1. Tetapkan Anggaran: Untuk mulai menyusun anggaran yang realistis, catatlah pendapatan dan pengeluaran Anda. Sisihkan uang untuk tabungan, pembayaran utang, dan kebutuhan seperti perumahan, utilitas, makanan, dan transportasi.
2. Tetapkan Tujuan Keuangan: Tentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, seperti pelunasan utang, tabungan liburan, dan investasi pensiun. Memiliki tujuan yang jelas akan membantu dalam menginspirasi dan mengarahkan pilihan keuangan Anda (Charalambous, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa anggaran akan membantu Anda menyisihkan uang untuk tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, mendanai pendidikan perguruan tinggi anak, dan menabung untuk masa pensiun, serta tujuan jangka pendek seperti membayar tagihan bulanan dan tujuan jangka menengah seperti liburan. Anda akan selalu tahu kapan Anda perlu mengurangi pengeluaran, kapan Anda mampu melonggarkan kendali, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menabung untuk tujuan utama ketika Anda memiliki spreadsheet atau buku catatan yang menunjukkan berapa banyak uang yang Anda harapkan untuk dihasilkan selama beberapa bulan (atau tahun) ke depan, berapa banyak dari uang itu yang keluar setiap bulannya, dan berapa banyak yang tersisa untuk ditabung setiap bulannya.
3. Pantau dan Modifikasi: Untuk memantau kemajuan Anda, periksa tujuan dan anggaran keuangan Anda secara berkala. Untuk tetap berada di jalur yang benar dan merespons kondisi yang berubah, buatlah modifikasi yang diperlukan.
4. Carilah Pendidikan Keuangan: Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan uang Anda dan mengikuti perkembangan praktek terbaik

keuangan pribadi, manfaatkan perangkat literasi keuangan, lokakarya, dan kursus.

3.3 Bagaimana Membuat Anggaran?

Charalambous (2015) memberikan saran bagaimana caranya membuat anggaran yakni sebagai berikut:

1. Catat setiap sumber pendapatan
   Mencatat setiap uang yang Anda hasilkan setiap bulan harus menjadi tugas pertama Anda. Pendapatan lebih dari sekadar gaji Anda; pendapatan juga bisa berasal dari investasi atau pekerjaan paruh waktu yang Anda lakukan yang menghasilkan uang secara teratur. Sangat penting untuk memasukkan semua sumber pendapatan, seperti tunjangan anak dan sumber pendapatan lainnya.
2. Catat Semua Pengeluaran, Bahkan yang Kecil sekalipun
   Menyimpan semua bukti pembayaran adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa Anda mencatat semua pengeluaran Anda, termasuk pengeluaran kecil seperti perawatan dan asuransi mobil, sewa rumah, cicilan pinjaman, tagihan listrik, dan biaya-biaya besar lainnya. Penting untuk diingat bahwa kemungkinan akan ada biaya yang terkait dengan setiap transaksi jika kartu kredit digunakan untuk pembayaran. Selain itu, akan ada biaya tambahan-bunga-jika kartu kredit tidak dilunasi secara penuh.
3. Perbarui Anggaran Setiap Hari. Metode pelacakan uang ini menghemat banyak waktu dan mengurangi kemungkinan lupa. Selain itu, anggaran perlu dibuat dari bulan ke bulan, bukan berdasarkan kapan pendapatan diterima. Dengan cara ini, kontrol yang lebih besar atas pengeluaran dapat dipertahankan.
4. Gunakan Deskripsi yang Tepat. Pengeluaran harus dilaporkan sesuai dengan sifatnya, bukan dari toko mana pengeluaran tersebut dibeli. Hasilnya, jumlah yang dibelanjakan di setiap kategori akan terlihat jelas. Sebagai contoh, jika seseorang membeli di toko besar yang

menjual berbagai macam barang, mereka pasti akan menerima satu tagihan. Namun, jumlah yang satu ini perlu dibagi ke dalam beberapa kategori anggaran, seperti bahan makanan, pakaian, dan perlengkapan kebersihan rumah. Untuk menjaga kontrol atas pengeluaran ini, akan sangat membantu jika Anda membuat kategori untuk hiburan, seperti film, restoran, dan konser.

5. Buatlah rencana pengeluaran tetap dan variabel.
   Istilah "rencana" sangatlah penting. Membuat prediksi tentang pengeluaran yang akan datang akan sangat membantu setelah Anda membuat anggaran karena hal ini akan memungkinkan Anda untuk tetap mengontrolnya dan memastikan bahwa Anda memiliki cukup uang untuk menutupinya. Gas dan utilitas adalah contoh pengeluaran variabel, sedangkan sewa dan asuransi kesehatan adalah contoh pengeluaran tetap.
6. Buatlah rencana pengeluaran sporadis
   Sisihkan uang untuk pengeluaran sporadis seperti hadiah, asuransi mobil, dan janji temu medis. Anda dapat menanggung hal-hal tersebut jika anggaran Anda memungkinkan. Jika anggaran Anda lebih terbatas, pastikan untuk menganggarkan uang ekstra di muka.

Tergantung pada seberapa baik Anda dapat mengendalikan diri, anggaran Anda bisa lebih atau kurang terperinci. Selain itu, penganggaran sedikit berbeda tergantung pada apakah pendapatan Anda konsisten atau bervariasi. Anda mungkin tidak akan tahu berapa banyak yang akan Anda hasilkan hingga akhir bulan jika Anda bekerja secara musiman, wiraswasta, dibayar per jam atau komisi, atau pelajar. Meskipun penganggaran sedikit lebih sulit jika gaji tidak teratur, hal ini masih mungkin dilakukan. Apapun yang terjadi, Anda akan selalu perlu membayar biaya-biaya tertentu, dan jika Anda telah bekerja di bidang yang sama selama beberapa waktu, Anda mungkin memiliki gagasan yang layak tentang berapa jumlah minimum yang harus Anda hasilkan.

Berikut adalah contoh anggaran:

Pendapatan	
Gaji	13,000,000
Sumber lainnya	5,000,000
Total Pendapatan	**18,000,000**
Fixed Expenses	
Persembahan dan Persepuluhan	2,520,000
Dana Darurat	1,000,000
Asuransi	1,200,000
BPJS	300,000
Tabungan	1,500,000
Dana Pensiun	300,000
Cicilan Rumah	3,600,000
Belanja rutin bulanan	1,500,000
Gas	150,000
Listrik, Air, dan Telpon	600,000
Uang sekolah anak	1,200,000
Les Anak	1,200,000
Amal	1,000,000
Total Fixed Expense	**16,070,000**
Variable Expenses	
Perawatan Kendaraan	200,000
Pakaian	100,000
Entertainment	100,000
Salon	200,000
Keperluan sekolah anak	1,000,000
Lain-Lain	300,000
Total variabel expenses	**1,900,000**
Sisa	**30,000**

Membuatnya sendiri juga bisa menjadi pilihan. Yang perlu Anda lakukan adalah menyesuaikan kategori pengeluaran dan pemasukan agar sesuai dengan keadaan unik Anda. Misalnya, untuk individu atau keluarga tertentu, biaya bahan makanan dan makanan lainnya mungkin tidak tetap. Setelah itu, buatlah sebelas salinan dari lembar tersebut sehingga Anda memiliki lembar kerja untuk setiap bulan dalam setahun. Hal ini akan memudahkan Anda untuk membuat perencanaan sebelumnya dan meninjau kinerja bulan-bulan sebelumnya.

Setiap orang yang ingin sukses secara finansial harus belajar mengelola uang dan membuat anggaran. Setiap orang dapat mencapai tujuan keuangan mereka, mengelola utang dengan baik, dan mencapai stabilitas keuangan dengan mengembangkan kemampuan-kemampuan ini. Orang dapat membuat

keputusan keuangan yang lebih baik dan menciptakan masa depan keuangan yang aman dengan latihan, pendidikan, dan dedikasi (Charalambous, 2015).

Anggaran membantu orang mencapai tujuan mereka, dan selama mereka tetap berada dalam batas kemampuan mereka setiap bulannya, anggaran dapat menjadi alat yang sangat baik untuk membuat tidur nyenyak. Mereka mengetahui kemana uang mereka pergi, bahwa mereka berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan mereka, dan bahwa mereka telah membuat rencana untuk menghadapi badai yang mungkin terjadi.

Anggaran berfungsi sebagai pengingat yang menjengkelkan namun penting bahwa banyak hal perlu diubah jika pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan; semakin cepat kita memperhatikan statistik yang menjengkelkan itu, semakin baik keadaan kita. Hidup dari gaji ke gaji hanya bekerja untuk sementara waktu; jika Anda tidak belajar membuat anggaran, pada akhirnya Anda akan mengalami pengeluaran yang tidak dapat Anda tanggung atau tujuan yang tidak dapat Anda capai. Oleh karena itu, membuat anggaran sangat disarankan.

Bab 4

Tabungan dan Investasi

4.1 Berbagai Pemikiran tentang Tabungan

Pada zaman Yunani kuno sebelum sekitar tahun 600 SM, terdapat filsafat tentang menabung. Misalnya, kita dapat belajar banyak dari "*The Ant and the Grasshopper" dalam "Aesop's Fables"*. Kisah ini memberitahu kita bahwa manfaat kerja keras dan menabung serta bahayanya improvisasi (Caxton, 1483). Ada pula pernyataan yang berkaitan dengan konsumsi dan tabungan dari Aristoteles, misalnya yang mengatakan bahwa "Dari seni akuisisi maka ada yang bersifat alamiah dan merupakan bagian dari pengelolaan rumah tangga. Entah kita harus menganggap kebutuhan hidup sudah ada sebelumnya, atau seni mengurus rumah tangga harus menyediakan simpanannya untuk keperluan umum keluarga atau negara. Mereka adalah unsur kekayaan sejati; karena jumlah harta benda yang dibutuhkan untuk kehidupan yang baik tidaklah terbatas, meskipun Solon dalam salah satu puisinya mengatakan bahwa, Manusia tidak terikat pada kekayaan (Monroe, 1930).

Mandeville (1705) menegaskan bahwa sifat buruk manusia seperti hidup mewah dapat meningkatkan sirkulasi ekonomi dan merangsang kemajuan masyarakat. Gagasan ini sejalan dengan paradoks menabung yang dikemukakan oleh Hayek (1931) dan Keynes (1936).

Quesnay (1758) mengatakan bahwa pengeluaran dekorasi mewah yang berlebihan oleh pemilik tanah dan kelas tidak produktif akan menghabiskan kekayaan negara dan konsumsi dalam negeri.

Smith (1776) juga menceritakan kisah yang berkaitan dengan menabung. Dikatakan bahwa pembagian kerja meningkatkan produktivitas perekonomian untuk menghasilkan keuntungan, kemudian masyarakat menyimpan sebagian dari surplus tersebut untuk investasi baru. Akumulasi modal melalui investasi semakin meningkatkan pembagian kerja, dan produktivitas ekonomi meningkat, tabungan dan modal semakin meningkat. Ini hanyalah sebuah sirkulasi antara pembagian kerja, tabungan dan akumulasi modal.

Ricardo (1817) menganalisis dampak pajak dan utang pemerintah terhadap perekonomian. Dia mengatakan bahwa waktu terjadinya perubahan pajak atau utang tidak memengaruhi pengeluaran karena individu menginternalisasikan batasan anggaran pemerintah. Hipotesis kesetaraan Ricardian juga disebut oleh para pengikutnya. Ide ini telah diperluas oleh banyak ekonom seperti Barro (1976). Hipotesis tersebut menduga bahwa rumah tangga akan meningkatkan tabungan saat ini jika ia memperkirakan kenaikan pajak oleh pemerintah di masa depan.

Malthus (1820) percaya bahwa kapitalis menabung banyak untuk mengakumulasi modal, sementara pemilik tanah dan pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup untuk membeli produk, sehingga terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya permintaan. Untuk mengatasi krisis seperti ini, diperlukan transfer pendapatan dari kapitalis ke pemilik tanah dan pekerja.

Marx (1867) mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kapitalis dan kelompok pekerja. Kapitalis memiliki seluruh modal dan memonopoli seluruh surplus perusahaan, dan kemudian melakukan penghematan besar-besaran untuk memperbesar skala industri. Sebaliknya, pekerja hanya memperoleh upah subsisten, tidak menabung apa pun, dan tidak dapat melakukan akumulasi kekayaan. Perekonomian ini menyebabkan dua krisis. Pertama, yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin selalu miskin, kesenjangan pendapatan semakin besar seiring dengan kemajuan ekonomi, dan masyarakat menjadi tidak stabil akibat meningkatnya ketimpangan pendapatan. Yang kedua adalah, orang kaya tidak dapat mengkonsumsi produk tersebut karena output dari pabrik lebih banyak daripada permintaan orang kaya, sedangkan pekerja miskin tidak mempunyai uang atau daya beli untuk membeli lebih banyak lagi meskipun dia ingin mengkonsumsi

semuanya. produk dari industri tersebut. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi yang disebabkan oleh tidak efisiennya permintaan domestik yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Pendapat Marx sangat mirip dengan pendapat Malthus, dan faktor umum terjadinya krisis ekonomi adalah ketidakseimbangan konsumsi tabungan yang disebabkan oleh distorsi distribusi pendapatan dan kekayaan.

Hobson (1889) menunjukkan bahwa krisis ekonomi ekonomi kapitalis berasal dari kelas kaya yang melakukan over saving dan overdrift. Penghematan yang tidak terbatas bukanlah suatu kebaikan tetapi menyebabkan tidak efisiennya permintaan domestik yang efektif. Alasan kelas kaya memonopoli kekayaan utama nasional adalah institusi sosial yang tidak adil. Tabungan yang berlebihan ini pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan kemajuan sosial. Hobson tidak hanya mewarisi desakan utama Malthus dan Marx, namun juga mengambil langkah lebih jauh.

Veblen (1899) menganalisis masalah konsumsi dan tabungan dari sudut pandang status sosial. Misalnya, kita dapat membaca uraian berikut dalam bukunya yang berjudul "*Conspicuous Consumption*". Konsumsi menjadi elemen yang lebih besar dalam standar hidup di daerah kota dibandingkan di pedesaan. Di antara penduduk negara, posisinya sampai batas tertentu diambil oleh tabungan dan kenyamanan rumah yang diketahui melalui media sosial lingkungan yang cukup untuk memenuhi tujuan yang sama yaitu reputasi uang. Kenyamanan rumah dan waktu luang yang dinikmati di mana kesenangan itu ditemukan, tentu saja sebagian besar juga dapat digolongkan sebagai barang konsumsi yang mencolok; dan hal serupa juga berlaku pada tabungan.

4.2 Teori Tabungan (*Saving Theory*)

Ramsey (1928) mempertimbangkan masalah penghematan yang optimal secara matematis dalam cakrawala tak terbatas. Dia menjawab pertanyaan berapa banyak pendapatan yang harus ditabung suatu negara. Ia menemukan bahwa suatu negara dapat menemukan cara menabung yang optimal untuk memaksimalkan utilitas seumur hidup individu. Ramsey melakukan pekerjaan yang melanggar umpan pada masalah penyelamatan. Literatur selanjutnya

seperti hipotesis pendapatan permanen dan hipotesis siklus hidup sebagian besar dipengaruhi oleh temuan Ramsey.

Sebagai penasehat Ramsey, Keynes (1933) mengajukan hipotesis pendapatan absolut. Ia mengatakan, sebagian pendapatan saat ini dikonsumsi dan sebagian lagi ditabung. Hipotesis ini menjadi landasan teorinya tentang pengangguran dan ekonomi makro. Keynes (1933) juga mengatakan rumah tangga lebih memilih menabung daripada konsumsi karena preferensi likuiditas terutama pada periode deflasi. Hal ini juga disebut efek Keynes dalam literatur. Hicks (1937) menggabungkan hipotesis ini dengan preferensi likuiditas di pasar aset untuk mengeksplorasi model keseimbangan umum yang diberi nama IS-LM.

Hayek (1932, 1941) mengemukakan konsep tabungan paksa. Ia mengatakan bahwa tabungan sukarela mungkin digiring di beberapa bagian untuk menyebabkan investasi berlebihan, sehingga perekonomian harus memaksa sejumlah tabungan untuk tidak membeli barang-barang konsumsi tetapi berinvestasi untuk membentuk barang-barang produksi. Maksudnya, penghematan yang optimal sulit dilakukan dalam perekonomian pasar bebas, sehingga diperlukan konsep menabung paksa.

Pigou (1943) mengatakan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga (mengurangi tabungan) disebabkan oleh peningkatan keseimbangan kekayaan riil terutama pada periode deflasi, meskipun pendapatan saat ini tidak berubah. Hal ini disebut efek Pigou atau efek keseimbangan nyata dalam literatur. Efek ini berlawanan dengan efek Keynes.

Dusenberry (1949) mengajukan hipotesis pendapatan relatif. Ia mengatakan bahwa keputusan individu mengenai konsumsi dan tabungan lebih dipengaruhi oleh pendapatan relatif dibandingkan dengan orang lain dibandingkan dengan standar hidup abstrak. Dengan demikian seseorang lebih memperhatikan tingkat konsumsi relatifnya (efek demonstrasi). Dengan demikian distribusi pendapatan perekonomian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tabungan. Lebih lanjut, hipotesis tersebut memperkirakan bahwa konsumsi saat ini juga dipengaruhi oleh konsumsi sebelumnya, sehingga rumah tangga akan sulit mengurangi konsumsinya jika sudah tercapai.

Friedman (1957) menyajikan hipotesis pendapatan permanen. Ia mengatakan bahwa konsumsi saat ini ditentukan oleh pendapatan saat ini, tetapi oleh ekspektasi pendapatan jangka panjang atau seumur hidup. Oleh karena itu, ia menduga bahwa perubahan pendapatan sementara berdampak kecil terhadap belanja konsumen namun berdampak signifikan terhadap tabungan.

Ando dan Modigliani (1963) mengembangkan hipotesis siklus hidup. Mereka memfokuskan perbedaan waktu pendapatan dan konsumsi sepanjang hidup, kemudian menemukan bahwa rumah tangga membuat rencana konsumsi dan tabungan yang optimal untuk memperlancar konsumsi seumur hidup jika gaya hidup diasumsikan stabil. Mirip dengan hipotesis pendapatan permanen, perubahan pendapatan transisi mempunyai dampak yang signifikan terhadap tabungan tetapi berdampak kecil terhadap konsumsi saat ini. Lebih lanjut, salah satu dugaan penting adalah bahwa struktur umur rumah tangga atau negara mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tabungan.

Leland (1968) menyajikan hipotesis tabungan kehati-hatian. Ia menemukan bahwa individu memiliki motif menabung tambahan untuk melakukan perataan konsumsi sebagai respons terhadap ketidakpastian pendapatan masa depan, karena kurangnya kelengkapan pasar asuransi. Berdasarkan hipotesis ini, volatilitas pendapatan masa depan dan kelengkapan pasar asuransi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tabungan.

Banyak sarjana menunjukkan bahwa penghematan status merupakan faktor penting dalam ekonomi pasar. Kebahagiaan seseorang bergantung pada posisinya, atau statusnya dalam masyarakat, serta konsumsi absolut, pendapatan, atau kekayaannya. Ide ini dapat ditelusuri kembali ke Hume (1752a, b), Veblen (1899), Weber (1904), Easterlin (1974), Douglas dan Isherwood (1979), dan karya-karya terbaru seperti Cole, Mailath dan Postlewaite (1992) dan Zou (1994). Dikatakan bahwa masyarakat dengan preferensi status yang lebih kuat terhadap kekayaan, perekonomiannya memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi dan kemudian memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Hari ini kita diperkenalkan teori terbaru tentang menabung oleh Wan (2011). Ia menyajikan teori *Bubble Saving* untuk menjelaskan mengapa beberapa negara seperti Yunani dan AS kurang dalam menabung sementara beberapa negara seperti Tiongkok dan Jepang melakukan *oversave* selama *The Housing Bubble Era*. Ditemukan bahwa rumah tangga dengan motif menabung yang spekulatif memiliki tabungan kurang atau lebih tergantung pada tingkat distorsi kebijakan perumahan dan pasar keuangan. Hipotesis tabungan spekulatif yang pertama kali dikemukakan menyatakan bahwa kombinasi aksesibilitas pasar keuangan dan motif tabungan spekulatif akan menghasilkan tabungan optimal yang kurang, lebih, dan tidak diinginkan.

4.3 Teori Investasi dan Teori Investasi Keuangan

Teori umum Keynes memberikan peran sentral pada keputusan investasi dalam penentuan tingkat agregat permintaan efektif, yang pada gilirannya merupakan faktor utama yang menghasilkan tingkat keseimbangan lapangan kerja dan output. Sebagaimana dinyatakan dalam buku teks sarjana, investasi adalah variabel penggerak yang beroperasi melalui pengganda untuk menghasilkan total pendapatan. Besarnya pengganda dihitung secara mekanis sebagai kebalikan dari kecenderungan menabung marjinal, meskipun eksposisi yang lebih rumit dapat memperhitungkan kebocoran impor dan pajak. Oleh karena itu, peningkatan investasi menyebabkan pendapatan dan konsumsi meningkat hingga tabungan meningkat hingga mencapai tingkat investasi yang baru. Tingkat investasi merupakan fungsi dari efisiensi marjinal modal (pada dasarnya adalah potongan keuntungan di masa depan) dibandingkan dengan tingkat bunga pasar, yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang. Ketika efisiensi marjinal modal berada di atas tingkat bunga pasar, investasi dilakukan, meningkatkan pendapatan, output dan lapangan kerja melalui pengganda pengeluaran. Hal ini berlangsung hingga efisiensi marjinal modal turun, tingkat bunga naik, atau kombinasi keduanya menghilangkan kesenjangan tersebut. Begitu efisiensi marjinal modal sama dengan tingkat bunga, maka tidak ada keuntungan bagi investasi sehingga perekonomian kembali ke keseimbangan.

Meskipun penjelasan seperti itu dapat ditemukan dalam buku Keynes, tulisan ini tidak mampu menggambarkan teori investasi Keynes. Untuk benar-benar memahami teori Keynes, kita harus membaca Bab 17 pada buku Teori Umum Keynes merupakan sebuah penjelasan rumit yang biasanya dihindari oleh semua orang kecuali para pengikutnya yang paling serius. Dalam bab tersebut, keputusan investasi dimasukkan ke dalam teori preferensi likuiditas mengenai harga aset, atau dengan kata lain, teorinya tentang tingkat suku bunga sendiri. Ia berpendapat bahwa untuk setiap komoditas tahan lama kita mempunyai tingkat bunga tersendiri, yaitu tingkat bunga gandum, tingkat bunga tembaga, tingkat bunga perumahan, bahkan tingkat bunga pabrik baja sebesar minat (Keynes 1936:222-223). Masing-masing nilai tukar ini dapat dinyatakan dalam satuan uang, yang biasanya membawa nilai tukar terbesar, karena uang mempunyai sifat-sifat khusus dan khas (Keynes 1936:223; lihat juga Kregel

1997) Pengembalian yang diharapkan dari kepemilikan aset apa pun yang diukur dalam istilah moneter adalah q-c+l+a, dengan q adalah hasil yang diharapkan dari aset tersebut, c adalah biaya penyimpanan, l adalah likuiditas, dan a adalah apresiasi harga yang diharapkan (atau depresiasi). Pengembalian total digunakan untuk menghitung efisiensi marjinal untuk setiap aset, termasuk uang. Komposisi pengembalian bervariasi berdasarkan aset, dengan sebagian besar pengembalian aset tidak likuid seperti modal terdiri dari qc, sedangkan sebagian besar pengembalian aset likuid terdiri dari (dievaluasi secara subjektif) l. Yang terakhir, perubahan ekspektasi berdampak berbeda pada efisiensi marjinal berbagai jenis aset, tergantung pada komposisi pengembaliannya. Meningkatnya keyakinan mengenai kinerja ekonomi masa depan akan meningkatkan qs pada aset modal sekaligus menurunkan nilai subyektif yang diberikan pada posisi likuid (karenanya, l turun), sehingga efisiensi marjinal modal meningkat dibandingkan dengan aset yang memperoleh banyak keuntungan dari l. Dalam hal ini, aset modal akan diproduksi (investasi meningkat, menimbulkan dampak pengganda) dan seluruh harga aset akan disesuaikan. Oleh karena itu, ekspektasi terhadap masa depan berperan dalam menentukan tingkat keseimbangan output dan lapangan kerja.

Misalnya, jika pengusaha memperkirakan permintaan widget di masa depan akan lebih tinggi, mereka mungkin mengharapkan lebih banyak keuntungan di lini bisnis tersebut. Hal ini meningkatkan efisiensi marjinal mesin pembuat widget, dan jika efisiensi ini melebihi ekspektasi pengembalian semua aset lain yang dapat dimiliki, maka mereka akan memesan produksi mesin pembuat widget saat ini. Produksi mesin pembuat widget akan memberikan upah kepada pekerja dan pendapatan bagi perusahaan-perusahaan tersebut ketika mesin tersebut dijual. Pada gilirannya, pekerja akan membelanjakan pendapatannya, sehingga menimbulkan dampak "pengganda" terhadap permintaan agregat sehingga menghasilkan lebih banyak lapangan kerja. Sebagian dari pendapatan tambahan yang dihasilkan akan digunakan untuk membeli widget, memvalidasi ekspektasi yang mengarah pada produksi mesin pembuat widget. Tentu saja, juga akan terjadi peningkatan konsumsi terhadap jenis output lain, yang dapat meningkatkan ekspektasi keuntungan di lini bisnis lain, sehingga mendorong lebih banyak investasi pada jenis mesin lain. Logikanya, investasi, lapangan kerja, output, dan konsumsi dapat terus tumbuh melalui proses ini hingga tidak ada efisiensi marjinal dari jenis mesin apa pun yang melebihi pengembalian yang diharapkan dari aset likuid dan keuangan. Akhirnya, kita dapat melihat bahwa seluruh proses pertumbuhan dapat dibalik

jika tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset modal (q dikurangi c ditambah a, seperti dibahas di atas) turun atau jika tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset likuid (l yang dijelaskan di atas) naik.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa teori preferensi likuiditas terhadap harga aset terkait erat dengan teori pengganda dan teori permintaan efektif. Hanya jika efisiensi marjinal dari beberapa aset yang dapat diproduksi dengan menggunakan tenaga kerja (pabrik, peralatan modal, bangunan komersial dan perumahan, infrastruktur swasta) melebihi efisiensi marjinal uang maka investasi akan terjadi. Hal ini kemudian meningkatkan permintaan efektif melalui pengganda. Tingkat ekuilibrium baru dari permintaan efektif (dan juga lapangan kerja, pendapatan dan output) akan tercapai ketika semua tingkat suku bunga sama dengan standar yang ditetapkan oleh tingkat pengembalian uang.

Minsky percaya bahwa teori siklus investasi Keynes tidak lengkap karena teori tersebut tidak benar-benar menganalisis bagaimana investasi dibiayai ketika efisiensi marjinal suatu aset modal melebihi efisiensi marjinal uang. Tampaknya terdapat asumsi implisit dalam Teori Umum bahwa proyek investasi akan didanai. Meskipun Keynes membahas hal ini secara lebih rinci dalam beberapa publikasi setelah tahun 1936, sebagian besar upayanya ditujukan untuk menjelaskan mengapa tabungan tidak dapat menjadi sumber pendanaan. Oleh karena itu, kontribusi terpenting Minsky adalah menambahkan teori investasi keuangan ke dalam teori siklus investasi Keynes. Gambar 4.1 memberikan ilustrasi grafis teori Minsky. Dua landasan utama adalah sistem dua harga, dan risiko pemberi pinjaman dan peminjam. Mengikuti Keynes, Minsky membedakan antara sistem harga untuk output saat ini dan sistem harga aset. Harga keluaran saat ini dapat diambil sebagaimana ditentukan oleh biaya ditambah mark-up, yang ditetapkan pada tingkat yang akan menghasilkan keuntungan selama harga yang ditentukan dapat dipertahankan dengan penjualan yang memadai. Output saat ini mencakup barang dan jasa konsumsi, barang dan jasa investasi, ekspor, dan bahkan barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah.

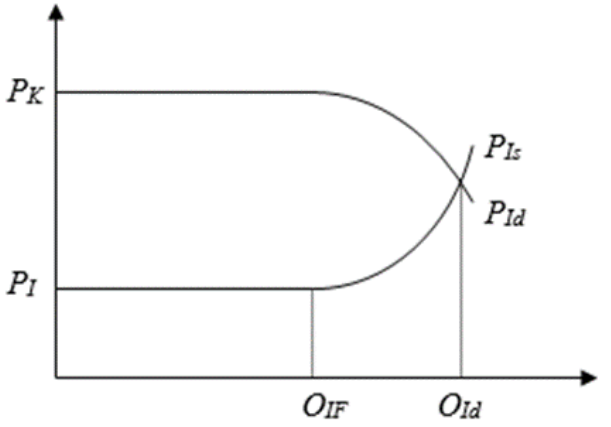

Gambar 4.1: Penentuan Tingkat Investasi (Keynes, 1936).

Dalam kasus barang investasi, harga output saat ini secara efektif merupakan harga pasokan modal yang cukup untuk mendorong pemasok menyediakan aset modal (PI) baru. Namun, analisis yang disederhanakan ini hanya dapat diterapkan pada pembelian modal yang dapat dibiayai dari dana internal (seperti pendapatan penjualan dari operasi yang sedang berjalan). Jika dana eksternal (pinjaman) diperlukan, maka harga pasokan modal juga mencakup biaya pendanaan eksplisit yang paling penting adalah tingkat bunga, namun juga semua biaya dan biaya lainnya yaitu, harga pasokan total (PIs) naik di atas harga pasokan modal. harga yang diatur oleh pemasok (PI) karena risiko pemberi pinjaman yang ditutupi oleh biaya keuangan dana pinjaman. Pada Gambar, hal ini ditunjukkan dengan kemiringan kurva PI yang naik ketika investasi diperkirakan memerlukan dana eksternal. Jumlah barang investasi yang diharapkan dapat dibeli dengan menggunakan dana internal yang diharapkan ditentukan oleh jarak dari asal ke OIF sedangkan dana eksternal sama dengan jarak dari OIF ke OId.

Terdapat sistem harga kedua untuk aset yang dapat dipertahankan sepanjang waktu. Aset mencakup aset modal, aset keuangan, dan uang pada dasarnya segala sesuatu yang dapat disimpan sepanjang waktu sebagai penyimpan kekayaan nominal. Kecuali uang (aset yang paling likuid), aset-aset ini diharapkan menghasilkan aliran pendapatan dan kemungkinan keuntungan modal. Di sini, Minsky mengikuti pembahasan Keynes dalam bukunya pada Bab 17 yang dijelaskan di atas. Hal yang penting adalah prospek aliran

pendapatan tidak dapat diketahui secara pasti sehingga bergantung pada ekspektasi subjektif.

Investasi dapat dilanjutkan hanya jika harga permintaan (disesuaikan dengan risiko peminjam) melebihi harga penawaran (disesuaikan dengan risiko pemberi pinjaman) aset modal. Karena harga-harga ini sudah termasuk margin keamanan, maka harga-harga tersebut dipengaruhi oleh ekspektasi mengenai hasil yang tidak dapat diketahui. Pada awal pemulihan dari resesi yang parah, margin menjadi besar karena ekspektasi yang pesimistis; seiring waktu, jika ekspansi menghasilkan keuntungan yang melebihi, proyeksi margin ini terbukti lebih besar dari yang diperlukan. Hal ini menyebabkan berkurangnya risiko yang dirasakan oleh peminjam dan risiko pemberi pinjaman, yang menghasilkan kurva PId dan PI yang lebih datar sehingga meningkatkan permintaan akan barang-barang investasi. Hal ini, pada gilirannya, berarti bahwa, dengan mempertimbangkan aliran dana internal yang diharapkan, para bankir dan pengusaha mengharapkan dan menerima proporsi pendanaan eksternal yang lebih besar dan investasi yang lebih besar. Dengan demikian, margin akan berkurang seiring dengan keberhasilan proyek secara umum.

4.4 Perspektif Keuntungan (Profit) dalam Teori Investasi

Minsky berargumen bahwa investasi terjadi saat ini hanya jika investasi diharapkan terjadi di masa depan karena investasi di masa depan akan menentukan keuntungan di masa depan (dalam model kerangka). Karena investasi saat ini menghasilkan keuntungan untuk memvalidasi keputusan yang diambil kemarin untuk berinvestasi, ekspektasi tentang besok memengaruhi kemampuan untuk memenuhi komitmen yang dibuat kemarin ketika mendanai aset modal yang ada. Meskipun hal ini mungkin terdengar rumit, hal ini berarti bahwa perusahaan perlu memperoleh keuntungan hari ini untuk memenuhi ekspektasi yang mereka miliki di masa lalu ketika membeli modal. Namun keuntungan saat in akan lebih rendah jika perusahaan tidak berinvestasi sekarang (mungkin karena mereka pesimis terhadap masa depan). Jadi untuk memvalidasi keputusan yang dibuat di masa lalu, kita memerlukan investasi saat ini yang pada gilirannya bergantung pada ekspektasi mengenai hari besok. Oleh karena itu, terdapat hubungan temporal yang kompleks dalam

pendekatan Minsky terhadap investasi yang dapat dengan mudah diganggu. Dengan menghubungkan hal ini dengan pendekatan dua harga yang dijelaskan di atas, Minsky memperjelas bahwa apa pun yang menurunkan profitabilitas yang diharapkan di masa depan dapat mendorong harga permintaan modal saat ini di bawah harga pasokan, mengurangi investasi dan keuntungan saat ini di bawah tingkat yang diperlukan untuk memvalidasi ekspektasi masa lalu. yang menjadi dasar harga permintaan ketika proyek modal sebelumnya dilaksanakan. Hal ini juga berarti bahwa *margins of safety* yang telah dimasukkan dalam risiko peminjam dan pemberi pinjaman terbukti tidak memadai, sehingga menyebabkan revisi margin keamanan yang diinginkan di masa mendatang. Ketika margin meningkat karena kekecewaan, harga permintaan modal turun di bawah harga pasokannya (yang telah disesuaikan dengan risiko pemberi pinjaman dan peminjam), yang menyebabkan berkurangnya investasi dan melalui pengganda (multiplier) yang menyebabkan output dan lapangan kerja tetap lebih rendah. Perekonomian bisa semakin terpuruk dan masuk ke dalam resesi yang semakin parah.

4.5 Hubungan Tabungan dan Investasi

Jika investasi ingin dilakukan dalam perekonomian ini, maka dengan tingkat output tertentu investor perlu memanfaatkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk konsumsi. Karena preferensi individu diasumsikan untuk konsumsi saat ini dibandingkan konsumsi yang ditangguhkan, hilangnya kepuasan yang tersirat dalam keputusan untuk tidak mengonsumsi akan memerlukan pembayaran kompensasi. Konsekuensinya, jumlah tabungan di luar pendapatan dijadikan sebagai fungsi peningkatan tingkat bunga, yang kemudian menjadi imbalan bagi mereka yang tidak melakukan pembelanjaan. Di sisi permintaan pasar modal, pengusaha diasumsikan akan mengambil lebih banyak dana untuk tujuan investasi jika semakin rendah biaya pinjaman, sehingga tingkat investasi yang dilakukan dijadikan fungsi penurunan tingkat bunga (lihat Gambar 4.2). Tingkat bunga ekuilibrium ditentukan oleh perpotongan dua jadwal berikutnya, dengan penghematan sama dengan pengeluaran investasi. Implikasi penting dari model ini adalah bahwa peningkatan kecenderungan untuk menabung tidak hanya akan menyebabkan peningkatan aliran dana ke pasar tetapi juga akan menghasilkan penurunan tingkat bunga, yang pada gilirannya akan menimbulkan kenaikan. untuk

meningkatkan pengeluaran investasi secukupnya untuk mengimbangi peningkatan tabungan. Oleh karena itu, perubahan bagian relatif tabungan dan konsumsi terhadap pendapatan akan tercermin dalam perubahan komposisi output yang mendukung barang-barang investasi.

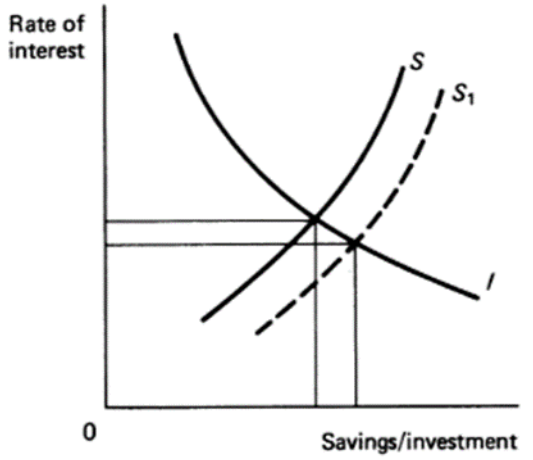

Gambar 4.2: Kurva Tabungan dan Investasi Sumber: Keynes (1936)

Bagi Keynes, pendekatan ini tidak dapat memberikan teori yang memadai baik mengenai tabungan dan investasi maupun mengenai tingkat bunga. Meskipun teori ini benar dalam memandang tabungan sama dengan investasi, teori ini gagal memperhitungkan pengaruh perubahan pendapatan terhadap tingkat tabungan dan pengaruh pengeluaran investasi terhadap tingkat pendapatan. Konsekuensinya, hal ini dapat mengimplikasikan bahwa tindakan menabung akan menimbulkan investasi baru dan bahwa investasi baru harus menunggu sebelum adanya tabungan.

Namun dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik dalam teori klasik, dengan memasukkan variabel moneter secara langsung ke dalam analisis. Dalam versi dana pinjaman ini, tabungan (penawaran dana = permintaan sekuritas) dimodifikasi demi kepentingan realisme yang lebih besar dengan memperhitungkan dampak penciptaan uang baru dan penimbunan saldo menganggur. Pasokan dana pinjaman ke pasar dapat dipengaruhi oleh kebijaksanaan moneter pemerintah pusat, atau oleh peralihan preferensi antara kepemilikan surat berharga dan uang oleh pelaku pasar modal (lihat Gambar 4.3).

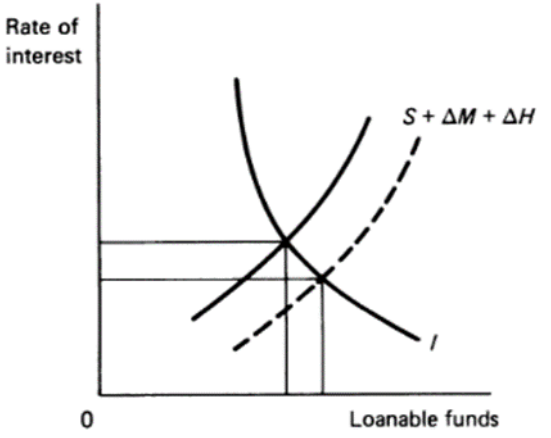

Gambar 4.3: *Loanable Funds* Sumber: Keynes (1936)

4.6 Peran Tabungan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tabungan menyediakan sumber daya untuk berinvestasi pada modal fisik, yang merupakan faktor penentu pertumbuhan yang penting. Baik model pertumbuhan ekonomi standar neoklasik oleh Solow (1956) maupun model pertumbuhan endogen berpendapat bahwa tabungan dan investasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan standar mendalilkan bahwa pada kondisi kondisi mapan, dinamika modal dalam bentuk per unit tenaga kerja efektif ditentukan oleh bagian konstan dari output atau pendapatan yang disimpan dan diinvestasikan. Model ini berargumentasi bahwa perubahan tingkat tabungan, dan perubahan akumulasi modal, serta perubahan jumlah pekerja hanya akan mempunyai efek tingkat, bukan efek pertumbuhan pendapatan atau output. Di sisi lain, model pertumbuhan endogen berpendapat bahwa output dapat tumbuh selama ada perubahan positif dalam persediaan modal. Oleh karena itu, peningkatan tabungan akan mempunyai efek pertumbuhan permanen melalui efek positifnya terhadap investasi dan akumulasi modal (Barro et al., 1995). Dengan berasumsi bahwa hanya sebagian kecil dari tabungan yang akan diinvestasikan dan sisanya akan

menguap sebagai biaya proses intermediasi keuangan, Pagano (1993) menunjukkan bahwa pembangunan keuangan merupakan faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi melalui tiga saluran: (1) tingkat tabungan, (2) tingkat pengetahuan atau teknologi, dan (3) efisiensi intermediasi keuangan. Beberapa model pertumbuhan endogen lainnya juga secara eksplisit memasukkan perkembangan keuangan, baik perkembangan sektor perbankan maupun perkembangan pasar saham, sebagai salah satu faktor penting yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Bentuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan keuangan dapat bersifat non-linier dan non-monotonik, yang berarti bahwa dampak positif dari perkembangan keuangan sejalan dengan tahap kematangan pasar keuangan (Deidda & Fattouh 2002). Baru-baru ini, Sahay et al. (2015) menunjukkan bahwa bentuk hubungan positif antara perkembangan keuangan dan pertumbuhan adalah berbentuk lonceng, yang menunjukkan bahwa pada titik tertentu biaya pengembangan keuangan lebih besar daripada manfaatnya. Pembangunan keuangan dapat mendorong perilaku pengambilan risiko yang mengarah pada volatilitas ekonomi dan keuangan yang lebih tinggi. Secara khusus, ketika kedalaman sektor keuangan meningkat, hal ini dapat menyebabkan hilangnya efisiensi dalam investasi, dalam hal misalokasi modal dan lemahnya kontrol perusahaan.

Kaitan positif antara tabungan, investasi, perkembangan keuangan dan pertumbuhan telah didukung oleh banyak studi empiris seperti yang dirangkum dalam Levine (2005), Ang (2008a), dan Arestis dkk. (2015). Misalnya, Jappelli dan Pagano (1994) menemukan bahwa kendala likuiditas pada rumah tangga memperkuat pengaruh pertumbuhan terhadap tabungan. Krieckhaus (2002) secara khusus menunjukkan bahwa mobilisasi tabungan untuk investasi dan peran pemerintah dalam proses mobilisasi merupakan faktor kunci yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya dengan korelasi tabungan-investasi, Feldstein dan Horioka (1980) menemukan bahwa tabungan domestik dan investasi domestik berkaitan erat bahkan dalam perekonomian yang terbuka terhadap aliran modal internasional. Dalam jangka panjang, tabungan harus sama dengan investasi, dan oleh karena itu tingkat tabungan dalam negeri pada akhirnya menentukan tingkat investasi. Attanasio et al. (2000) juga menunjukkan secara empiris bahwa tingkat tabungan yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan tingkat investasi, sedangkan tingkat investasi dan tingkat pertumbuhan saling terkait. Baru-baru ini, Di Iorio dan Fachin (2014) memberikan bukti adanya hubungan tabungan-investasi jangka panjang di 18 negara OECD selama periode 1970-2007. Secara umum, Levine

(2005) merangkum bahwa kontribusi positif pasar keuangan dan perantara keuangan terhadap keputusan dan pertumbuhan tabungan dan investasi dapat dijelaskan melalui fungsinya dalam pemanfaatan tabungan domestik, peningkatan informasi, mekanisme pemantauan yang efektif terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik, dan mekanisme pengurangan risiko dapat memfasilitasi pertukaran instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan modal dan menyediakan modal dan investasi modal yang produktif.

Bab 5

Pengantar Pasar Modal

5.1 Pendahuluan

Pengelolaan keuangan merupakan keahlian yang perlu dimiliki oleh setiap individu. Untuk dapat mengelola keuangan yang baik, maka individu perlu memiliki dan mengembangkan literasi keuangan. Tentunya, melalui literasi keuangan, individu dapat memahami makna uang, bagaimana cara untuk membuat perencanaan uang melalui penganggaran (Ouachani, Belhassine and Kammoun, 2020). Dalam proses penganggaran keuangan, individu dapat membagi uang mereka ke dalam beberapa pos seperti pengeluaran bulanan, simpanan dana darurat, simpanan bulanan, maupun investasi. Individu dapat menentukan proporsi dalam pembagian uang mereka ke dalam setiap kategori-kategori tersebut. Lebih lanjut lagi, dana simpanan yang dialokasikan dari pemasukan setiap bulan dapat disimpan dalam bentuk tabungan (Guthrie and Nicholls, 2015).

Seringkali banyak individu masih sering salah kaprah terkait dana simpanan yang ditabung dan investasi. Banyak individu yang menyimpulkan bahwa menabung adalah sama dengan berinvestasi, padahal baik tabungan dan investasi dalam berbagai hal merupakan dua hal yang berbeda. Maka dari itu, individu dapat mengalokasikan dana mereka kedalam bentuk tabungan maupun investasi (Goyal, Kumar and Xiao, 2021).

Individu dapat berinvestasi pada beberapa jenis instrumen investasi. Beberapa instrumen investasi yang paling populer seperti saham dan reksadana dapat ditemukan di dalam pasar modal (Fitriadi dan Marsoem, 2022; Kasingku, 2023). Untuk itu, bab ini akan membahas konsep pasar modal. Pembahasan akan dimulai dengan penjelasan terkait konsep umum investasi, lalu dilanjutkan dengan konsep pasar modal, dan instrumen-instrumen investasi dalam pasar modal akan dibahas pada bagian akhir.

5.2 Investasi dan Pasar Modal

Pada bagian pendahuluan telah dibahas bahwa terdapat perbedaan antara tabungan dan investasi. Banyak pihak yang masih menganggap bahwa tabungan merupakan sebuah bentuk investasi. Lalu, apakah tabungan tidak dapat menjadi suatu investasi? Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya dan tidak. Untuk lebih memahami, perhatikan ilustrasi berikut.

Bapak Alfa menaruh uang sebesar Rp. 100.000.000 ke dalam tabungan bank dengan bunga tahunan sebesar 1%. Artinya, pada akhir tahun nilai nominal dari uang Bapak Alfa adalah sebesar Rp. 101.000.000 yang didapat dari Rp. 100.000.000 nilai pokok ditambah Rp. 1.000.000 (1% x 100.000.000) yang merupakan bunga tabungan. Mungkin sampai pada tahap ini kita berpikir bahwa ini merupakan investasi karena ada penambahan nilai nominal uang, tapi sebenarnya ini bukan merupakan investasi. Memang pada satu sisi nilai nominal uang Bapak Alfa bertambah, namun penambahan nilai nominal uang harus dibandingkan dengan tingkat kenaikan harga rata-rata pada tahun tersebut juga (Gitman and Zutter, 2015).

Tingkat kenaikan harga rata-rata pada suatu periode disebut dengan inflasi (Mankiw, 2015). Jika terjadi inflasi, maka sejumlah uang yang kita miliki pada sebelum terjadi inflasi tidak akan mampu membeli jumlah barang yang sama pada periode setelah terjadi inflasi. Contohnya, Anda memiliki uang sebesar Rp. 10.000 yang dapat membeli Tomat sebanyak 1 Kg sebelum terjadi kenaikan harga. Pada beberapa saat kemudian ketika terjadi inflasi dan harga tomat menjadi Rp. 12.500 per Kg, maka sebelumnya dengan uang Rp. 10.000 dapat membeli 1 Kg, pada periode setelah terjadi kenaikan harga, dengan uang Rp. 10,000 tidak lagi mampu membeli Tomat sebanyak 1 Kg melainkan hanya 0,8 Kg. Artinya, inflasi akan membuat daya beli dari uang menurun.

Saat ini, mari kita terapkan konsep inflasi pada ilustrasi sebelumnya. Memang terjadi peningkatan nilai nominal uang sebesar Rp. 1.000.000 sebagai imbal hasil dari tabungan, namun pada saat yang sama terjadi inflasi sebesar 3%. Artinya, pada saat nilai nominal uang Bapak Alfa meningkat sebesar 1% atau Rp. 1.000.000, maka pada saat yang sama terjadi penurunan daya beli uang sebesar 3% atau Rp. 3.000.000 (3% x Rp. 100.000.000). Kesimpulannya bahwa tabungan Bapak Alfa mengalami kenaikan nominal uang sebesar 1% namun daya beli dari uang tersebut menurun 3% pada saat yang sama. Maka, tabungan bapak Alfa bukan merupakan suatu investasi.

Ilustrasi selanjutnya tentang Bapak Omega yang menaruh uang Rp. 100.000.000 pada tabungan jenis deposito dengan bunga sebesar 5% setahun. Uang Bapak Omega pada akhir tahun akan menjadi Rp. 105.000.000 yang merupakan hasil penambahan dari Rp. 100.000.000 + Rp. 5.000.000 (5% x Rp. 100.000.000) yang merupakan gabungan dari deposito. Jika pada tahun yang sama terjadi inflasi sebesar 3%, maka terjadi penurunan daya beli uang sebesar 3%. Namun, jika dibandingkan dengan imbal hasil yang didapatkan, maka tingkat inflasi 3% lebih rendah dibandingkan imbal hasil yang didapatkan yaitu sebesar 5%. Artinya walaupun daya beli dari uang menurun 3%, tapi kenaikan nominal uang adalah 5%. Ilustrasi kedua merupakan contoh dari investasi.

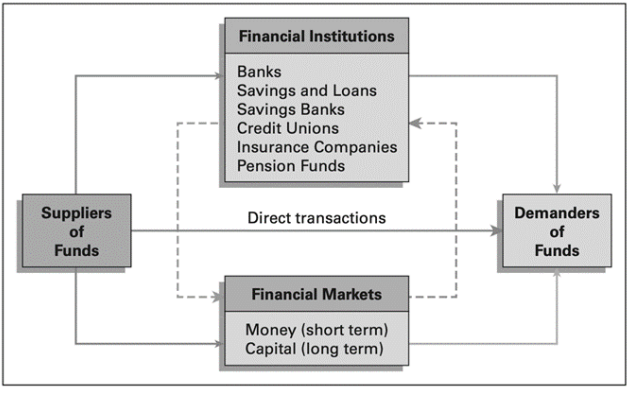

Gambar 5.1: Proses Investasi (Smart dan Zutter, 2020).

Melalui dua ilustrasi tersebut, investasi dapat diartikan sebagai komitmen sumber daya saat ini untuk memperoleh utilitas yang lebih tinggi dibanding komitmen awal. Selain itu investasi juga dapat diartikan sebagai penundaan

konsumsi saat ini agar dapat memiliki konsumsi yang lebih besar dibanding konsumsi saat ini. Artinya, jika individu berkomitmen untuk mengeluarkan dana pada saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat yang lebih besar pada masa yang akan datang, maka individu sedang berinvestasi (Gitman dan Zutter, 2015; Reilly, Brown dan Leeds, 2019; Smart dan Zutter, 2020). Proses investasi dapat dilihat pada gambar 5.1

Gambar 5.1 menjelaskan bahwa terdapat beberapa pihak terkait dengan proses investasi. Dua pihak pertama adalah pihak penyedia dana dan pihak yang membutuhkan dana. Kedua pihak tersebut bisa berasal dari rumah tangga, pemerintah, maupun bisnis. Pihak yang berinvestasi juga dapat dikategorikan menjadi investor institusi maupun investor individu. Kedua pihak dapat bertemu melalui tiga mekanisme yaitu melalui institusi keuangan seperti perbankan, pasar keuangan seperti pasar uang dan pasar modal, dan melalui transaksi secara langsung. Pihak institusi keuangan berperan sebagai perantara antara pihak penyedia dana dan yang membutuhkan dana. Artinya, penyedia dana perlu menempatkan dana ke perantara tersebut untuk selanjutnya dapat disalurkan oleh perantara ke pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya, investor dapat bertransaksi melalui pasar keuangan. Pasar uang merupakan sarana yang disediakan untuk investor dapat berinvestasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun seperti investasi pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pasar modal merupakan tempat untuk investor dapat berinvestasi jangka panjang (Smart and Zutter, 2020). Bab ini akan berfokus pada penjelasan terkait investasi di pasar modal.

5.3 Struktur Pasar Modal

Pasar modal merupakan tempat investor berinvestasi surat-surat berharga (efek) secara jangka panjang. Setiap negara tentu memiliki struktur dan mekanisme pasar modal yang berbeda-beda yang diatur oleh pihak regulator. Bagian ini akan menjelaskan struktur pasar modal yang ada di Indonesia.

Struktur pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal (The Indonesia Capital Market Institute, 2016). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan pihak regulator pasar modal. Terdapat tiga Self-Regulating Organization (SRO) yang sebagai penyelenggara kegiatan pasar modal di Indonesia (Bursa Efek Indonesia

(BEI/IDX) merupakan tempat investor bertransaksi terkait investasi. Lembaga Kliring dan Penjaminan merupakan pihak yang memastikan bahwa hak dan kewajiban efek dan dana dari pembeli dan penjual terselesaikan. Pihak yang terakhir yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berfungsi untuk menyimpan efek dari transaksi pasar modal (Kemu, 2016).

Pihak-pihak selanjutnya yang ada dalam pasar modal adalah sebagai berikut. Emiten merupakan istilah bagi perusahaan yang telah menjual sebagian kepemilikannya ke publik dalam bentuk saham. Selanjutnya, perusahaan efek memiliki dua peran. Peran pertama adalah sebagai penjamin pelaksana efek (underwriter) yang bertugas dalam menyediakan layanan untuk perusahaan yang akan mulai menjual sebagian kepemilikannya ke publik Peran yang kedua adalah sebagai perantara pedagang efek atau broker yang bertugas sebagai penghubung antara investor individu maupun institusi ke pasar modal untuk transaksi pembelian maupun penjualan efek. Selain itu, terdapat pihak manajer investasi yang bertugas untuk mengelola kontrak investasi kolektif seperti reksadana. Untuk kelancaran transaksi investasi dalam pasar modal, maka dibutuhkan pihak lembaga penunjang; profesi penunjang yang merupakan pihak yang melakukan proses penunjang dalam pasar modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris maupun profesi lainnya sesuai dengan peraturan; dan investor itu sendiri (Kemu, 2016).

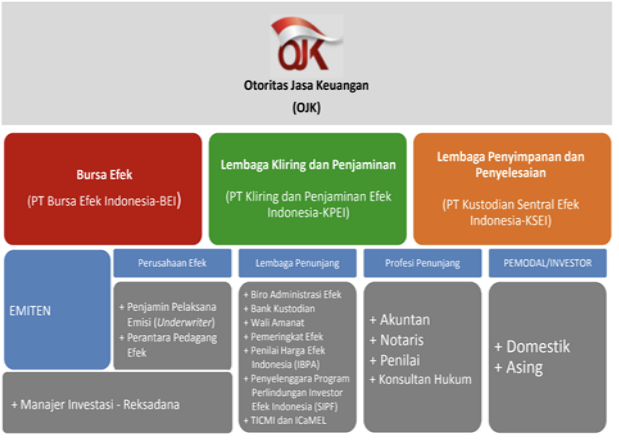

Gambar 5.2: Struktur Pasar Modal di Indonesia (The Indonesia Capital Market Institute, 2016)

Terdapat beberapa pihak yang berperan sebagai lembaga penunjang seperti biro administrasi efek, bank kustodian, wali amanat, pemeringkat efek, dan pihak-pihak lainnya seperti yang dapat dilihat pada gambar 5.2. Pihak biro administrasi efek bertugas untuk proses administrasi efek yang dibeli investor agar efek tersebut dapat menjadi atas nama pembeli tersebut. Pihak selanjutnya adalah bank kustodian yang berperan sebagai tempat efek dititip secara aman, untuk proses pembukuan efek, mengamankan pemindahan efek, dan menagih dividen, bunga surat utang ataupun segala hak lain yang berkaitan dengan efek yang dititipkan. Wali amanat bertugas untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Selanjutnya, pemeringkat efek merupakan lembaga yang melakukan penilaian kemampuan untuk membayar kembali surat utang. Penilai harga efek merupakan pihak yang bertugas untuk menilai dan menetapkan harga pasar wajar harian dari seluruh investasi berbentuk utang dan efek lainnya yang diperdagangkan pada pasar sekunder. Selain itu, terdapat lembaga perlindungan dana yaitu Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) yang bertugas untuk melindungi pemodal di pasar modal Indonesia. Lembaga terakhir yang ada dalam lembaga penunjang pasar modal adalah The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) yang bertugas untuk sebagai pusat referensi dan edukasi pasar modal Indonesia (The Indonesia Capital Market Institute, 2016).

Investor yang bertransaksi dalam pasar modal di Indonesia dapat memilih beberapa jenis instrumen investasi yang ada. Terdapat beberapa jenis investasi yang ada dalam pasar modal seperti saham, obligasi, sukuk, reksadana, ETF, dan instrumen investasi lainnya. Bagian selanjutnya akan membahas beberapa instrumen investasi yang paling populer seperti saham dan obligasi (Faizah dan Dwiningwarni, 2024).

5.4 Saham

Saham merupakan salah satu instrumen yang paling banyak diminati dalam pasar modal karena daya tarik yang ditawarkan oleh instrumen investasi tersebut. Saham salah satu bentuk surat berharga dengan bentuk ekuitas. Artinya, saham merupakan bukti kepemilikan dari perusahaan (Kasingku, 2023). Jika individu membeli saham, maka individu tersebut menjadi pemilik perusahaan sesuai dengan porsi yang dimiliki. Sebagai ilustrasi, Perusahaan menerbitkan 1.000.000 lembar saham baru yang merepresentasikan 20%

kepemilikan, kemudian saham tersebut dijual ke publik. Artinya, jika ada yang membeli semua lembar saham yang beredar di publik, maka pembeli tersebut berhak menjadi pemilik dari perusahaan dengan porsi kepemilikan sebesar 20%. Individu yang memiliki perusahaan berhak atas pembagian hasil usaha dari perusahaan (Sihono, 2024). Namun, hak atas pembagian hasil tersebut hanya dapat dibagikan ketika perusahaan telah melunaskan segala kewajiban utang yang dimiliki oleh perusahaan (Smart dan Zutter, 2020).

Gambar 5.3: Tren Harga IHSG (Yahoo Finance, 2024)

Saham menawarkan imbal hasil yang tinggi bagi investor yang berinvestasi dalam instrumen ini. Gambar 5.3 memaparkan tren harga saham gabungan yang ada di Indonesia sejak tahun 1997. Tren harga yang positif dalam jangka panjang membuktikan bahwa investasi dalam instrumen investasi saham memberikan imbal hasil yang tinggi. Selanjutnya, Imbal hasil dari saham terbagi kedalam dua bagian yaitu imbal hasil dalam bentuk dividen dan capital gain. Dividen merupakan bentuk pembagian hasil dari usaha perusahaan kepada pemilik sesuai dengan porsi kepemilikan saham investor. Contohnya, Bapak Omega memiliki 10% kepemilikan pada sebuah perusahaan. Setelah selesai tahun berjalan, perusahaan tersebut memutuskan untuk membayar Rp. 10 Miliar dividen kepada pemilik perusahaan. Maka, Bapak Omega berhak untuk mendapatkan dividen sejumlah Rp. 1 Miliar (10% x Rp. 10 Miliar). Pembagian dividen secara tunai merupakan tipe dividen yang paling umum dilakukan oleh perusahaan. Selain dalam bentuk tunai, perusahaan dapat membagi dividen dalam bentuk pemberian tambahan jumlah lembar saham kepada pemilik sesuai dengan porsi kepemilikan. Dividen yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik seringkali lebih kecil jumlahnya dibanding imbal hasil dalam bentuk bunga yang ditawarkan oleh obligasi. Maka, investor

biasanya mendapatkan keuntungan terbesar dari capital gain (Sriyono, Lesta dan Ahrorov, 2023).

Bentuk imbal hasil yang kedua selain dividen adalah capital gain. Imbal hasil tersebut merupakan bentuk kenaikan nilai investasi. Sebagai ilustrasi, pada awal tahun Ibu Teta membeli saham sebuah perusahaan dengan harga Rp. 1.000 per satu lembar saham. Pada akhir tahun, harga saham dari perusahaan yang dibeli oleh Ibu Teta naik menjadi Rp. 1.250. Imbal hasil yang didapatkan oleh Ibu Teta adalah sebesar Rp. 250 (Rp. 1.250-1.000) per satu lembar saham. Seringkali imbal hasil capital gain dibuat dalam bentuk persentase. Artinya, Ibu Teta menikmati imbal hasil sebesar 25% ((Rp. 1.250 - Rp. 1.000) /Rp. 1.000). Imbal hasil dalam bentuk capital gain merupakan keuntungan yang lebih besar dibanding keuntungan yang didapatkan melalui dividen. Total imbal hasil dari investasi saham dapat diperoleh melalui penambahan imbal hasil dari dividen dan imbal hasil dari capital gain (Smart and Zutter, 2020).

5.5 Obligasi

Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Sederhananya, obligasi merupakan instrumen investasi dalam bentuk utang. Pihak yang membutuhkan dana mengeluarkan surat berharga berbentuk utang untuk memperoleh pinjaman dari publik. Tentunya, seperti halnya pinjaman yang diberikan oleh bank, obligasi menawarkan bunga untuk para investor (Faizah dan Dwiningwarni, 2024). Sebagai ilustrasi, PT. Gamma mengeluarkan surat obligasi untuk mendapatkan dana sebesar Rp. 10 Miliar dengan bunga 6% setiap tahun, dengan minimal pembelian atau penempatan dana sebesar Rp. 10.000.000, dan jatuh tempo untuk obligasi tersebut adalah 20. tahun. Jadi, jika ada investor yang berminat untuk meminjamkan uang kepada PT. Gamma, maka investor akan memperoleh pendapatan bunga sebesar 6% setiap tahun sampai jatuh tempo. Contohnya, jika Bapak Alfa berinvestasi sebesar Rp. 10.000.000 pada obligasi tersebut, maka Bapak Alfa akan memperoleh pendapatan tetap sebesar 6% atau Rp. 600.000 setiap tahun selama 20 tahun. Pada akhir tahun yang ke 20, Bapak Alfa akan mendapatkan pembayaran bunga yang terakhir beserta nilai pokok yang dipinjamkan di awal.

Melalui ilustrasi sebelumnya, kita dapat memahami salah satu yang membuat investasi dalam obligasi menjadi menarik, yaitu obligasi menawarkan bunga

yang tetap selama periode yang telah ditentukan, dan pada akhir periode nilai pinjaman awal akan dibayarkan kembali. Maka dari itu tingkat pengembalian atau imbal hasil melalui investasi obligasi dapat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang ditawarkan, jangka waktu (maturity), dan nilai investasi.

Tentunya, motivasi utama Investor yang berinvestasi dalam obligasi adalah untuk memperoleh imbal hasil dari investasi yang dilakukan. Seperti saham, investasi melalui obligasi akan memberikan dua jenis imbal hasil yaitu imbal hasil pendapatan dan imbal hasil dalam bentuk capital gain. Imbal hasil dalam bentuk pendapatan telah dijelaskan pada ilustrasi sebelumnya. Investor dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga setiap tahun atau setiap periode yang telah ditentukan dalam obligasi. Sebelum membahas imbal hasil yang kedua, capital gain, kita perlu memahami apa yang memengaruhi nilai obligasi.

Obligasi sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Nilai obligasi berbanding terbalik dengan suku bunga. Artinya, jika suku bunga naik, maka nilai obligasi turun, dan sebaliknya. Untuk lebih memahami konsep tersebut, perhatikan ilustrasi berikut. PT. Makmur menerbitkan obligasi 20 tahun sebesar Rp. 10 Miliar bunga sebesar 5%. Obligasi tersebut dipesan oleh banyak investor sehingga kebutuhan dana tersebut dapat dicapai. Pada beberapa waktu selanjutnya, suku bunga pasar naik menjadi 7%. Kenaikan suku bunga tersebut akan membuat obligasi sebelumnya dengan tingkat bunga 5% menjadi tidak menarik karena investor dapat membeli obligasi yang baru yang memberikan bunga sebesar 7%. Akibatnya, nilai dari obligasi dengan bunga 5% mengalami penurunan karena menjadi tidak menarik dibandingkan dengan bunga yang ditawarkan oleh pasar yaitu 7%. Investor yang telah membeli obligasi dapat menjual kembali obligasi ke investor yang lain. Artinya, pembayaran bunga dan pembayaran nilai pokok akan dibayarkan ke investor yang lain tersebut. Jika nilai dari obligasi turun, maka obligasi tersebut tidak lagi akan dijual sesuai nilai awalnya melainkan akan didiskon. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bunga pasar turun menjadi 3%, maka obligasi dengan tingkat bunga 5% menjadi menarik, sehingga nilai obligasi akan naik. Investor dapat menjual obligasi tersebut ke investor lainnya dengan harga premium. Hal ini juga dapat terjadi ketika perusahaan pertama kali menerbitkan obligasi. Jika bunga obligasi lebih kecil dari bunga pasar, maka perusahaan akan mendiskon harga obligasi, jika bunga obligasi lebih tinggi dari bunga pasar, maka perusahaan akan menjual obligasi dengan harga premium. Investor dapat memperoleh capital gain dalam obligasi ketika terdapat selisih harga beli dan

jual dari obligasi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan antara harga beli dan jual dapat disebabkan oleh perubahan suku bunga (Smart dan Zutter, 2020).

Terdapat beberapa perbedaan antara saham dan obligasi. Saham merupakan efek berbentuk ekuitas sedangkan obligasi merupakan efek berbentuk utang. Obligasi memiliki tanggal jatuh tempo sedangkan investor dapat memiliki saham selama mungkin sesuai keinginan investor. Saham memberikan dividen sebagai bentuk pendapatan sedangkan obligasi memberikan bunga. Bunga yang didapat dari obligasi bersifat tetap sedangkan dividen berubah-ubah. Maka dari itu, obligasi sering disebut efek dengan pendapatan tetap. Disisi lain, saham memiliki tingkat risiko yang lebih besar dibanding obligasi karena tingginya tingkat volatilitas. Risiko terbesar obligasi adalah perubahan suku bunga dan kemampuan membayar kembali bunga dan pokok oleh perusahaan. Maka dari itu, obligasi sering menjadi bagian dalam portofolio investasi individu yang berfungsi sebagai penyeimbang portfolio karena keuntungan tetap yang ditawarkan (Smart dan Zutter, 2020).

Bab 6

Kredit dan Manajemen Utang

6.1 Pengenalan tentang Kredit dan Manajemen Utang

Kredit merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk meminjam sejumlah uang atau aset dengan kesepakatan akan mengembalikan jumlah tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan tambahan biaya atau bunga. Kredit juga dapat menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi suatu negara (Utari, Arimurti dan Kurniati, 2012). Dengan adanya kredit, individu atau perusahaan dapat memperoleh tambahan modal untuk bisa mengembangkan usaha, jika usaha semakin berkembang maka kapasitas produksi dapat meningkat, dan tentunya pendapatan juga dapat meningkat (Siamwalla, 1990). Selain itu kredit juga dapat meningkatkan daya beli konsumen. Mian dan Sufi (2018) menjelaskan bahwa ketersediaan fasilitas kredit dapat mendorong konsumen untuk meningkatkan belanja mereka, hal ini tentunya dapat menyebabkan perputaran uang di masyarakat akan terus meningkat yang tentunya juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bagi perusahaan perbankan, pemberian kredit kepada debitur merupakan salah sumber pendapatan, karena bank akan mendapatkan bunga dari pemberian pinjaman serta bank akan mengenakan biaya jasa dan

administrasi. Selanjutnya dalam dalam perdagangan internasional kredit dagang atau kredit yang diberikan kepada importir atau eksportir dapat memfasilitasi perdagangan lintas negara, dan tentunya hal ini membantu serta memperlancar arus barang dan meningkatkan perdagangan internasional.

Namun demikian, manajemen utang merupakan proses yang melibatkan pengelolaan dan pengendalian utang yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam konteks bisnis, utang dapat menjadi sumber pendanaan yang dapat mendukung operasional serta pertumbuhan perusahaan jika dikelola dengan baik. Tapi manajemen utang yang buruk dapat menyebabkan beban keuangan yang berlebihan dan risiko likuiditas yang tinggi (Pandeirot dan Sumanti, 2021). Ketika utang terus bertambah, maka risiko bagi perusahaan juga terus bertambah, karena adanya beban bunga yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah pinjaman. Dengan adanya manajemen utang yang baik, perusahaan dapat meminimalkan biaya modal dan risiko keuangan yang dapat timbul dari penggunaan utang (Gitman, Zutter & Chad, 2014).

Manajemen utang juga mencakup pemantau serta pengelolaan utang yang ada, termasuk melakukan pembayaran bunga dan pokok tepat pada waktunya. Manajemen utang juga berkaitan dengan reputasi perusahaan di mata kreditur dan investor. Perusahaan yang dapat melunasi hutang dan membayar bunga tepat waktu akan cenderung lebih dipercaya oleh kreditur dan investor sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan tambahan fasilitas pinjaman jika diperlukan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki manajemen utang yang kurang baik dapat mengalami penurunan kepercayaan dari pihak kreditur dan investor yang tentunya dapat berdampak negatif pada citra dan kondisi keuangan perusahaan.

6.2 Konsep Dasar Kredit

Konsep dasar kredit tentunya melibatkan pemberi pinjaman, peminjam serta kontrak pinjaman. Pemberi pinjaman adalah entitas atau individu yang memiliki surplus sehingga dapat memberikan dana atau aset kepada peminjam, sedangkan peminjam adalah entitas atau individu defisit sehingga menerima dana atau aset tersebut dengan kesepakatan untuk mengembalikan jumlah tersebut dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Selanjutnya kontrak pinjaman mengatur persyaratan pinjaman, termasuk jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu kredit serta kondisi lainnya seperti jaminan apa

yang dijaminkan dan lain sebagainya. Peminjam dan pemberi pinjaman wajib untuk mematuhi hal-hal yang telah disepakati bersama yang telah dituangkan dalam kontrak pinjaman tersebut. Dalam kontrak pinjaman juga mencantumkan hal-hal yang mengatur apa yang akan terjadi jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran bunga atau pelunasan pinjaman.

Selanjutnya, Brigham dan Houston (2019) menjelaskan bahwa bunga merupakan biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan dana atau aset tersebut. Tingkat bunga dapat bervariasi tergantung pada risiko kredit peminjam, kondisi pasar serta kebijakan moneter yang berlaku. Selanjutnya jangka waktu kredit merupakan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga yang telah disepakati.

Dalam pemberian kredit ada konsep 5C yang dikenal untuk menganalisis dan memutuskan apakah kredit yang diajukan hendak diterima atau ditolak. 5C itu adalah *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions* (Gitman, Zutter & Chad, 2014).

6.2.1 Character

Karakter merupakan pemeriksaan yang paling awal dan penting dalam memutuskan apakah kredit yang diajukan akan diterima atau tidak. Penilaian ini termasuk melihat reputasi calon debitur dalam membayar tagihan bunga dan pokok tepat pada waktunya. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan BI checking kepada calon debitur. Lembaga keuangan yang hendak memberi pinjaman bisa mendapatkan data calon debitur melalui Bank Indonesia atas persetujuan calon debitur. Pada hasil BI checking dapat terlihat berapa banyak pinjaman calon debitur, terlihat juga kolektibilitas dari calon debitur, kapan pinjaman di lembaga keuangan lain dimulai dan dilunasi dan di mana saja pinjaman dari calon debitur. Atau dengan kata lain melalui BI Checking dapat terlihat rekam jejak pinjaman dari calon debitur sebelumnya. Jika calon debitur memiliki reputasi yang kurang baik dalam pembayaran bunga dan pokok maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Bank atau lembaga keuangan dalam keputusan pemberian kredit.

6.2.2 *Capacity* (Kemampuan)

Selanjutnya kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman dapat dianalisis melalui laporan keuangan yang diberikan kepada pemberi pinjaman seperti bank atau Lembaga keuangan. Umumnya pemberi pinjaman akan menganalisa pendapatan dari calon debitur, biaya serta beban yang harus dibayar, serta menghitung kemampuan bayar dari calon debitur. Laporan keuangan akan di cocokan dengan mutasi rekening koran dari calon debitur apakah sesuai atau tercermin dengan mutasi kredit yang ada di rekening koran atau tidak. Lembaga keuangan biasanya akan mensyaratkan laporan keuangan minimal 3 tahun atau slip gaji bagi nasabah perorangan serta rekening koran minimal 6 bulan.

6.2.3 *Capital* (Modal)

Capital atau modal yang dimaksud disini adalah kekayaan bersih dari peminjam. Pemberi pinjaman akan menganalisa seberapa besar modal yang dimiliki peminjam sebagai indikator kestabilan keuangannya. Jika suatu usaha dijalankan dengan lebih banyak modal pribadi maka pengusaha akan berusaha untuk dengan semaksimal mungkin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, karena pengusaha tersebut memiliki beban moril terhadap modal yang telah ia investasikan untuk bisnis tersebut. Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi pemberi pinjaman untuk memberikan kredit kepada calon debitur yang diketahui dengan baik memiliki modal yang kuat.

6.2.4 *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang biasanya diminta oleh lembaga keuangan adalah aktiva tetap atau aktiva lancar seperti tanah, bangunan atau deposito. Sedangkan jaminan tambahan dapat berupa persediaan barang dagangan, piutang, kendaraan dan lain sebagainya. Umumnya lembaga keuangan akan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap jaminan hendak yang diberikan, dengan menghitung prediksi nilai pasar jaminan pada saat mengajukan pinjaman. Umumnya nilai pinjaman yang diberikan tidak lebih besar dari 80 persen nilai jaminan. Namun pada beberapa situasi atau bank tertentu kredit yang diberikan dapat juga melewati 80 persen nilai jaminan. Beberapa jaminan yang dihindari oleh lembaga keuangan adalah tanah di dekat kuburan, jaminan dekat dengan saluran udara tegangan ekstra tinggi, jaminan yang tidak memiliki jalan akses masuk atau jaminan yang dekat dengan tempat pembuangan sampah akhir. Namun ada juga jenis jaminan yang diprioritaskan oleh lembaga keuangan

seperti rumah tinggal atau tempat usaha, jaminan tersebut dapat dikatakan memiliki tanggung jawab moral, karena tentunya pemohon kredit tidak menginginkan bahwa rumah tinggal dan tempat usahanya disita, sehingga peminjam akan berusaha untuk selalu melunasi pembayaran bunga dan pokok tepat pada waktunya.

6.2.5 *Conditions* (kondisi)

Kondisi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang mungkin saja dapat memengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya. Seperti kondisi ekonomi, industri, faktor politik, alam dan lain sebagainya.

6.3 Jenis-jenis kredit

Bagian ini akan membahas jenis-jenis kredit yang ada seperti: kredit konsumen, kredit bisnis yang terdiri dari kredit rekening koran, kredit berjangka dan kredit jangka panjang atau sering disebut juga kredit angsuran berjangka.

6.3.1 Kredit Konsumen

Kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti belanja barang konsumsi, perbaikan rumah, pendidikan atau liburan. Tujuan dari kredit ini untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk bisnis. Kredit konsumen biasanya memiliki jangka waktu yang relatif pendek, biasanya kurang dari lima tahun serta bunga yang dikenakan pada kredit konsumen cenderung lebih tinggi dari pada bunga yang dikenakan pada kredit bisnis atau yang lainnya.

Salah satu bentuk kredit konsumen yang umum digunakan adalah kartu kredit. Ginting, Siburian, Syahfitri & Hasyim (2023) menjelaskan bahwa pemegang kartu kredit dapat menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembelian barang-barang konsumsi, pembelian tiket, pemesanan hotel, membeli barang elektronik dan lain sebagainya dengan meminjam dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Pengguna kartu kredit atau peminjam akan mengembalikan pinjaman beserta bunga sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh bank. Pemberi pinjaman atau bank akan mengirimkan tagihan kartu kredit kepada pengguna kartu kredit setiap tanggal cetak tagihan. Pada

tagihan tersebut akan tercantum berapa jumlah pinjaman, tanggal ketika menggunakan fasilitas kredit tersebut, biaya bunga atau biaya administrasi jika ada, serta tanggal jatuh tempo pembayaran.

Selain kartu kredit, kredit konsumen juga dapat diberikan dalam bentuk pinjaman pribadi kepada individu tanpa agunan. Pinjaman pribadi dalam bentuk tunai ini biasanya digunakan untuk keperluan mendesak atau membeli barang konsumsi yang besar, seperti mobil atau peralatan rumah tangga.

Kredit konsumen berguna untuk memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari atau untuk membiayai pembelian besar yang tidak dapat segera dibayar tunai. Namun, kredit konsumen haruslah digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab agar tidak terjebak dalam hutang yang berlebihan. Dengan menggunakan kredit konsumen secara bijaksana, individu dapat memanfaatkan dana tambahan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa mengorbankan stabilitas keuangan mereka.

6.3.2 Kredit Bisnis

Kredit bisnis adalah bentuk kredit yang diberikan kepada perusahaan atau usaha kecil menengah untuk mendukung kebutuhan operasional serta pengembangan bisnis. Biasanya pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau individu dengan tujuan bisnis ini digunakan untuk pembelian barang dagangan, ekspansi usaha, pengembangan produk atau pengeluaran operasional.

Salah satu bentuk kredit bisnis yang umum diberikan oleh pemberi pinjaman atau bank adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja individu atau perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, biaya overhead, atau pembelian barang dagangan. Fasilitas kredit modal kerja digunakan oleh perusahaan untuk menjaga likuiditas perusahaan serta untuk kelancaran operasionalnya (Nursidin, 2023).

Perusahaan dagang biasanya memiliki piutang di mana perusahaan memperbolehkan konsumennya untuk mengambil barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian. Disisi lain, barang dagangan yang dibeli tunai maupun kredit dari pemasok biasanya tidak langsung terjual atau disimpan digudang. Pinjaman modal kerja yang diberikan oleh bank akan digunakan untuk membiayai selisih dari hutang dagang dikurangi dengan piutang dagang dan persediaan barang dagangan perusahaan.

1. Kredit Rekening Koran
   Kredit modal kerja biasanya diberikan dalam bentuk kredit rekening koran ataupun kredit berjangka. Kredit rekening koran adalah kredit di mana peminjam diperbolehkan untuk menarik dana melebihi saldo yang ada pada rekening sehingga saldo pada rekening akan kelihatan negatif sampai pada plafon kredit atau batas kelonggaran tarik yang telah ditetapkan oleh bank. Penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan warkat (cek atau bilyet giro). Pada beberapa bank di Indonesia kredit ini dapat diberikan dalam mata uang USD atau SGD. Kredit rekening koran adalah salah satu kredit bisnis yang sangat fleksibel penggunaannya bagi peminjam, karena untuk penggunaannya dapat dilakukan kapan saja, tanpa persyaratan seperti kredit berjangka. Kredit modal kerja juga dapat dikembalikan kapan saja, sesaat ketika perusahaan mendapatkan pelunasan dari konsumen untuk piutang yang diberikan. Ketika konsumen melakukan pembayaran melalui nomor rekening kredit rekening koran (KRK) maka jumlah saldo negatif peminjam akan berkurang saat itu juga. Oleh karena itu, salah satu keunggulan dari fasilitas ini adalah bunga yang dibayar oleh peminjam hanya sesuai dengan baki debet yang digunakan.
   Meskipun demikian beberapa risiko dari fasilitas ini diantaranya: risiko terjadinya tolakan kliring dikarenakan dana yang tersedia tidak cukup untuk membayar warkat kliring (cek/BG) yang dikeluarkan oleh perusahaan, jika terjadi tolakan kliring hal tersebut dapat memengaruhi rekam jejak yang ada pada daftar hitam Bank Indonesia. Selain itu risiko kemungkinan naiknya suku bunga maka bunga yang berlaku biasanya akan mengikuti dengan mekanisme pasar.
2. Kredit Berjangka
   Selain kredit rekening koran ada juga fasilitas kredit yang dikenal dengan kredit berjangka. Berbeda dengan kredit rekening koran, biasanya untuk pencairan fasilitas kredit berjangka menggunakan surat janji bayar atau promes yang ditanda tangani oleh debitur,

kemudian surat janji bayar tersebut akan dibawa ke bank untuk dicairkan melalui rekening peminjam atau sesuai dengan syarat yang tertuang dalam perjanjian kredit. Jangka waktu fasilitas kredit berjangka bisanya tidak melewati 180 hari atau 6 bulan atau sesuai dengan perhitungan kebutuhan modal kerja dari debitur. Pada fasilitas kredit berjangka ini mitigasi risiko dari pemberi pinjaman dapat dimanfaatkan dengan baik, karena bank dapat mensyaratkan misalnya pencairan kredit harus ditransfer ke rekening pemasok, atau untuk setiap pencairan kredit peminjam harus melampirkan tagihan dari pemasok, hal ini dilakukan oleh bank untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas kredit modal kerja sehingga penggunaan kredit berjangka akan sesuai dengan kebutuhan modal kerja yang bersifat musiman dan dilunasi ketika musim selesai. Untuk fasilitas kredit berjangka peminjam harus melunasi terlebih dahulu pinjamannya pada saat jatuh tempo lalu dapat mengajukan pinjaman selanjutnya. Jika tidak mampu membayar maka peminjam memiliki risiko di mana rekam jejak peminjam akan tercatat pada Bank Indonesia yang menyebabkan kualitas kredit peminjam akan berkurang.

Fasilitas kredit rekening koran dan kredit berjangka biasanya akan diperpanjang setahun sekali dan saat itu peminjam harus melunasinya terlebih dahulu sebelum dilakukan perpanjangan fasilitas kredit. Pada kredit bisnis bank akan meminta jaminan seperti tanah, bangunan, deposito, barang dagangan dan lain sebagainya.

3. Kredit Jangka Panjang

   Fasilitas kredit bisnis selanjutnya adalah kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang sering digunakan untuk pembiayaan investasi besar seperti pembelian aset tetap, ekspansi usaha, atau proyek-proyek pembangunan jangka panjang lainnya. Umumnya bank akan membiayai maksimal 80 persen dari rencana anggaran biaya (RAB). Kredit jangka panjang adalah pinjaman yang harus dibayar kembali dalam waktu lebih dari satu tahun. Salah satu contoh kredit jangka panjang yang umum adalah kredit hipotek, yang diberikan untuk

pembiayaan pembelian atau pembangunan properti. Peminjam diberikan jangka waktu yang panjang, seringkali 10-30 tahun untuk mengembalikan pokok pinjaman serta bunga kepada pemberi pinjaman. Pada beberapa pinjaman tertentu pemberi pinjaman akan memberikan grace period di mana pada masa tersebut peminjam cukup membayar bunganya saja, tanpa membayar pokok, nanti setelah masa grace period selesai peminjam harus membayar bunga dan pokok.

Kredit jangka panjang memiliki beberapa keunggulan, seperti tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan kredit jangka pendek, kemudian jangka waktu yang lebih panjang untuk pembayaran, kemampuan untuk membiayai investasi yang lebih besar, penerima jaminan dapat menerima pinjaman di awal, serta pengembalian pokok dan bunga dapat dicicil sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pada umumnya bank atau lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit ini mensyaratkan jaminan seperti aktiva tetap atau kas, dan jaminan tambahan seperti persediaan, kendaraan, atau piutang dagang.

6.4 Pengelolaan Utang

Pengelolaan utang melibatkan pengelolaan semua aspek kewajiban keuangan yang dimiliki, termasuk pemantauan, pengendalian dan pengelolaan risiko terkait. Pengelolaan utang dapat awali dengan memahami dengan baik kondisi keuangan pribadi atau perusahaan. Individu atau perusahaan tentunya mengetahui dengan baik kemampuannya dalam pembayaran hutang. Dalam hal permohonan utang adalah bijaksana jika individu atau perusahaan mengajukan kredit tidak melampaui kemampuan atau kesanggupannya, karena hal tersebut dapat berakibat gagal bayar yang bisa membuat kolektibilitas pada BI checking menjadi tidak baik.

Selanjutnya perusahaan atau individu dapat membuat strategi-strategi berikut yang dapat membantu dalam pengelolaan utang yang efektif.

6.4.1 Pemantauan Utang

Pemantauan pinjaman yang cermat menjadi langkah awal dalam pengelolaan utang yang efektif. Ini mencakup pemantauan terhadap jumlah utang yang dimiliki, tingkat bunga yang dikenakan, jangka waktu utang, serta kemampuan pribadi atau perusahaan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Dengan adanya pemantauan yang baik hal ini akan mencegah terjadi keterlambatan pembayaran yang tentunya dapat menurunkan reputasi debitur dalam daftar Bank Indonesia.

6.4.2 Rencana Pembayaran Utang

Perusahaan atau individu peminjam dapat melakukan penjadwalan dalam pembayaran utang yang terstruktur dan realistis. Hal ini akan sangat membantu dalam mengatur keuangan dengan lebih baik. Rencana ini dapat mencakup prioritas pembayaran, seperti utang yang dalam waktu dekat akan jatuh tempo, utang dengan tingkat bunga tertinggi, atau utang dengan jangka waktu tertentu.

6.4.3 Pengendalian Pengeluaran

Mengendalikan pengeluaran adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola utang dengan efektif. Buat anggaran bulanan yang realistis serta patuhi untuk menghindari adanya penumpukan utang yang baru. Jika ada pengeluaran yang belum terlalu penting, maka dana tersebut dapat dialihkan untuk membayar hutang.

6.4.4 Pendapatan Tambahan

Carilah cara untuk meningkatkan pendapatan, seperti menambah jam kerja, adakan bisnis sampingan, atau menjual barang yang tidak terpakai. Pendapatan tambahan tersebut dapat digunakan untuk membayar utang lebih cepat dan dapat mengurangi beban keuangan.

6.4.5 Hindari Utang Tambahan

Selama proses pengelolaan utang, hindarilah untuk mengajukan utang tambahan, kecuali benar-benar diperlukan atau mendapatkan tambahan penghasilan yang bisa membayar akan hutang tambahan tersebut. Fokuslah terlebih dahulu pada pelunasan utang yang ada sebelum mempertimbangkan utang yang baru.

6.4.6 Edukasi Keuangan.

Tingkatan pengetahuan tentang keuangan pribadi atau keuangan bisnis. Carilah cara untuk memahami dengan baik akan manajemen utang, investasi serta strategi keuangan lainnya untuk mengelola utang dengan lebih efektif.

6.4.7 Konsultasi dengan Ahli Keuangan

Jika merasa adanya kesulitan dalam pengelolaan utang, jangan ragu atau malu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan. Mereka dapat memberikan saran dan strategi yang sesuai dengan situasi keuangan anda, jika diperlukan mintalah saran dari konselor keuangan.

Bab 7

Perencanaan Keuangan Pribadi

7.1 Definisi Perencanaan Keuangan

Uang bukanlah segalanya, namun pada kenyataannya dalam berbagai aspek kehidupan , orang membutuhkan uang. Pada dasarnya secara fungsional uang merupakan alat tukar, alat pembayaran yang sah, dan antara satu orang dengan yang lainnya uang tidak berbeda, persepsi seseorang terhadap uang lah yang membedakannya. Persepsi orang terhadap uang juga dapat memengaruhinya dalam merencanakan keuangannya. Perencanaan Keuangan merupakan proses penetapan tujuan keuangan , dan strategi dalam mencapai tujuan-tujuan keuangan. Tujuan keuangan merupakan segala sesuatu yang ingin dicapai dan membutuhkan dukungan finansial (uang) .

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam buku Agenda Pengelolaan Keuangan mengartikan perencanaan keuangan adalah seni mengelola keuangan pribadi/keluarga dalam mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan berguna , sehingga keluarga menjadi lebih sejahtera.

Financial Planning Standards Board Indonesia , mendefinisikan perencanaan keuangan pribadi sebagai proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana (FPSB, 2016 dalam Malinda,2018)

Perencanaan keuangan pribadi adalah proses perencanaan pengeluaran, pembiayaan, dan investasi untuk mengoptimalkan situasi keuangan (Leon , 2018)

Perencanaan keuangan merupakan proses pengelolaan sumber dan alokasi dana untuk mencapai tujuan keuangan, dalam kegiatan perencanaan keuangan dilakukan evaluasi menyeluruh kondisi keuangan saat ini dan prediksi keuangan masa depan. Perencanaan keuangan itu penting agar kita memiliki pedoman untuk mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan uang.

Manfaat perencanaan keuangan antara lain: 1) meningkatkan efektivitas dalam mendapatkan , mengalokasikan dan melindungi sumber-sumber finansial; 2) terhindar dari penggunaan hutang secara berlebihan; 3) meningkatkan relasi personal yang dihasilkan dari perencanaan yang baik dan komunikatif ; 4) terhindar dari kekhawatiran finansial dengan antisipasi pengeluaran,pencapaian tujuan keuangan dalam menatap masa depan, (Leon,2018). Membuat perencanaan keuangan dibutuhkan logika, keuletan dan kegigihan demi terwujudnya tujuan yang ingin dicapai.(Ghozie, 2014)

7.2 Proses Perencanaan Keuangan

Proses perencanaan keuangan pribadi merupakan proses mengelola keuangan untuk mencapai kepuasan keuangan pribadi , untuk mencapai kepuasan ini membutuhkan manajemen keuangan yang menyeluruh, saling terkait dan terencana dengan baik. Perencanaan keuangan yang menyeluruh dapat meningkatkan kualitas hidup dengan menurunkan ketidakpastian yang berkaitan dengan sumber dan alokasi dana di masa depan.

Tahapan -Tahapan dalam proses perencanaan keuangan (Sundjaja.dkk, 2010):

1. Mengetahui posisi dan kinerja keuangan saat ini: posisi keuangan dapat diketahui dengan membuat neraca keuangan, sedangkan kinerja keuangan diketahui dengan menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran , serta anggaran kas.
2. Menentukan tujuan keuangan: Tujuan keuangan merupakan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang yang membutuhkan uang. Tujuan keuangan harus jelas dan spesifik, tanpa tujuan yang jelas dan spesifik , maka hasil yang dicapai tidak optimal. Dalam

menentukan tujuan keuangan harus disesuaikan dengan keadaan keuangan saat ini, dan jangka waktu pencapaian. Jangka waktu pencapaian dapat berupa jangka pendek (kurang dari 1 tahun), jangka menengah (antara 1-5 tahun), dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun)

3. Menganalisis masalah keuangan yang terjadi saat ini: Dalam mencapai tujuan keuangan , dapat saja timbul berbagai masalah atau kendala seperti tidak adanya konsistensi penerimaan pendapatan,penghasilan yang diterima habis untuk membayar cicilan, pengeluaran lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan utang baru, pengeluaran yang tidak terduga sehingga mengurangi tabungan yang sudah ada.
4. Menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan: Untuk mencapai tujuan keuangan perlu ditulis langkah apa saja yang akan dilakukan , yakni strategi berinvestasi; manajemen risiko; perencanaan pensiun; perencanaan pengelolaan harta jika meninggal dunia; kehidupan sosial
5. Mengimplementasikan semua rencana keuangan yang telah disusun: Setelah menyusun perencanaan keuangan secara tertulis, maka perlu diimplementasikan.

Umumnya langkah-langkah dalam merencanakan keuangan pribadi diawali dengan mengenali profil risiko sendiri dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data keuangan untuk menyusun kondisi keuangan awal dan selanjutnya menyisihkan dana untuk membangun dana darurat, mengelola risiko, menentukan tujuan-tujuan keuangan masa depan, seperti merencanakan dana pendidikan anak, merencanakan dana pensiun , serta menyiapkan akta waris, dan diakhiri dengan menyusun kondisi akhir keuangan. (Soekarno & Damayanti, 2011)

7.2.1 Profil Risiko

Masing-masing individu hendaknya mengenali profil risiko, setiap orang memiliki profil risiko yang berbeda-beda tergantung dengan kenyamanannya dalam menghadapi risiko dan keuntungan. Tujuan mengenal profil risiko

adalah untuk memilih produk-produk investasi yang sesuai dengan profil risiko.

Ada tiga kelompok profil risiko (Soekarno & Damayanti, 2011):

1. Konservatif: Kelompok ini cenderung menghindari risiko (risk averse) , produk investasi yang dipilih cenderung berisiko rendah seperti deposito, tabungan, reksadana pasar uang , logam mulia
2. Moderat: Kelompok ini dapat menerima risiko yang seimbang dengan keuntungan yang diperoleh , produk investasi yang sesuai antara lain obligasi, sukuk, obligasi ritel (ORI) reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran.
3. Agresif: Kelompok ini cenderung menyukai risiko (risk seekers), produk investasi yang sesuai seperti saham, reksadana saham, membuat bisnis sendiri

7.2.2 Menyusun Kondisi Awal Keuangan

Kegiatan menyusun kondisi awal keuangan pribadi , idealnya dimulai dengan melakukan kegiatan mencatat semua penghasilan (uang masuk) dan pengeluaran (uang keluar) setiap hari dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kegiatan mencatat merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dan menjadi dasar untuk mengetahui posisi keuangan.(Malinda,2018). Setelah melakukan pencatatan, selanjutnya adalah membuat laporan keuangan pribadi, laporan ini terdiri dari laporan arus kas dan neraca .

Laporan Arus Kas Pribadi

Laporan arus kas pribadi merupakan data penghasilan (arus kas masuk) dan pengeluaran (arus kas keluar) seseorang yang biasanya dibuat secara bulanan.

1. Arus kas (masuk): dapat berupa gaji , keuntungan dari usaha, bunga atau return dari investasi
2. Arus kas (keluar): merupakan semua pembayaran atau tagihan bulanan seperti listrik air, internet, pulsa, sewa bulanan, belanja bulanan, biaya sekolah,biaya kesehatan, premi asuransi, pembelian produk investasi dll (disesuaikan dengan pengeluaran masing-masing orang) .

3. Arus Kas Bersih: merupakan penghasilan (arus kas masuk) dikurang pengeluaran (arus kas keluar). Arus kas bersih yang positif mencerminkan penghasilan yang lebih besar dari pengeluaran, arus kas negatif terjadi apabila pengeluaran lebih besar dari penghasilan.

Tabel 7.1: Laporan Arus Kas Pribadi (Contoh)

Bulan.....Tahun.....

PENGHASILAN BULANAN	**NILAI BULANAN (Rp)**
Gaji	
Penghasilan dari usaha	
Penghasilan Lainnya	
TOTAL PENGHASILAN	
PENGELUARAN BULANAN	**NILAI BULANAN (Rp)**
Tabungan / Investasi	
Tabungan (Regular)	
Reksadana /produk investasi lainnya	
Unit Link	
Subtotal	
Premi Asuransi	
Asuransi Jiwa	
Asuransi Lain-lain	
Subtotal	
Pengeluaran Pribadi	
Makanan	
Listrik /gas	
Internet/pulsa	
Air / PAM	
Kebersihan / Keamanan	
Grocery / Belanja Bulanan	
Hobi/hiburan	
Subtotal	

Transportasi	
Bensin	
Tol	
Parkir	
Kendaraan Umum /taxi online /ojek online	
Subtotal	
Subtotal	
Keluarga / Sosial	
Bantuan Keluarga	
Sedekah/ zakat/ perpuluhan	
Sumbangan Lain	
Subtotal	
Cicilan / Angsuran	
Rumah / Apartemen	
Kendaraan	
Kartu Kredit	
Subtotal	
TOTAL PENGELUARAN	
ARUS KAS BERSIH (PENGHASILAN-PENGELUARAN)	

Catatan:

1. Contoh laporan arus kas pada tabel 7.1 di atas dapat disesuaikan (fleksibel) tergantung dari kondisi masing-masing individu maupun keluarga.
2. Laporan arus kas mencerminkan jumlah pemasukan maupun pengeluaran , alokasi terbesar keuangan individu , bisa dikurangi ataupun ditambahkan sesuai kebutuhan.
3. Setelah satu tahun dapat direkapitulasi setahun, arus kas bersih tahunan dapat dimasukkan dalam neraca pada pos tabungan.

4. Membuat anggaran: Perpanjangan dari laporan arus kas pribadi dapat dibuat anggaran arus kas untuk periode waktu yang akan datang.

Neraca Keuangan Pribadi

Neraca keuangan pribadi mencerminkan potret keseluruhan kekayaan individu pada titik tertentu. Neraca keuangan pribadi menunjukkan posisi keuangan yang terdiri dari aset disisi aktiva , dan total hutang (hutang jangka pendek dan jangka panjang) ditambah kekayaan bersih di sisi pasiva . Kekayaan bersih adalah aset dikurangi total hutang

Rumus dasar dari neraca keuangan pribadi (Malinda, 2018):

AKTIVA = PASIVA

HARTA (ASET) = HUTANG + KEKAYAAN BERSIH

Tabel 7.2: Neraca Keuangan Pribadi (Contoh)

Per 31 Desember tahun.....

Aset	
Aset Lancar	
Aset kas	
Kas di tangan	
Tabungan 1	
Tabungan 2	
Aset Investasi	
Reksadana Pasar Uang	
Reksadana Saham	
Obligasi	
Total Aset Lancar	
Aset Pribadi (Tidak Lancar)	
Perhiasan emas	
Rumah (ditempati)	
Mobil	
Motor	

Total Aset Tidak Lancar	
Total Aset	
Kewajiban	
Jangka Pendek	
Kartu Kredit	
Pinjaman koperasi	
Total pinjaman jangka pendek	
Jangka Panjang	
Pinjaman Rumah	
Pinjaman Lainnya	
Total pinjaman jangka panjang	
Total Hutang	
Kekayaan Bersih (total asset-total hutang)	
Total Hutang dan Kekayaan bersih	

Catatan:

1. Aset adalah harta benda yang dimiliki dan memiliki nilai jual
2. Aset Lancar adalah uang tunai atau setara kas (tabungan, deposito)
3. Aset investasi adalah kekayaan yang memberikan keuntungan ((return)
4. Aset Pribadi adalah penggunaan harta oleh pemilik (rumah tempat tinggal, mobil, motor , perhiasan)
5. Hutang jangka pendek adalah hutang yang mengikat selama kurun waktu maksimal 3 tahun
6. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang mengikat selama kurun waktu maksimal 3 tahun

7.2.3 Mengelola Arus Kas (Anggaran)

Setelah membuat laporan arus kas pribadi , langkah berikutnya adalah penganggaran, penganggaran merupakan perpanjangan dari laporan arus kas pribadi (Leon, 2018), kita dapat memprediksi arus kas bersih dengan

memprediksi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk periode waktu yang akan datang. Selain itu dengan membuat anggaran kita dapat mengelola arus kas masuk (penghasilan) dan arus kas keluar (pengeluaran), pengelolaan arus kas bertujuan agar stabilitas keuangan dapat terjaga jadi tidak sekedar masuk keluar uang tanpa ada tujuan dan kejelasan. Contoh pola pengeluaran (alokasi dana) yang diberikan OJK (OJK, 2013) dapat dilihat pada gambar 7.1.

Gambar 7.1: Contoh: Pola Pengeluaran (Alokasi Dana) Sumber: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/17

Di Dalam mengelola arus kas, ada beberapa komponen yang harus dijaga yakni arus kas bersih yang positif (pengeluaran lebih kecil dari penghasilan. Selain itu yang perlu mendapatkan perhatian adalah komponen hutang .

Pengelolaan utang sangat penting karena berdampak langsung pada pengeluaran tiap bulannya dalam bentuk cicilan. Dalam komponen arus kas, hutang menjadi prioritas pertama yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengeluaran-pengeluaran lainnya, terutama hutang kartu kredit, dilunasi terlebih dahulu hutang kartu kredit agar dapat meminimalkan biaya keuangan (Leon,2018). Idealnya total pinjaman tidak melampaui 30% dari penghasilan bulanan , jika total cicilan sudah mendekati atau mencapai 30 % penghasilan bulanan, sebaiknya tidak mengambil pinjaman tambahan .

7.2.4 Membangun Portofolio

Dalam perencanaan keuangan yang dimaksud dengan portofolio merupakan target prioritas yang ingin dicapai dalam merencanakan keuangan (Malinda,2018).

Adapun jenis portofolio yang dapat disiapkan adalah:

1. Tabungan: menyisihkan sebagian dana dari penghasilan
2. Dana Darurat: Dana yang harus dialokasikan untuk keadaaan darurat.
3. Kekayaan bersih yang positif dalam neraca keuangan pribadi (total harta lebih besar dari total hutang)
4. Selisih antara penghasilan dengan pengeluaran harus positif (arus kas yang positif/penghasilan lebih besar dari pengeluaran)
5. Memiliki asuransi jiwa/atau asuransi lainnya
6. Investasi: penanaman modal untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih besar dari tingkat inflasi
7. Tujuan-tujuan pribadi maupu keluarga (sebagai contoh kepemilikan rumah, kendaraan mobil/motor, pendidikan anak,naik haji , wisata rohani, rekreasi, membuka bisnis)
8. Kewajiban pembayaran pajak
9. Pensiun
10. Warisan: distribusi kekayaan sesuai dengan harapan.

7.2.5 Membangun Dana Darurat

Dana darurat pada prinsipnya sebagai proteksi yang berguna untuk mendukung kehidupan keluarga. Dana darurat juga menjadi prioritas dalam perencanaan keuangan, bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat darurat. Contoh kebutuhan darurat seperti biaya karena sakit ,kecelakaan, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), kebutuhan biaya meninggalnya anggota keluarga. Dana darurat dialokasikan secara terpisah dari rekening tabungan lainnya , yang perlu diperhatikan dalam penempatan rekening dana darurat adalah: 1) kemudahan dalam mengakses dana; 2) kecepatan pengambilan dana; 3)keamanan atas instrumen investasi. Untuk menyimpan dana darurat sebaiknya pada produk keuangan yang likuid dan paling rendah risikonya , seperti tabungan (ATM), reksa dana pasar uang, atau

produk non keuangan seperti emas/logam mulia. Besarnya dana darurat bagi setiap orang berbeda-beda tergantung situasi perorangan.

Secara teori dapat dikelompokkan sebagai berikut (Soekarno &Damayanti,2011):

1. Lajang (tanpa tanggungan) : Min 3 kali pengeluaran bulanan
2. Menikah dengan dua anak atau (keluarga kecil): Min 6-9 kali pengeluaran bulanan
3. Menikah dengan tiga anak atau lebih (Keluarga besar) : Min 9-12 kali pengeluaran perbulan

Tabel 7.4: Contoh Dana Darurat Berdasarkan Jumlah Tanggungan

Pengeluaran/bulan		3.000.000	5.000.000
Lajang	Minimal 3 kali pengeluaran	9.000.000	15.000.000
Menikah dengan dua anak atau (keluarga kecil)	Minimal 6-9 kali pengeluaran	18.000.000-27.000.000	30.000.000-45.000.000
Menikah dengan tiga anak atau lebih (keluarga besar)	Minimal 9-12 kali pengeluaran	27.000.000-36.000.000	45.000.000-60.000.000

Untuk membangun dana darurat dapat dicicil perbulan sampai mencapai target yang sesuai dengan kebutuhan, tidak disarankan untuk mengutamakan investasi sebelum memiliki dana darurat, jadi sebaiknya dahulukan menabung untuk dana darurat terlebih dahulu. Setelah dana darurat terpenuhi , maka dapat melakukan investasi.

7.2.6 Manajemen Risiko

Pada dasarnya risiko tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola. Tahapan-tahapan dalam manajemen risiko yaitu: identifikasi risiko, memetakan bobot risiko, dan melakukan mitigasi risiko. Mitigasi risiko artinya mengelola risiko dengan cara menghindari,mengendalikan,menerima, atau mengalihkan risiko

ke pihak lain. Dalam perencanaan keuangan pribadi, risiko yang paling sering dihadapi adalah risiko kematian atau risiko cacat sehingga orang tidak dapat bekerja secara normal, untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga. Risiko ini dapat dialihkan ke pihak asuransi (Soekarno&Damayanti,2011). Untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain dapat dilakukan dengan cara membeli asuransi. Sebelum memilih asuransi hendaknya perlu memahami fungsi dari asuransi yakni agar mendapatkan perlindungan (proteksi) bagi seseorang atau keluarga. Fungsi asuransi tidaklah sama dengan investasi, fungsi dari investasi adalah untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang agar daya beli yang dimiliki oleh seseorang tidak habis terkuras oleh inflasi. Jadi membayar premi asuransi merupakan pengeluaran /kewajiban untuk mengelola risiko jangka panjang, bukan untuk menabung /investasi.

7.2.7 Merencanakan Dana Pendidikan

Salah satu tujuan dalam perencanaan keuangan adalah mempersiapkan dana pendidikan , mengingat pendidikan di Indonesia tergolong cukup mahal. Dana pendidikan bisa mulai dipikirkan dan disiapkan sedini mungkin dengan menyisihkan sebagian pendapatan secara rutin setiap bulannya. Langkah-langkah dalam mempersiapkan dana pendidikan (Soekarno&Damayanti, 2011): 1) Menentukan target dana pendidikan yang dibutuhkan ; 2) menetapkan strategi pencapaian target dana pendidikan; 3) melindungi dari risiko; 4) Melakukan evaluasi dan revisi.

7.2.8 Merencanakan Dana Pensiun

Umumnya setelah orang memasuki masa pensiun, ingin menikmati hidup secara berkecukupan, pada masa pensiun sedapat mungkin kualitas hidup tidak menurun. Merencanakan dana pensiun merupakan langkah penting mengingat adanya peningkatan harapan hidup. Harapan hidup yang panjang memiliki konsekuensi panjangnya masa kehidupan pensiun. Merencanakan dana pensiun bertujuan juga agar tidak membebani orang lain di masa pensiun, dengan merencanakan dana pensiun disaat usia produktif dilakukan sesegera mungkin , jangan menunggu mendekati usia pensiun. Dana pensiun merupakan dana yang telah dialokasikan dan diinvestasikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika seseorang memasuki masa pensiun. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pensiun: 1) Berapa besar dana yang harus dimiliki saat pensiun? 2) Berapa lama dibutuhkan pendapatan pensiun, atau berapa lama harapan hidup kita di masa pensiun. Umumnya

perencanaan keuangan mengestimasi kebutuhan masa pensiun sebesar 75 % dari kebutuhan saat masih aktif , dengan asumsi kebutuhan biaya sekolah anak maupun berbagai cicilan sudah bebas. (Soekarno& Damayanti,2011).

Tahapan-tahapan untuk merencanakan dana pensiun adalah sebagai berikut:

1. Memperkirakan kebutuhan penghasilan di masa yang akan datang , dengan perhitungan uang pada masa sekarang
2. Menghitung kebutuhan tersebut dengan hitungan masa yang akan datang dengan asumsi adanya inflasi.
3. Memperkirakan penghasilan pensiun yang berasal dari sumber lain.
4. Hitung tambahan penghasilan yang dibutuhkan
5. Membuat asumsi harapan hidup (usia yang wajar)
6. Memperkirakan kebutuhan investasi sekarang secara langsung, untuk mencukupi kebutuhan pada saat masa pensiun
7. Tetapkan tabungan bulanan, dengan aasumsi hasil investasi yang ditentukan , untuk memenuhi kebutuhan saat pensiun.

7.2.9 Instrumen Investasi

Untuk mencapai berbagai tujuan-tujuan keuangan, perlu mempertimbangkan instrumen investasi yang akan dipilih,karena tidak setiap instrumen investasi sesuai untuk berbagai tujuan keuangan. Idealnya dalam memilih instrumen investasi di sesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam mencapai tujuan keuangan, semakin panjang waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan keuangan, maka dapat dipertimbangkan instrumen investasi yang lebih berisiko , dengan harapan dapat memberikan imbal hasil (return) yang juga lebih tinggi. Sebaliknya semakin pendek waktu untuk mencapai tujuan keuangan maka dipilih instrumen investasi yang risikonya rendah. Instrumen investasi yang sering digunakan dalam perencanaan keuangan umumnya instrumen investasi aset keuangan, dengan alasan kepraktisan dan likuiditas. Beberapa contoh instrumen investasi aset keuangan adalah saham, obligasi, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham Gambar 7.2 menunjukkan berbagai instrumen investasi yang meliputi faktor risiko , imbal hasil dan jangka waktu .

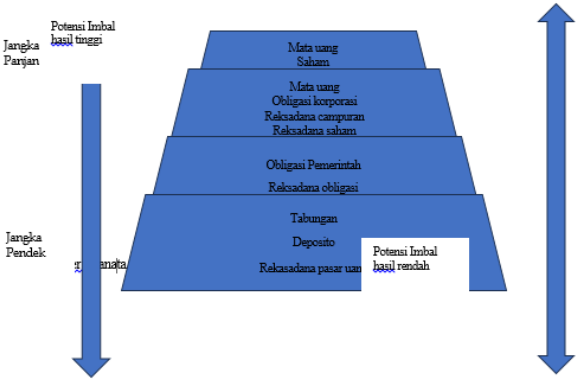

Gambar 7.2: Instrumen Investasi,Faktor Risiko, Imbal Hasil, Jangka Waktu

Sebelum berinvestasi , ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni kondisi keuangan dalam keadaan baik, menurut Manurung dan Rizky (2010, dalam Leon, 2018) yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Periksa dan lunasi terlebih dahulu hutang konsumtif; 2) arus kas bersih harus positif;3) Membangun dana darurat;4)membeli asuransi sesuai kebutuhan.

Bab 8

Pajak dan Pengelolaan

8.1 Pajak

Pajak merupakan suatu bentuk pungutan yang pasti dalam sebuah negara, tepat sebagaimana yang telah dikatakan oleh Benjamin Franklin beberapa abad yang lalu yaitu ”tidak ada yang pasti di dunia ini, kecuali kematian dan pajak.” (Mankiw, 2008).

Pemungutan pajak tentunya telah disadari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena pajak di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti kerajaan Mataram dan Majapahit yang mengenakan pajak atas tanah dan barang dagangan yang dimiliki masyarakat (Setiawan, 2022).

Dewasa ini, tujuan pemerintah Indonesia memungut pajak lebih kepada maksud untuk menghimpun dana guna menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan (fungsi anggaran) serta untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan investasi (fungsi mengatur) (Naharto & Tjondro, 2014).

8.1.1 Definisi Pajak

Pajak memiliki beragam definisi atau pengertian yang pada umumnya dikemukakan oleh para ahli dibidang hukum dan ekonomi, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut R. Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1982).
2. Menurut M. J. H. Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Sinaga, 2016).
3. Menurut N. J. Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Sinaga, 2016).
4. Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Brotodihardjo, 2008).

8.1.2 Karakteristik Pajak

Berdasar pada berbagai definisi pajak secara umum yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri atau karakteristik khusus sebagaimana yang dikemukakan oleh Suparnyo (2012), Sinaga (2016), Johan, dkk (2019), yakni:

1. Kontribusi atau iuran wajib kepada pemerintah.
   Iuran wajib kepada negara ini terutang baik kepada wajib pajak individu (orang pribadi) maupun wajib pajak perusahaan (badan) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Dapat dipaksakan dalam pemungutannya.
   Dengan kata lain, bagi subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan objektif (yaitu memiliki penghasilan) maka pemungutan pajak dapat bersifat memaksa, karena adanya peraturan atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga ada ancaman sanksi bagi pihak yang menghindari pembayaran pajak dengan cara sengaja melanggar.
3. Pembayar tidak menerima jasa timbal (kontraprestasi) langsung.
   Pemerintah tidak pernah menjanjikan untuk memberikan jasa timbal secara langsung kepada setiap pembayar pajak, melainkan jasa timbal atau kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah pada dasarnya bersifat menyeluruh dan dapat dirasakan oleh segenap masyarakat, baik mereka yang membayar pajak maupun yang tidak.
4. Pemungutan serta pengelolaan ada pada pemerintah.
   Pemungutan pajak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Uang pajak yang diterima akan masuk ke kas pemerintah serta dikelola oleh pemerintah yang terkait, yang hasilnya nanti dinikmati seluruh elemen masyarakat.
5. Digunakan bagi kesejahteraan rakyat dan negara.
   Di Indonesia, pajak berperan besar dalam hal menghimpun dana/ anggaran yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan investasi publik. Dalam hal ini uang pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai operasional pemerintahan, subsidi, membiayai pertahanan dan keamanan negara, membangun sarana dan prasarana publik, membiayai pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum, dlsb.

8.1.3 Klasifikasi Pajak

Secara umum, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan (1) golongan, (2) sifat, dan (3) lembaga pemungut (Suparnyo, 2012; Tansuria, 2014, Tansuria, 2016; Sinaga, 2016).

Gambar 8.1: Klasifikasi Pajak (Tansuria, 2016)

1. Golongan

   Pajak dapat digolongkan ke dalam dua bagian:

   a Pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang sepenuhnya dikenai pada wajib pajak yang menerima penghasilan. Pajak di Indonesia yang dapat digolongkan pajak langsung diantaranya yaitu pajak penghasilan, di mana beban pajak ini tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain.

   b Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan pada pihak lain, misalnya konsumen. Di Indonesia, pajak pertambahan nilai termasuk dalam golongan ini.

2. Sifat

   Berdasarkan sifat, pajak dapat dibagi menjadi:

   a Pajak subjektiv. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada keadaan diri subjek pajak (wajib pajak). Pajak penghasilan merupakan contoh pajak yang bersifat subyektif, di mana penentuan beban pajak berpangkal pada keadaan subyek terlebih dahulu, baru setelah itu dilihat objeknya.

   b Pajak objektiv. Pajak objektif berpangkal pada objek pajak dalam pengenaannya, tanpa memperhatikan keadaan si subjek. Dengan demikian antara orang kaya dan miskin dapat dikenai beban

pajak yang sama besarnya ketika membeli sebuah barang kena pajak yang sama. Pajak pertambahan nilai dan bea meterai merupakan contoh pajak yang bersifat objektif.

3. Pemungut.

   Menurut pemungutnya, pajak dapat diklasifikasikan menjadi:

   a Pajak pusat. Dinamai pajak pusat karena pihak yang memungut dan mengelolanya adalah pemerintah pusat, lewat Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pajak yang diterima akan masuk dalam APBN yang bertujuan membiayai rumah tangga negara.

   b Pajak daerah. Disebut pajak daerah disebabkan pemerintah daerah, lewat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang memungut serta mengelolanya. Pajak yang dikumpulkan selanjutnya dimasukkan dalam APBD untuk membiayai rumah tangga daerah.

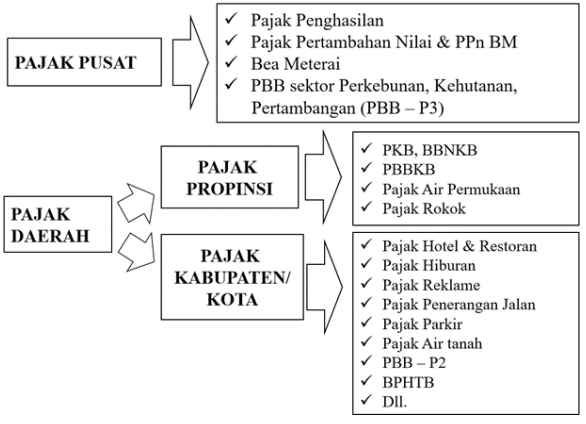

Gambar 8.2: Jenis-jenis Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Tansuria, 2016)

8.1.4 Fungsi Pajak

Pajak setidaknya memiliki dua fungsi utama, yaitu (1) fungsi anggaran, dan (2) fungsi mengatur. Selain fungsi utama, pajak juga memiliki fungsi pelengkap lainnya, yakni fungsi pemerataan/distribusi pendapatan, dan fungsi demokrasi.

Pembahasan pada sub topik ini lebih menekankan pada dua fungsi utama.

1. Fungsi anggaran.
   Fungsi anggaran secara historis merupakan fungsi pajak mula-mula, Di mana pajak dijadikan alat untuk memasukan dana ke kas pemerintah secara optimal berdasarkan UU perpajakan. Dana yang berasal dari pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik yang bersifat rutin maupun bersifat pembangunan infrastruktur. Realisasi penerimaan pemerintah Indonesia dari pajak selalu menunjukan tren kenaikan dari tahun ke tahun, yang menyatakan betapa pentingnya penerimaan pajak bagi negara.

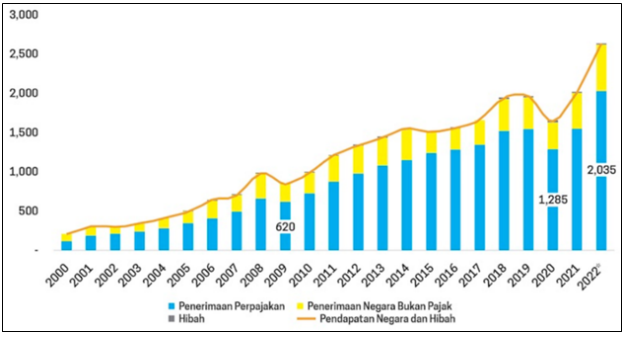

Gambar 8.3: Realisasi Penerimaan Negara (dalam Triliun Rupiah) (Kementrian Keuangan, https://datanesia.id/bulan-pajak-telah-tiba/)

2. Fungsi mengatur.
   Fungsi mengatur merupakan fungsi tambahan dari sebuah pajak. Pajak, selain sebagai alat untuk menghimpun pendapatan pemerintah, juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pajak yang tinggi atas minuman beralkohol demikian halnya barang mewah bertujuan agar masyarakat mengurangi konsumsinya. Dilain pihak, pajak yang rendah untuk UMKM dan pajak ekspor sebesar nol persen bertujuan untuk memberikan insentif bagi tumbuhnya usaha tersebut dan meningkatkan ekspor yang dipandang penting bagi fundamental

ekonomi sebuah negara. Pajak juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menarik investasi asing, dan lain sebagainya.

8.2 Lembaga Pengelola Pajak

Di Indonesia, lembaga pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak-pajak yang dikelola DJP disebut pajak pusat atau pajak negara, diantaranya terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan dalam lingkup daerah, pengelolaan pajak diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pajak-pajak yang dikelola pemerintah daerah tertuang dalam Undang-undang Pajak Daerah. Pada bagian ini, lebih menekankan pada pengelolaan pajak negara yang dilakukan oleh DJP.

DJP merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan RI, dan dipimpin oleh seorang direktur jenderal pajak. DJP merupakan unit eselon satu. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 417 dan 418 PMK No.118/PMK. 01/2021, DJP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Guna menjalankan tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi: (1) Perumusan kebijakan di bidang perpajakan; (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; (3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan; (4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan; (5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan; (6) Pelaksanaan administrasi DJP; dan (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

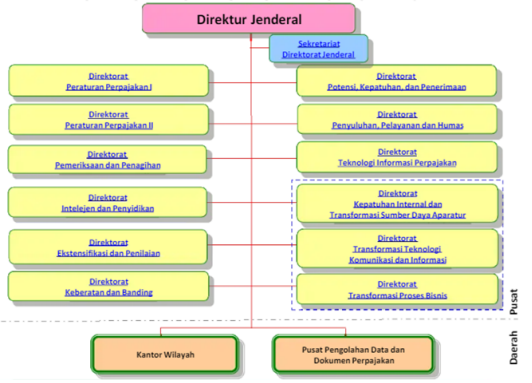

Gambar 8.4: Struktur Organisasi Kantor Pusat DJP (https://www.scribd.com/presentation/112191965/Struktur-Organisasi-DJP-Kantor-Pusat)

8.3 Pengelolaan Pajak oleh Perusahaan

Perusahaan yang beroperasi di Indonesia akan senantiasa berhadapan dengan berbagai jenis pajak, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat lewat DJBC maupun yang dikelola oleh pemerintah daerah. Terkait dengan pajak pusat, setidaknya sebuah perusahaan akan senantiasa berhadapan dengan pajak-pajak berikut ini.

8.3.1 Jenis-jenis Pajak

Pada bagian ini hanya akan dibahas secara ringkas dua pajak utama dan satu pajak minor yang pada prakteknya selalu dihadapi oleh setiap wajib pajak dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

   PPh merupakan pajak yang dikenai atas suatu jumlah penghasilan yang diperoleh subjek pajak. Ada beragam jenis PPh yang diatur dalam undang-undang tentang pajak penghasilan, yang mekanisme pengenaannya lewat pemotongan dan pemungutan. Pajak-pajak yang dimaksud terdiri dari:

a PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) sering juga disebut dengan PPh final, di mana pengaturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Disebut final karena pajak yang telah dipotong pihak ketiga tidak dapat dikreditkan oleh perusahaan dalam SPT Tahunannya (Tansuria, 2010, 2011). Jenis-jenis penghasilan yang dikenai PPh final, diantaranya adalah: bunga deposito dan tabungan, bunga/diskonto obligasi yang diperjualbelikan di bursa efek, penjualan dan persewaan tanah dan bangunan, dll.

b PPh Pasal 21

Setiap perusahaan tentunya akan selalu disibukkan setidak-tidaknya setiap bulan dengan pajak yang satu ini. Secara sederhana PPh 21 dapat disebut sebagai pajak karyawan, oleh karena setiap perusahaan yang mempekerjakan dan membayar penghasilan kepada karyawan-karyawannya wajib melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini (Tansuria, 2017).

c PPh Pasal 22

Pajak ini digolongkan dalam pajak pemungutan, oleh karena dalam pelaksanaannya Menteri Keuangan telah menunjuk pihak-pihak yang bertindak sebagai pemungut pajak. Sebuah perusahaan dapat ditunjuk menjadi pemungut PPh 22 apabila perusahaan yang bersangkutan bergerak dibidang industri semen, industri baja (hulu), industri kertas, industri otomotif, industri farmasi. Dipihak lain, perusahaan yang melakukan impor barang, akan dikenai pula pemungutan PPh 22 impor yang dilakukan oleh DJBC dan bank devisa (Tansuria, 2010).

d PPh Pasal 23

PPh ini merupakan pajak pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pembayaran penghasilan terkait pemanfaatan modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. Obyek PPh 23 terdiri dari: (1) dividen, (2) bunga, (3) royalti, (4) hadiah, (5) sewa, dan (6) imbalan jasa, selain yang telah dipotong PPh 21 (Tansuria, 2010).

e PPh Pasal 26

Jika perusahaan membayar penghasilan kepada pihak yang berstatus ”asing”, selain yang berbentuk permanent establishment

atau bentuk usaha tetap (BUT), maka wajib melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang diberikan (tidak berlaku jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara asal dari pihak yang menerima penghasilan). Obyek PPh 26 ini meliputi obyek pajak PPh 21 dan 23 serta ditambah dengan beberapa obyek lainnya (Tansuria, 2010).

f PPh Pasal 25

Selain pajak-pajak yang mekanisme pengenaannya lewat pemotongan atau pemungutan sebagaimana yang telah dibahas di atas, PPh 25 merupakan pajak yang harus dilunasi sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan dengan cara mengangsur setiap bulan. Pembayaran pajak secara angsuran ini bertujuan agar wajib pajak bersangkutan tidak akan terbebani secara keuangan dengan utang pajak, apabila nanti dibayar sekaligus pada akhir tahun pajak.

g PPh Pasal 29

PPh ini merupakan kekurangan pajak yang harus disetor oleh perusahaan sendiri nanti pada akhir tahun pajak setelah melakukan penghitungan PPh terutang di SPT Tahunan. Dengan kata lain, PPh 29 merupakan selisih lebih besar antara jumlah PPh sebuah perusahaan pada akhir tahun pajak dengan PPh yang dapat dikreditkan sebagai hasil dari mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, dan yang disetor sendiri (PPh 25), yang terjadi dalam tahun pajak yang sama.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN pada dasarnya merupakan pajak objektif, yaitu pajak yang terjadi akibat mengkonsumsi barang dan jasa kena pajak di dalam negara Indonesia yang dilakukan baik oleh orang pribadi, badan (perusahaan), dan pemerintah pemerintah sendiri. Mekanisme pengenaan pajak ini lewat pemungutan yang dilakukan oleh pihak yang menyerahkan barang dan jasa kena pajak kepada konsumen. Dalam hal ini, pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak wajib berstatus pengusaha kena pajak (PKP).

3. Bea Meterai (BM)

Bagi perusahaan yang sibuk dengan urusan dokumen, harus berawas-awas karena ada pajak yang dapat dikenai atas dokumen yang dibuat tersebut. Dokumen-dokumen yang berpotensi dikenai bea meterai

adalah dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang suatu saat nanti bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sementara dokumen yang bersifat perdata, diantaranya terdiri dari: surat perjanjian, akta notaris, surat berharga, dokumen yang menyebutkan jumlah nominal di atas lima juta rupiah. (Tansuria, 2013; UU No.10 Tahun 2020).

8.3.2 Objek, Tarif, dan DPP

Pada bagian ini akan ditampilkan secara ringkas, berdasarkan urutan, yaitu objek pajak, tarif pajak, dan dasar pengenaan pajak (DPP) yang berlaku untuk masing-masing pajak. Untuk PPh, yang ditampilkan disini adalah yang bersifat pemotongan atau pemungutan, sehingga yang wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak seperti PPh 25 dan PPh 29 tidak ditampilkan.

Objek, Tarif, dan DPP PPh 4 ayat (2)

1.	Bunga deposito, tabungan/jasa giro dan diskonto SBI	
	▪ WP dalam negeri dan BUT	20% × jumlah bruto
	▪ WP luar negeri	20% × jumlah bruto atau sesuai P3B
2.	Surat perbendaharaan negara	
	▪ WP dalam negeri dan BUT	20% × diskonto SPN
	▪ WP luar negeri	20% × diskonto SPN atau sesuai P3B
3.	Hadiah undian	25% × jumlah bruto hadiah
4.	Penjualan saham di bursa efek	0,1% × jumlah bruto nilai transaksi
5.	pengalihan hak atas tanah / bangunan	
	▪ Pengalihan rumah sederhana dan susun sederhana oleh WP yang usaha utamanya di bidang tersebut	1% × jumlah bruto nilai pengalihan
	▪ Pengalihan selain rumah sederhana & susun sederhana oleh WP yang usaha utamanya di bidang tersebut	2,5% × jumlah bruto nilai pengalihan
	▪ Pengalihan kepada pemerintah dan BUMN & BUMD	0% × jumlah bruto nilai pengalihan
6.	Persewaan tanah dan bangunan	10% × jumlah bruto nilai persewaan
7.	Dividen dibayar kepada WPOP dalam neger	10% × jumlah bruto dividen
8.	Bunga bunga/diskonto obligasi di bursa efek	
	▪ Bunga obligasi dengan kupon	15% × jumlah bruto bunga
	▪ Diskonto obligasi dengan kupon, diskonto obligasi tanpa bunga, dan diskonto/bunga WP reksadana	15% × selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan
9.	Usaha jasa konstruksi	
	▪ Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh:	
	✓ Penyedia jasa bersertifikat badan usaha kualifikasi kecil/usaha orang perseorangan	1,75%
	✓ Penyedia jasa tidak bersertifikat badan usaha	4%
	✓ Penyedia jasa kualifikasi usaha menengah ataupun kualifikasi usaha besar atau spesialis	2,65%
	▪ Pekerjaan konstruksi terintegrasi dilakukan oleh:	
	✓ Penyedia jasa yang bersertifikat badan usaha	2,65%
	✓ Penyedia jasa yang tidak bersertifikat badan usaha	4%
	▪ Jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh:	
	✓ Penyedia jasa bersertifikat badan usaha/usaha orang perseorangan	3,5%
	✓ Penyedia jasa tidak bersertifikat badan usaha/usaha orang perseorangan	6%

Objek, Tarif, dan DPP PPh 21

1.	Penghasilan pegawai tetap ▪ Setiap masa pajak ▪ Masa pajak terakhir	 TER bulanan × penghasilan bruto sebulan PPh 21 setahun − total PPh 21 masa-masa sebelumnya
2.	Penghasilan pegawai tidak tetap ▪ ≤ Rp450.000 sehari ▪ > Rp450.00 sehari s.d. Rp2.500.000 sehari ▪ > Rp2.500.000 sehari ▪ Dibayar bulanan	 0% × penghasilan bruto harian 0,5% × penghasilan bruto harian Tarif Pasal 17 × 50% × penghasilan bruto Tarif Pasal 17 × 50% × penghasilan bruto Tarif efektif bulanan × penghasilan bruto
3.	Penghasilan bukan pegawai	Tarif Pasal 17 × (penghasilan bruto × 50%)
4.	Penghasilan subyek lainnya ▪ Peserta kegiatan, pegawai menarik uang pension ▪ Mantan pegawai menerima bonus, dewan pengawas/komisaris	 Pasal 17 × penghasilan bruto TER bulanan × penghasilan bruto

Objek, Tarif, dan DPP PPh 22

1.	Kegiatan impor ▪ Barang tertentu – importir berAPI dan non-API ▪ Barang tertentu lainnya – importir ber-API dan non-API ▪ Kedelai, gandum, tepung terigu – importir ber-API ▪ Kedelai, gandum, tepung terigu – importir non-API ▪ Barang selain di atas – importir ber-API ▪ Barang selain di atas – importir non-API ▪ Barang tidak dikuasai	 10% × nilai impor 7,5% × nilai impor 0,5% × nilai impor 7,5% × nilai impor 2,5% × nilai impor 7,5% × nilai impor 7,5% × harga jual lelang
2.	Kegiatan ekspor	1,5% × nilai ekspor
3.	Pembelian dilakukan oleh bendahara	1,5% × harga pembelian *exclude* PPN
4.	Pembalian dilakukan oleh BUMN	
5.	Penjualan migas ▪ Penjualan BBM ke SPBU yang dibeli dari Pertamina ▪ Penjualan BBM ke SPBU yang dibeli bukan dari Pertamina ▪ Penjualan BBM kepada pihak selain di atas ▪ Penjualan BBG dan pelumas	 0,25% × penjualan *exclude* PPN 0,30% × penjualan *exclude* PPN 0,30% × penjualan *exclude* PPN 0,30% × penjualan *exclude* PPN
6.	Penjualan industri tertentu ▪ Industri semen ▪ Industri kertas ▪ Industri baja ▪ Industri otomotif ▪ Industri farmasi	 0,25% × DPP PPN 0,10% × DPP PPN 0,30% × DPP PPN 0,45% × DPP PPN 0,30% × DPP PPN
7.	Penjualan kendaraan bermotor dalam negeri	0,45% × DPP PPN
8.	Pembelian hasil hutan, kebun, dll	0,25% × harga beli *exclude* PPN
9.	Pembelian batubara dan mineral	1,5% × harga beli *exclude* PPN
10.	Penjualan emas batangan	0,45% × harga jual
11.	Penjualan barang sangat mewah	1% × harga jual *atau* 5% × harga jual, bergantung pajak jenis barang

Objek, Tarif, dan DPP PPh 23

1.	Dividen, bunga, dan royalti	15% dari jumlah bruto
2.	Sewa	2% dari jumlah bruto
3.	Hadiah, penghargaan, dan bonus	15% dari jumlah bruto
4.	Imbalan jasa	2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

Objek, Tarif, dan DPP PPN

1.	Penyerahan barang kena pajak / jasa kena pajak	11% × harga jual/nilai impor/nilai lain
2.	Ekspor barang kena pajak / jasa kena pajak	0% × nilai ekspor
3.	Kegiatan membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha	2,2% × biaya yg keluar *excl.* harga tanah
4.	Penyerahan aktiva menurut tujuan semula tidak diperjual-belikan	11% × nilai jual

Objek dan Tarif Bea Meterai

1.	Dokumen bersifat perdata: ▪ Surat-surat: perjanjian, keterangan, pernyataan, lainnya, beserta rangkap ▪ Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya ▪ Akta PPAT beserta salinan dan kutipannya ▪ Surat-surat berharga beserta dengan dokumen transaksinya ▪ Dokumen-dokumen yang terkait dengan lelang ▪ Dokumen memuat jumlah ulang di atas lima juta rupiah ▪ Dokumen lainnya, lewat penetapan peraturan pemerintah	Rp10.000
2.	Setiap dokumen yang digunakan nantinya sebagai bukti di depan hakim	

Bab 9

Pengelolaan Keuangan untuk Usaha Kecil

9.1 Pengertian Usaha Kecil (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Hidayat & Fadilah, 2009). Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tujuan usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro mempunyai

peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat mengurang impor dan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro dari pada yang terjadi di perusahaan besar (Sutrisno dan Sri, 2013: 22).

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari (Kementerian Koperasi dan UKM dalam Neddy, 2014: 72):

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor penyedia lapangan kerja yang terbesar
2. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
3. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
4. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

UMKM menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: aksesbilitas, manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, kemitraan. Dari beragamnya permasalahan yang dihadapi UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi (Afifah, 2012).

Menurut Dwiwinarno dalam Haryadi (2016: 13), ada beberapa faktor penghambat berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain kurangnya modal dan kemampuan manajerial yang rendah. Meskipun permintaan atas usaha pelaku usaha meningkat karena terkendala dana maka sering kali tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana dan keterbatasan kemampuan dalam membuat usulan untuk mendapatkan dana. Kebanyakan UMKM dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga evaluasi kegiatan usaha.

Menurut Andang dalam Afifah (2012: 122), permasalahan UMKM dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM (basic problems), antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, sumber daya manusia (SDM), pengembangan produk dan akses pemasaran;
2. Permasalahan lanjutan (advanced problems), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor;
3. Permasalahan antara (intermediate problems), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan. Dengan pemahaman atas permasalahan di atas, akan dapat ditengarai berbagai problem dalam UMKM dalam tingkatan yang berbeda, sehingga solusi dan penanganannya pun seharusnya berbeda pula.

8.2 Konsep Pengelolaan Keuangan Usaha Kecil

Pengelolaan Keuangan Manajemen adalah manajemen yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif, serta upaya pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien (Sartono, 2015). Manajemen keuangan mencakup semua aktivitas perusahaan yang terkait dengan usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang rendah dan penggunaan serta alokasi dana tersebut secara efisien (Sutrisno, 2013). Fungsi Pengelolaan manajemen keuangan dapat dijelaskan sebagai serangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, pencarian, penyimpanan, dan pemeriksaan dana yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan.

Pengelolaan keuangan yang efektif adalah kemampuan dalam memperoleh dan menggunakan dana dengan efisien, sehingga perusahaan dapat mencapai laba dan bertahan di masa depan. Pengelolaan keuangan yang baik membantu perusahaan menghindari kegagalan usaha. Pengelola sebuah usaha juga perlu memperhatikan fungsi manajemen keuangan untuk meningkatkan kualitasnya. Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan yang saling terkait, yaitu keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen modal kerja (Risnaningsih, 2017). Cahyani (2021) berpendapat bahwa Pengelolaan keuangan, atau dikenal juga sebagai manajemen keuangan, merupakan suatu proses yang terlibat dalam mengatur segala aktivitas keuangan dalam sebuah organisasi. Proses ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan hingga analisis, serta pengendalian terhadap semua aspek keuangan yang relevan. Tujuan utama dari pengelolaan keuangan adalah untuk mencapai maksimalisasi nilai perusahaan dengan cara meminimalkan biaya dan mengelola alokasi dana secara efisien. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan berperan sebagai alat strategis yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan keuangan pelaku usaha. Dengan mengelola keuangan secara efisien, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan pelaku usaha sambil meminimalkan risiko dan biaya yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk menjalankan pengelolaan keuangan yang efektif sebagai bagian integral dari strategi keseluruhan pelaku usaha.

Pengelolaan keuangan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengkoordinasikan para pejabat keuangan dalam organisasi,

dengan tujuan memastikan penggunaan fungsi-fungsi manajemen yang efektif. Fungsi-fungsi tersebut meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan transaksi keuangan, pengeluaran dana, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Secara lebih luas, pengelolaan keuangan adalah serangkaian tindakan administratif yang terkait dengan perencanaan anggaran, pengelolaan simpanan, penggunaan dana, pencatatan transaksi, serta pengawasan terhadap arus masuk dan keluar dana organisasi (Ulfa et al., 2020). Lukum (2023) mengatakan bahwa manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan merupakan cara tentang bagaimana dalam mengelola keuangan agar bisa mendapatkan keuntungan dan untuk penggunaan terhadap sumber modal sebagai upaya untuk pengembangan usaha. Pengelolaan keuangan membutuhkan koordinasi yang efektif dari pemimpin organisasi untuk memastikan bahwa semua fungsi keuangan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan dana pelaku usaha, mengurangi risiko keuangan, dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin dan pejabat keuangan dalam organisasi untuk memahami dan melaksanakan tugas-tugas administratif yang terkait dengan pengelolaan keuangan secara efektif.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas maka dapat disintesiskan bahwa Pengelolaan keuangan usaha kecil merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan terkait dengan aspek keuangan dari suatu usaha kecil. Hal ini melibatkan pengelolaan semua sumber daya keuangan yang tersedia dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan dana, memaksimalkan laba, serta meminimalkan risiko keuangan. Pada tingkat usaha kecil, pengelolaan keuangan seringkali menjadi tanggung jawab langsung dari pemilik atau pengelola usaha. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan anggaran, pencatatan transaksi keuangan, pengeluaran dana, pengelolaan inventaris, pengumpulan piutang, pembayaran hutang, dan lain sebagainya.

Pengelolaan keuangan usaha kecil juga mencakup pemantauan kas yang masuk dan keluar, penilaian kinerja keuangan secara berkala, serta pengambilan keputusan strategis seperti investasi dalam pengembangan usaha, pembiayaan modal kerja, atau ekspansi ke pasar baru. Pengelolaan keuangan yang efektif sangat penting karena sumber daya keuangan seringkali terbatas. Dengan mengelola keuangan dengan bijak, usaha kecil dapat meningkatkan stabilitas

finansial pelaku usaha, memperluas kesempatan pertumbuhan, dan menjaga keberlangsungan operasional pelaku usaha dalam jangka panjang.

8.3 Manfaat Pengelolaan Keuangan

Gaol (2022) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan menjadi pondasi yang tak tergantikan dalam menjaga kelangsungan dan kemajuan perusahaan, terutama bagi UMKM. Salah satu instrumen yang paling vital dalam pengelolaan keuangan adalah akuntansi. Akuntansi tidak hanya sekedar pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga merupakan suatu proses sistematis yang menghasilkan informasi keuangan yang sangat berharga untuk pengambilan keputusan.

Manfaat pengelolaan keuangan usaha dengan akuntansi yakni:

1. Akuntansi memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan perusahaan. UMKM dapat melihat pendapatan, biaya, dan laba bersih dari waktu ke waktu. Analisis ini membantu pelaku usaha memahami tren keuangan dan mengidentifikasi area di mana pelaku usaha perlu meningkatkan efisiensi atau memperkuat strategi bisnis pelaku usaha.
2. melalui akuntansi, UMKM dapat memilah dan membedakan antara harta perusahaan dan harta pemilik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keuangan perusahaan tidak dicampur adukkan dengan keuangan pribadi pemilik. Dengan memahami perbedaan ini, UMKM dapat mengelola keuangan dengan lebih transparan dan menghindari masalah hukum atau pajak di masa depan.
3. akuntansi memberikan wawasan yang jelas tentang posisi dana perusahaan, baik sumber maupun penggunaannya. Hal ini membantu UMKM dalam merencanakan arus kas pelaku usaha dengan lebih baik, memastikan bahwa pelaku usaha memiliki cukup dana untuk mengoperasikan bisnis pelaku usaha dan untuk investasi masa depan.
4. dengan akuntansi yang tepat, UMKM dapat membuat anggaran yang lebih akurat dan realistis. Dengan memiliki anggaran yang baik, pelaku usaha dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien,

menghindari pemborosan, dan merencanakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

5. Akuntansi juga penting dalam menghitung dan mengelola pajak. UMKM perlu memahami kewajiban pajak pelaku usaha dan memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi semua persyaratan perpajakan yang relevan. Melalui akuntansi yang baik, pelaku usaha dapat menghindari sanksi atau masalah pajak di masa depan.
6. Akuntansi memungkinkan UMKM untuk memahami aliran uang tunai selama periode tertentu. Hal ini termasuk mengetahui sumber dan penggunaan kas, serta memprediksi arus kas di masa depan. Dengan pemahaman yang kuat tentang arus kas pelaku usaha, UMKM dapat mengelola likuiditas pelaku usaha dengan lebih baik, menghindari masalah keuangan yang tidak terduga, dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan pelaku usaha.

Fatwitawati (2018) mengatakan bahwa melihat manfaat yang dihasilkan akuntansi, pelaku UMKM seharusnya sadar bahwa akuntansi penting bagi perusahaan pelaku usaha. Penggunaan akuntansi dapat mendukung kemajuan UMKM khususnya dalam hal keuangan. Peningkatan laba juga dapat direncanakan dengan menggunakan akuntansi. Dengan tingkat laba yang semakin meningkat, perkembangan UMKM akan menjadi lebih baik sehingga UMKM akan benar-benar menjadi salah satu solusi bagi masalah perekonomian di Indonesia. Namun, masih banyak UMKM yang belum menggunakan akuntansi dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Alasan pelaku UMKM tidak menggunakan akuntansi antara lain adalah akuntansi dianggap sesuatu yang sulit dan tidak penting.

Adpaun manfaat dan urgensi dari pengelolaan keuangan bagi usaha kecil yakni:

1. Mengoptimalkan Penggunaan Dana
   Pengelolaan keuangan yang baik membantu usaha kecil dalam mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia. Hal ini berarti mengalokasikan dana secara efisien ke area yang paling penting bagi pertumbuhan dan keberhasilan bisnis. Dengan memprioritaskan pengeluaran dan investasi yang tepat, usaha kecil dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keuntungan pelaku usaha.

2. Meminimalkan Risiko Keuangan
   Pengelolaan keuangan yang baik membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keuangan. Hal ini termasuk risiko seperti likuiditas rendah, penurunan pendapatan, atau peningkatan biaya operasional. Dengan pemantauan yang cermat dan strategi manajemen risiko yang tepat, usaha kecil dapat mengurangi dampak dari risiko-risiko ini dan menjaga kestabilan keuangan pelaku usaha.
3. Menghadapi Tantangan Ekonomi
   Dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah, usaha kecil harus siap menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin terjadi. Pengelolaan keuangan yang baik mempersiapkan usaha kecil untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan membangun cadangan keuangan yang cukup, melakukan diversifikasi portofolio, dan memiliki rencana darurat yang solid.
4. Mengikuti Perkembangan Bisnis
   Pengelolaan keuangan yang efektif membantu usaha kecil dalam memantau dan memahami perkembangan bisnis pelaku usaha. Hal ini melibatkan analisis secara rutin terhadap laporan keuangan, memantau kinerja keuangan, dan mengevaluasi hasil dari strategi bisnis yang diimplementasikan. Dengan pemahaman yang baik tentang kesehatan keuangan pelaku usaha, usaha kecil dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja pelaku usaha.
5. Meningkatkan Akses Terhadap Pembiayaan
   Pengelolaan keuangan yang baik meningkatkan kredibilitas usaha kecil di mata kreditur dan investor potensial. Dengan memiliki catatan keuangan yang rapi dan transparan, usaha kecil memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan akses terhadap pembiayaan tambahan dari bank, lembaga keuangan, atau investor swasta. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi, inovasi, atau investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis.
6. Memenuhi Kewajiban Pajak dan Hukum
   Pengelolaan keuangan yang baik memastikan bahwa usaha kecil memenuhi semua kewajiban pajak dan hukum yang berlaku. Dengan

mengelola catatan keuangan secara teratur dan akurat, pelaku usaha dapat menghindari sanksi dan masalah hukum yang disebabkan oleh pelanggaran pajak atau peraturan keuangan. Hal ini membantu menjaga reputasi dan integritas bisnis pelaku usaha di mata pemerintah dan mitra bisnis.

7. Meningkatkan Keputusan Strategis
   Pengelolaan keuangan yang efektif memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan menganalisis laporan keuangan dan proyeksi bisnis, pemilik usaha kecil dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang investasi, ekspansi, atau restrukturisasi bisnis pelaku usaha. Hal ini membantu dalam mengarahkan usaha kecil menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan keberhasilan jangka panjang.

Pengelolaan keuangan bagi usaha kecil sangat penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dan keberlanjutan. Dengan memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan dengan bijak, pemilik usaha dapat mengurangi risiko, meningkatkan profitabilitas, dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan masa depan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus dianggap sebagai prioritas utama bagi setiap pemilik usaha kecil yang ingin mencapai tujuan bisnis pelaku usaha.

8.4 Pengelolaan Ekonomi Desa

Pengelolaan keuangan merupakan aspek kritis dalam menjalankan usaha kecil. Berbagai faktor dapat memengaruhi cara pengelolaan keuangan dilakukan dan keberhasilannya.

Faktor-faktor pengelolaan keuangan menurut Cahyani (2022); Ristiati (2022), Supriadi et al., (2023) yakni:

1. Modal Awal dan Ketersediaan Sumber Daya Finansial
   Salah satu faktor utama yang memengaruhi pengelolaan keuangan adalah modal awal yang tersedia bagi usaha kecil. Modal yang cukup memungkinkan pemilik usaha untuk melaksanakan operasional sehari-

hari dan menghadapi tantangan finansial yang mungkin timbul. Keterbatasan modal awal dapat menyebabkan pemilik usaha harus mencari solusi kreatif dalam pengelolaan keuangan pelaku usaha, seperti mencari sumber daya finansial tambahan melalui pinjaman atau investasi eksternal.

2. Pasar dan Persaingan
   Karakteristik pasar tempat usaha kecil beroperasi juga memengaruhi pengelolaan keuangan. Persaingan yang ketat dapat mengarah pada tekanan terhadap harga produk atau layanan, yang pada gilirannya memengaruhi margin keuntungan. Pengusaha harus memiliki pemahaman yang kuat tentang harga pasar dan strategi penetapan harga yang tepat agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan profitabilitas.
3. Siklus Kas
   Siklus kas adalah aliran masuk dan keluar uang dalam bisnis. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti musim, tren konsumen, dan kebijakan pembayaran pelanggan. Memahami dan mengelola dengan efektif siklus kas merupakan kunci dalam menjaga likuiditas usaha kecil. Pengelolaan kas yang buruk dapat mengakibatkan masalah pembayaran tagihan, hutang, atau bahkan kesulitan dalam menjalankan operasi sehari-hari.
4. Pajak dan Regulasi Keuangan
   Pajak dan regulasi keuangan dapat memiliki dampak signifikan pada pengelolaan keuangan usaha kecil. Memahami kewajiban pajak dan mematuhi peraturan keuangan yang berlaku merupakan hal penting untuk mencegah sanksi atau denda yang dapat menguras kas perusahaan. Kurangnya pemahaman tentang aspek-aspek ini dapat menyebabkan masalah hukum dan finansial yang serius.
5. Teknologi dan Sistem Informasi
   Perkembangan teknologi telah mengubah cara usaha kecil mengelola keuangan pelaku usaha. Sistem informasi keuangan yang efisien dapat membantu dalam pemantauan arus kas, pembuatan laporan keuangan, dan analisis performa bisnis secara menyeluruh. Namun, investasi

dalam teknologi seringkali merupakan beban tambahan bagi usaha kecil dengan sumber daya terbatas.

6. Manajemen Risiko
   Pengelolaan risiko keuangan merupakan aspek penting dalam menjalankan usaha kecil. Risiko seperti fluktuasi pasar, perubahan regulasi, atau masalah keuangan internal dapat memengaruhi stabilitas finansial perusahaan. Strategi manajemen risiko yang efektif termasuk diversifikasi portofolio, asuransi, dan rencana kontinjensi.
7. Keterampilan Manajemen dan Pendidikan Keuangan
   Tingkat pemahaman dan keterampilan manajemen keuangan yang dimiliki oleh pemilik usaha dan stafnya juga memainkan peran penting. Pelatihan dan pendidikan keuangan dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan keuangan yang cerdas, menganalisis laporan keuangan, dan mengelola risiko.
8. Perubahan Ekonomi dan Lingkungan Bisnis
   Perubahan dalam kondisi ekonomi global dan faktor-faktor eksternal lainnya dapat berdampak langsung pada usaha kecil. Perubahan nilai tukar, inflasi, atau kondisi politik dapat memengaruhi biaya bahan baku, harga produk, dan permintaan pasar. Fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas keuangan.

Kombinasi tentang kebutuhan finansial perusahaan, strategi manajemen risiko yang efektif, serta keterampilan manajemen keuangan yang kuat akan membantu usaha kecil untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang.

8.5 Balance Score Card Sebagai Penilaian Tata Kelola Keuangan dan Non Keuangan

Balanced Scorecard adalah sebuah alat manajemen jaman sekarang yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipatgandakan kinerja keuangan. *Balance scorecard* dapat dikatakan untuk melengkapi pengukuran kinerja. Terdapat beberapa aspek untuk pengukuran kinerja menggunakan metode balance scorecard yaitu perspektif keuangan, pelanggan, internal proses dan pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuan dan pengukuran *Balanced scorecard* bukan hanya penggabungan dari ukuran keuangan dan non keuangan melainkan merupakan hasil dari suatu proses atas bawah (top-down) berdasarkan misi dan strategi dari suatu unit usaha. Misi dan strategi tersebut harus dapat diterjemahkan dalam tujuan dan pengukuran yang lebih nyata (Wibowo, 2017).

Sagala & Siagian (2021) mengatakan bahwa penggunaan metode *balanced scorecard* dalam menilai kinerja perusahaan sangat baik untuk diterapkan dalam usaha pencapaian visi dan misi perusahaan dan juga perbaikan perusahaan kedepannya. Berfokus bukan hanya pada aspek keuangan saja balanced scorecard membantu menyelaraskan tujuan organisasi dengan pihak internal perusahaan secara konsisten. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Juga dikemukakan Mulyadi (2017) bahwa kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Kinerja non keuangan adalah kinerja yang menunjukkan pertumbuhan suatu perusahaan. Perusahaan dapat mengetahui tingkat keberhasilan perusahaannya dengan menggunakan analisis kinerja non keuangan. Menurut Nowak (2017), Kinerja non keuangan merupakan sebuah pendekatan yang menentukan tujuan serta berhubungan dengan visi dan strategi organisasi.

Balanced Scorecard menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam serangkaian sasaran dan pengukuran yang diorganisasikan ke dalam empat perspektif yaitu:

1. Perspektif Keuangan
   Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi dan implementasinya mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba bagi perusahaan Kaplan dan Norton (2000) menggolongkan tiga tahapan dari siklus kehidupan bisnis yaitu: tumbuh (growth), bertahan (sustain), dan menuai (harvest). Berikut ini merupakan uraian dari tahap-tahap dari siklus kehidupan bisnis yang ada: a) Growth merupakan tahapan awal dari siklus kehidupan bisnis. Perusahaan yang berada pada tahap ini umumnya menghasilkan produk-produk dengan prospek yang cukup cerah.
2. Perspektif pelanggan
   Pada pelanggan, perusahaan mengidentifikasikan dan mendefinisikan pelanggan dan segmen pasarnya. Perusahaan diharapkan mampu membuat suatu segmentasi pasar dan menentukan target pasarnya yang paling mungkin untuk dijadikan sasaran sesuai dengan kemampuan sumber daya dan rencana jangka panjang perusahaan. Perspektif ini memiliki beberapa pengukuran utama dari outcome yang sukses dengan formulasi dan penerapan strategi yang baik. Sasaran strategik dari perspektif pelanggan yaitu firm equity di antaranya adalah meningkatnya kepercayaan pelanggan atas produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan, kecepatan pelayanan yang diberikan, dan kualitas hubungan perusahaan dengan pelanggannya.
3. Perspektif proses bisnis internal
   Para manajer harus memfokuskan perhatiannya pada proses bisnis internal yang menjadi penentu kepuasan pelanggan pada kinerja perusahaan dari perspektif pelanggan. Kinerja dari perspektif tersebut diperoleh dari proses kinerja bisnis internal yang diselenggarakan perusahaan. Perusahaan harus memilih proses dan kompetensi yang menjadi unggulannya serta menentukan ukuran-ukuran untuk menilai kinerja-kinerja proses dan kompetensi tersebut. Sasaran stratejik dari

proses bisnis ini adalah organizational capital, seperti meningkatnya kualitas proses pelayanan kepada pelanggan, komputerisasi proses layanan kepada pelanggan, dan penerapan infrastruktur teknologi yang memudahkan pelayanan kepada pelanggan.

4. Perspektif pembelajaran dan Pertumbuhan
   Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Tujuan dalam perspektif ini adalah menyediakan infrastruktur bagi perspektif finansial, pelanggan, dan proses bisnis internal, agar tujuan dari perspektif-perspektif tersebut tercapai. Perspektif ini bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan, meningkatkan kapabilitas sistem informasi, dan peningkatan keselarasan dan motivasi. Ukuran yang bisa digunakan antara lain kepuasan karyawan, retensi karyawan, banyaknya saran yang diberikan oleh setiap karyawan, dan lainnya.

Analisis data juga dilakukan secara kuantitatif karena aspek Balance Scorecard tidak lepas dari hitungan skor Balance Scorecard. Menurut Galib dan Hidayat (2018) bahwa setiap aspek Balance Scorecard memiliki bobot penilaian tersendiri yakni untuk keuangan sebesar 35,00%. Untuk pelanggan sebesar 25,00% dan masing-masing sebesar 20,00% untuk perpektif bisnis internal dan perpektif pembelajaran dan pertumbuhan. Berikut ini adalah tabel skor penilaian untuk balanced scorecard menurut Galib dan Hidayat (2018) yakni:

Tabel 9.1: Skor Penilaian Balanced Scorecard

Nilai	Deskriptif	Presentase
5	Pencapaian Melebihi di atas Target	> 130%
4	Lebih Sedikit dari Target	111% - 130%
3	Hampir Sesuai dengan Target	91% - 110%
2	Tercapai Minimum Target	80% - 90%
1	Kurang atau Sangat Jauh dari Target	< 80%

Hasil analisis deskriptif untuk setiap perspektif dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Kinerja organisasi ditinjau dari perspektif keuangan
   Ukuran keuangan umumnya diwujudkan dalam profitabilitas, pertumbuhan dan shareholder value. Dalam penerapan Balanced Scorecard untuk pengukuran kinerja dari perspektif keuangan,

perusahaan perlu menentukan sasaran strategik yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan di bidang keuangan untuk berkaitan hidup, tolok ukur yang digunakan tergantung pada posisi perusahaan dalam daur hidup bisnis (business life cycle).

Adapun hasil analisis kinerja organisasi ditinjau dari perspektif keuangan pada Erby Shop disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 9.2: Analisis BSC Kinerja organisasi ditinjau dari perspektif keuangan

No	Uraian	Poin Aktual	Bobot	Skor	Total Skor
1	Rasio ROE	0.693	0.3149	4	1.2597
2	Rasio ROA	0.729	0.3312	5	1.6558
3	Rasio NPM	0.779	0.3539	5	1.7695
Keuangan			**1.0000**		**4.6851**
		93.701%			
		Hampir Sesuai dengan Target			

Sumber: Data diolah, 2024

Skor capaian untuk perspektif keuangan sebesar 93,701% yang berada pada kriteria "Hampir Sesuai dengan Target" yang artinya bahwa aspek keuangan Erby Shop cukup maksimal di mana penjualan yang dilakukan selama ini cukup stabil kecuali pada bulan November yang seringkali terjadi penurunan nilai penjualan. Aspek keuangan yang sudah sesuai target ini masih harus dimaksimalkan terutama dengan meningkatkan laba bersih karena asset yang dimiliki cukup besar sehingga penting untuk memaksimalkan kemampuan aset tersebut untuk diversifikasi produk agar menghasilkan laba yang lebih besar.

2. Kinerja organisasi ditinjau dari perspektif pelanggan

   Dalam lingkungan bisnis di mana customer memegang kendali, manajemen puncak mulai berkepentingan untuk mengukur kinerja perusahaan dari perspektif pelanggan. Balanced Scorecard menuntut manajer untuk menerjemahkan visi organisasi ke dalam sasaran-sasaran strategik yang benar-benar ditujukan untuk memuaskan kebutuhan customer. Kepentingan customer umumnya dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan: waktu (time), kualitas

(quality), kinerja dan layanan (performance and service), serta biaya (cost).

Adapun hasil analisis kinerja organisasi ditinjau dari perspektif pelanggan pada Erby Shop disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 9.3: Analisis BSC Kinerja organisasi ditinjau dari perspektif pelanggan

No	Uraian	Poin Aktual	Bobot	Skor	Total Skor
1	pelayanan yang memperhatikan kepuasan konsumen	0.821	0.1246	5	0.6230
2	peningkatan pelayanan yang berkualitas	0.829	0.1257	5	0.6284
3	tindak lanjut atas keluhan konsumen	0.750	0.1138	4	0.4550
4	menyelesaikan berbagai keluhan konsumen dengan cepat	0.821	0.1246	5	0.6230
5	pengenalan produk melalui testimoni pelanggan	0.786	0.1192	4	0.4767
6	mempromosikan usaha Erby Shop dengan baik	0.679	0.1029	3	0.3088
7	memiliki produk yang berkualitas	0.950	0.1441	5	0.7205
8	melakukan penjualan dengan harga promo untuk membuat konsumen puas	0.957	0.1452	5	0.7259
Pelanggan			**1.0000**		**4.5612**
		91.224%			
		Hampir Sesuai dengan Target			

Sumber: Data diolah, 2024

Skor capaian untuk kinerja organisasi ditinjau dari perspektif pelanggan berada pada kategori "Hampir Sesuai dengan Target" yakni sebesar 91,224% yang artinya mulai adanya tingkat loyalitas pelanggan yang tinggi pada Erby Shop yang dikarenakan pelayanan yang prima dan berbagai persepsi serta keunggulan Erby Shop dibandingkan dengan kompetitor dari usaha Erby Shop. Perbaikan pada aspek ini akan membawa pada tingkat loyalitas dari pelanggan yang akhirnya akan berdampak pada tingkat kinerja yang semakin maksimal terutama dalam konsistensi tingkat penjualan produk yang semakin bertumbuh.

3. Kinerja organisasi ditinjau dari perspektif bisnis internal

   Proses bisnis internal adalah serangkaian aktivitas yang ada dalam bisnis kita secara internal yang kerap disebut dengan value chain. Itu berarti perusahaan harus mengidentifikasikan proses bisnis yang tepat dan melakukan itu dengan tepat, agar tercapai kepuasan pelanggan.

Dan tugas para manajer untuk memfokuskan perhatiannya pada proses bisnis internal yang memengaruhi kepuasan pelanggan.

Adapun hasil analisis kinerja organisasi ditinjau dari perspektif bisnis internal pada Erby Shop disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 9.4: Analisis BSC Kinerja organisasi ditinjau dari perspektif bisnis internal

No	Uraian	Poin Aktual	Bobot	Skor	Total Skor
1	berupaya untuk melakukan perbaikan pada kualitas produk	0.779	0.1866	5	0.9332
2	pengembangan karyawan secara on the job agar paham mengenai penjualan	0.636	0.1524	3	0.4572
3	bonus untuk setiap pembelian pada jumlah tertentu	0.714	0.1712	5	0.8562
4	layanan purna jual yang baik	0.657	0.1575	5	0.7877
5	karyawan memiliki ketepatan dan kehandalan dalam bekerja	0.686	0.1644	5	0.8219
6	karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik	0.700	0.1678	5	0.8390
Bisnis Internal			**1.0000**		**4.6952**
		93.904%			
		Hampir Sesuai dengan Target			

Sumber: Data diolah, 2024

Skor capaian untuk kinerja organisasi ditinjau dari perspektif bisnis internal sebesar 93,904% yang berada pada kriteria yang "Hampir Sesuai dengan Target" sehingga dapat dikatakan bahwa aspek bisnis internal dari usaha Erby Shop memiliki kinerja yang sesuai dengan harapan sehingga dapat menimbulkan berbagai optimalisasi penjualan, di mana proses bisnis internal ini sebagai upaya untuk memperbaiki kekuatan dan peluang dari Erby Shop dalam menciptakan peluang untuk penjualan yang lebih progresif. Perspektif bisnis internal yang mampu dimaksimalkan oleh Erby Shop terutama dengan berbagai inovasi produk dan layanan maka akan berujung pada baiknya tingkat penjualan usaha.

4. Kinerja organisasi ditinjau dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

   Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengidentifikasikan infrastruktur yang harus dibangun oleh suatu perusahaan dalam

menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Adapun hasil analisis kinerja organisasi ditinjau dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada Erby Shop disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 9.5: Analisis BSC Kinerja organisasi ditinjau dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

No	Uraian	Poin Aktual	Bobot	Skor	Total Skor
1	beban kerja sesuai dengan kemampuan karyawan	0.800	0.2324	5	1.1618
2	memberikan gaji yang sesuai dengan keinginan karyawan	0.693	0.2012	5	1.0062
3	peningkatan kemampuan karyawan untuk kinerja Erby Shop makin optimal	0.736	0.2137	5	1.0685
4	operasional menggunakan Sistem Informasi	0.564	0.1639	4	0.6556
5	pimpinan sering memberikan motivasi, kekuasaan, dan keselarasan yang sesuai pada karyawan	0.650	0.1888	4	0.7552
Pertumbuhan dan pembelajaran			**1.0000**		**4.6473**
		92.946%			
		Hampir Sesuai dengan Target			

Sumber: Data diolah, 2024

Skor capaian kinerja organisasi ditinjau dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sebesar 92,946% yang berada pada kriteria "Hampir Sesuai dengan Target" yang artinya bahwa pengembangan usaha yang dilakukan pemilik Erby Shop pada usaha sudah mulai baik namun untuk manajemen usaha belum maksimal yang dikarenakan usaha Erby Shop pada dasarnya tidak begitu membutuhkan SDM handal namun SDM yang memiliki loyalitas yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya.

5. Hasil Analisis Total Balance Scorecard

   Adapun hasil analisis kinerja organisasi Erby Shop disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 9.6: Analisis BSC Kinerja organisasi Keseluruhan

No	Item BSC	Bobot Item	Bobot	Total Skor
1	Keuangan	35.00%	4.6851	1.6398
2	Pelanggan	25.00%	4.5612	1.1403
3	Bisnis Internal	20.00%	4.6952	0.9390
4	Pertumbuhan dan Pembelajaran	20.00%	4.6473	0.9295
Nilai Akhir		100.00%	**18.5888**	**4.6486**
		92.972%		
		Hampir Sesuai dengan Target		

Sumber: Data diolah, 2024

Secara keseluruhan skor Balance Scorecard dari kinerja organisasi Erby Shop sebesar 92,972% yang berada pada kriteria "Hampir Sesuai dengan Target" yang artinya bahwa kinerja dari Erby Shop masih sudah sesuai dengan harapan baik dalam aspek keuangan maupun non keuangan. Kinerja keuangan yang baik ini menjadi suatu jawaban bahwa bisnis Erby Shop memiliki progres untuk bertumbuh menjadi lebih besar dengan menjadi konsistensi penjualan. Kemudian dari aspek non keuangan juga sudah baik yang terlihat dari berbagai inovasi yang dilakukan pada proses bisnis internal, inovasi pada pelayanan kepada pelanggan bahkan inovasi untuk pertumbuhan dan pembelajaran untuk usaha yang lebih terdiversifikasi dan berkembang dengan baik.

Bab 10

Teknologi Keuangan

10.1 Pendahuluan Teknologi Keuangan

Perkembangan teknologi di dunia memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan umat manusia. Semua industri merasakan dampak yang signifikan dengan kehadiran teknologi yang semakin lama semakin berkembang dan maju, tidak terkecuali dengan industri keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita banyak diperkenalkan dengan yang namanya teknologi keuangan atau teknologi finansial, atau istilah yang mungkin familiar adalah financial technology (fintech). Teknologi keuangan yang mana gabungan dari dua kata teknologi dan keuangan merupakan pemberdayaan teknologi baru demi peningkatan proses layanan keuangan (Siddiqui & Rivera, 2022). Sementara itu dalam buku berjudul Teknologi Keuangan, istilah teknologi keuangan atau fintech adalah pemanfaatan inovasi di bidang teknologi pada sektor keuangan yang bertujuan untuk mencapai kualitas layanan keuangan yang terbaik untuk masyarakat (Saputra et al., 2023). Dari definisi tersebut, bisa dibayangkan tujuan baik dari teknologi keuangan terhadap kehidupan masyarakat agar efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan layanan keuangan dapat tercapai. Sederhananya, adanya teknologi keuangan memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran, memindahkan dana, menginvestasikan dana ke ragam instrumen investasi, pengajuan kredit pinjaman, dan masih banyak lagi hanya dengan menggunakan

perangkat teknologi seperti smartphone, laptop atau komputer, dan koneksi internet serta aplikasi dari perusahaan yang menawarkan layanan teknologi keuangan ini.

Sementara itu, teknologi keuangan di Indonesia yang berkembang semakin pesat membuat pemerintah merancang peraturan yang di dalamnya berisikan ruang lingkup dari teknologi ini. Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Pasal 3 Ayat 1, Bank Indonesia membagi ruang lingkup teknologi ini ke dalam lima kategori (Bank Indonesia, 2017), antara lain:

1. Sistem pembayaran, meliputi otorisasi transaksi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan transaksi pembayaran.
2. Pendukung pasar, yang di dalamnya adalah segala pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dalam upaya menyediakan informasi atas produk dan layanan keuangan secara efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya kepada masyarakat.
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko, yang termasuk di dalamnya adalah produk investasi dan asuransi secara dalam jaringan (daring).
4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, yang meliputi jasa pinjam meminjam uang dengan memanfaatkan teknologi informasi (peer-to-peer lending) maupun pembiayaan dan penghimpunan dana (crowd-funding).
5. Jasa finansial lainnya, yang tidak termasuk dalam empat kategori pertama sebelumnya.

Saat ini pemanfaatan teknologi keuangan oleh masyarakat sudah semakin luas. Memang, pengguna ragam teknologi keuangan saat ini masih tersebar di daerah yang memiliki fasilitas pendukung yang memadai seperti jaringan internet dan penyedia jasa atau produk teknologi keuangan. Tentunya penggunaan teknologi keuangan akan semakin banyak apabila semakin banyak masyarakat yang sadar akan tersedianya teknologi ini dan paham dengan benar manfaatnya. Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang tinggi akan mendapatkan manfaat yang lebih dengan adanya teknologi keuangan. Untuk itu, bab ini menjelaskan tentang teknologi keuangan, perkembangan dan evolusinya, jenis-jenis teknologi keuangan, manfaat dan risiko, hubungan antara teknologi keuangan dan literasi keuangan, serta tantangan dan prospek ke depan.

Diharapkan pembaca dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang bermanfaat terkait dengan teknologi keuangan dari bab ini.

10.2 Perkembangan Teknologi Keuangan

Teknologi keuangan atau fintech mengalami evolusi perkembangan yang tidak sebentar. Memang dalam satu dekade ini teknologi keuangan semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat seiring dengan akses teknologi dan internet yang semakin mudah dan murah. Selain itu, pandemi COVID-19 yang sempat merebak di seluruh dunia membuat teknologi keuangan semakin cepat berkembang. Banyak perusahaan yang menawarkan teknologi keuangan mereka dengan berbagai fungsi dan manfaat yang ditawarkan untuk diadopsi oleh masyarakat. Namun, jika melihat ke belakang, sejarah perkembangan teknologi ini sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Teknologi ini telah berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Secara garis besar, evolusi teknologi ini dikelompokkan dalam lima periode seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10.1 berikut:

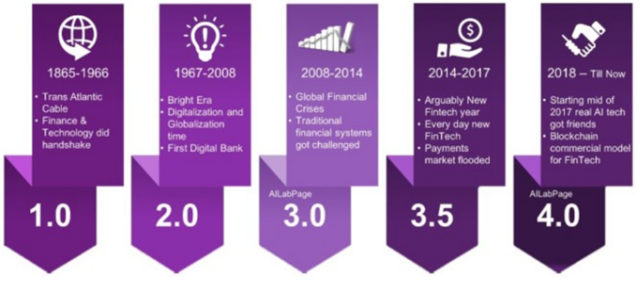

Gambar 10. 1 Sejarah Teknologi Keuangan - Fintech 1.0 s.d. 4.0 (AILabPage dalam Zigurat Institute of Technology, 2022)

Selain itu, diambil dari beberapa sumber berikut adalah tahun atau periode penting dari evolusi perkembangan teknologi keuangan di dunia (lihat Tabel 10.1):

Tabel 10. 1 Evolusi Teknologi Keuangan (Fintech) dari Masa ke Masa (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, n.d.-b; Hanafi, 2021; Hidayati, 2022; Zigurat Institute of Technology, 2022)

Tahun	Evolusi Teknologi Keuangan yang Muncul
1866	Kabel telegraf yang melintasi transatlantik dipasang
1918	Fedwire, sistem transfer dana elektronik pertama dengan bantuan telegraf dan kode morse
1950-an	*Diners Club Card* (*Charge Card*) dan Kartu kredit yang pertama dikeluarkan oleh perusahaan American Express
1967	*Automatic Teller Machine* (ATM) pertama kali beroperasi
1990-an	Munculnya internet, *e-commerce* mulai bermunculan; PayPal didirikan sebagai rekening virtual dengan fitur awal jasa transfer dan pembayaran secara daring atau *online*
2008	Terjadi krisis ekonomi, berakibat banyak bank tradisional tutup dan mulai digantikan oleh banyak perusahaan keuangan rintisan (*start-up*)
2009	Lahirnya mata uang kripto, Bitcoin disusul oleh ragam mata uang kripto lainnya; *smartphone* banyak bermunculan yang dapat mengakses ragam aplikasi perbankan online seperti *mobile banking*
2014	Semakin banyak perusahaan fintech yang bermunculan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia
2017 - sekarang	Munculnya teknologi Blockchain disusul ragam bank digital; teknologi AI khususnya terkait keuangan semakin maju dengan pesat

Dari gambar dan tabel di atas, dapat dilihat sejarah panjang dari evolusi teknologi keuangan dari awal hingga berkembang menjadi seperti sekarang ini. Namun, evolusi teknologi ini tentu tidak sampai di saat sekarang ini saja. Selama teknologi semakin maju, maka teknologi keuangan pun akan terus berevolusi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa virus COVID-19 yang mucul di akhir tahun 2019 dan merebak luas ke seluruh dunia pada tahun 2020 membuat teknologi keuangan semakin berkembang dan digunakan. Mobilitas masyarakat yang dibatasi dengan aturan yang berlaku saat itu membuat masyarakat memanfaatkan layanan jasa dari beberapa perusahaan teknologi keuangan, seperti sistem pembayaran dan pinjaman uang. Sebagai contoh, layanan e-wallet atau dompet digital yang memiliki daya tarik dari segi fungsionalitas, aksesibilitas yang mudah, serta fungsi manajemen uang menjadi salah satu layanan fintech yang populer di masyarakat, khususnya bagi orang muda (Aseng & Pandeirot, 2023) pada masa itu yang berlanjut hingga sekarang. Kemudian, pada dekade ini teknologi AI atau kecerdasan buatan mulai berkembang dan ini mulai berdampak pada perkembangan teknologi keuangan.

Karena itu, tidak dapat dibayangkan perkembangan teknologi ini kedepannya yang tentu akan merubah cara hidup masyarakat, khususnya dalam hal keuangan.

Perkembangan teknologi keuangan tentu perlu dibarengi dengan regulasi yang mengatur agar semua pihak terkait akan merasa aman dan terlindungi dalam menggunakan layanan teknologi ini. Memang saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus teknologi keuangan (Hakim & Hapsari, 2022). Namun, sebagai tahap awal pemerintah Indonesia telah menunjuk dua pihak regulator yang bertanggung jawab terhadap regulasi teknologi ini yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dua regulator ini telah mengeluarkan regulasi dalam bentuk peraturan-peraturan seperti yang dirangkum oleh Hakim dan Hapsari (2022) dan dari laman OJK, di antaranya:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37 tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Uang Elektronik
7. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Lebih lanjut, dijelaskan dalam laman Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dua regulator ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing. BI saat ini mengatur tiga hal: penyelenggaraan fintech, uang elektronik, dan Regulatory Sandbox. Sementara OJK lebih kepada pengawasan dan pengaturan terhadap layanan pinjam meminjam uang (peer-to-peer lending) sekaligus tata

kelola dan manajemen risikonya (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, n.d.-a).

10.3 Jenis-Jenis Teknologi Keuangan

Produk dan jasa layanan teknologi keuangan sudah berkembang dan banyak digunakan oleh masyarakat, baik secara individu maupun perusahaan. BI (dalam Setiyono et al., 2021) membagi teknologi keuangan ke dalam empat jenis yaitu: peer-to-peer lending dan crowdfunding, manajemen risiko investasi, payment clearing and settlement, dan market aggregator. Sementara itu, OJK menyebutkan sedikitnya enam jenis teknologi keuangan, diantaranya: crowdfunding, microfinancing, peer-to-peer lending service, market comparison, dan sistem pembayaran digital. Berikut ini adalah beberapa jenis teknologi keuangan yang sedang berkembang di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber:

10.3.1 Sistem Pembayaran

Teknologi keuangan sistem pembayaran pada intinya adalah teknologi yang dikembangkan untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi pembayaran (Hakim & Hapsari, 2022). Pada kategori ini, beberapa jenis teknologi keuangan yang berkembang adalah gerbang pembayaran (payment gateway), dompet digital (e-wallet), dan uang elektronik (e-money). Payment gateway merupakan teknologi keuangan yang berfungsi sebagai pengesahan segala pembayaran non-tunai menggunakan kartu kredit dan debit bahkan e-wallet yang biasanya ketika pembayaran akan dikonfirmasi maka kode One-Time-Password (OTP) akan dikirimkan ke smartphone pengguna untuk dimasukkan ke payment gateway (Rukmana et al., 2024). Kode ini bersifat rahasia dan hanya bisa digunakan sekali dalam satu transaksi yang tujuannya untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan transaksi.

Kemudian, dompet digital atau populer disebut e-wallet merupakan teknologi keuangan yang punya fungsi seperti dompet fisik yaitu untuk menyimpan uang namun secara elektronik melalui aplikasi e-wallet sehingga dapat digunakan untuk transaksi pembayaran secara non-tunai (Aseng & Pandeirot, 2023). Biasanya aplikasi e-wallet dapat diunduh ke dalam smartphone pengguna dan setelah melakukan registrasi dan pengisian saldo uang maka e-wallet sudah

dapat digunakan. Penggunaan e-wallet dalam transaksi pembayaran semakin meningkat seiring dengan pembaruan fitur aplikasi, adopsi penggunaan e-wallet oleh pembeli, penerimaan metode pembayaran ini oleh penjual, hingga pergeseran budaya belanja yang sekarang serba online melalui marketplace atau e-commerce. Masyarakat pada zaman sekarang ini khususnya generasi muda menginginkan transaksi pembayaran yang cepat dan nyaman. Sehingga, penyedia produk dan layanan e-wallet menawarkan keunggulan utama dari layanan ini yaitu kenyamanan dan kemudahan (user-friendly) dibandingkan transaksi tunai (Agarwal & Zhang, 2020). Beberapa contoh e-wallet yang ada di Indonesia antara lain: Gopay, DANA, ShopeePay, dan OVO.

Yang terakhir adalah uang elektronik atau e-money yang pemanfaatannya sebenarnya sama dengan e-wallet yaitu untuk transaksi pembayaran, namun memiliki karakteristik yang berbeda. E-money merupakan uang atau dana yang disimpan secara elektronik melalui media yang dimiliki oleh pengguna dan biasanya hanya perlu otorisasi secara offline (Usman, 2017). Usman (2017) lebih lanjut menjelaskan e-money bisa berbentuk kartu yang memiliki chip seperti kartu debit tetapi perlu diisi saldo nilai uangnya atau seperti software yang dapat dipasang pada komputer pemilik. E-money biasanya digunakan untuk membayar tempat parkir di pusat perbelanjaan, masuk jalan tol, maupun angkutan publik seperti tiket kereta dan bis yang menerima metode pembayaran ini. Selain itu, e-money juga dikeluarkan oleh bank-bank komersial seperti Brizzi oleh BRI, Flazz dari BCA, BNI Tap-Cash, dan Mandiri e-money atau oleh perusahaan lain seperti Indomaret dan E-Toll card (Hartono, 2024). Penggunaan e-money sendiri lebih terbatas dibandingkan e-wallet yang lebih luas karena e-wallet dapat digunakan untuk transfer uang hingga belanja online (Rukmana et al., 2024). Namun, hal ini tidak menyurutkan minat masyarakat dalam menggunakan e-money karena fungsionalitas dan kemudahan yang ditawarkan, khususnya ketika melakukan pembayaran parkir dan jalan tol.

10.3.2 Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal

Kategori yang kedua ini memberikan alternatif pembiayaan dan pendanaan bagi individu maupun usaha untuk berkembang. Pada kategori ini, beberapa jenis teknologi keuangan yang muncul yaitu: peer-to-peer (P2P) lending, crowdfunding, dan microfinancing. P2P lending merupakan platform layanan teknologi keuangan pembiayaan yang memfasilitasi pemilik dana untuk meminjamkan sejumlah dana kepada pihak lain secara online (Saputra et al., 2023). Dari sumber yang sama menerangkan bahwa P2P lending memiliki

kelebihan yaitu bunga kredit yang rendah, return yang kompetitif bagi pemilik dana, dan proses pengajuan yang mudah. Perlu diketahui bahwa ternyata P2P lending berbeda dengan pinjaman online atau pinjol. Jika P2P lending merupakan perantara bagi pihak yang memiliki dana lebih untuk dipinjamkan, dana pinjol berasal dari satu pihak biasanya perusahaan. Kemudian, P2P lending memiliki izin dari OJK untuk beroperasi sementara pinjol kebanyakan ilegal (Wiranto, 2021) meski ada pula yang memiliki legalitas usaha. Selain itu, biasanya pinjol ilegal menawarkan produk mereka melalui pesan singkat SMS atau di website sehingga masyarakat perlu berhati-hati dengan pinjol yang ilegal. Cara sederhana untuk mengetahui legalitasnya adalah mencari di laman pencarian seperti Google apakah layanan tersebut terdaftar dan memiliki izin dari OJK atau tidak. Beberapa perusahaan P2P lending di Indonesia yaitu: Amartha, Investree, dan KoinWorks.

Berikutnya adalah crowdfunding yang merupakan platform penyediaan modal untuk individu maupun perusahaan rintisan atau start-up. Platform ini populer terutama bagi pihak yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha maupun kebutuhan pribadi. Jenis teknologi keuangan ini berbeda dengan P2P lending karena crowdfunding merupakan penggalangan dana secara publik dan masyarakat atau investor yang tertarik dapat memberikan modal dengan imbalan kepemilikan saham, souvenir perusahaan, atau tanpa imbalan. Dari sisi penerima dana, mereka tidak terbebani dengan utang dan bunga yang harus dikembalikan (Rukmana et al., 2024). Beberapa contoh layanan crowdfunding adalah Kickstarter, Kitabisa, dan LandX.

Ada satu lagi teknologi keuangan yang memberikan atau memfasilitasi pembiayaan, yaitu pembiayaan mikro atau microfinancing. Microfinancing merupakan produk dan layanan keuangan yang dikhususkan kepada masyarakat berpendapatan rendah dan usaha skala mikro kecil (Dang & Vu, 2020) yang biasanya sulit untuk mengakses layanan perbankan. Dari definisi ini, sudah jelas bahwa microfinancing diperuntukkan bagi mereka yang memiliki usaha kecil yang sederhana dan butuh dana untuk berkembang lebih lanjut serta rumah tangga yang berpenghasilan kecil dan butuh dana yang membutuhkan keperluan dasar. Karena peruntukannya untuk masyarakat dan usaha kategori tersebut, maka biasanya tingkat bunganya rendah agar terjangkau dan tidak memberatkan penerima pembiayaan.

10.3.3 Manajemen Investasi dan Risiko

Layanan teknologi keuangan manajemen investasi dan risiko adalah layanan yang menawarkan produk dan jasa manajemen investasi dan pengendalian risiko seperti asuransi secara online (Hakim & Hapsari, 2022). Layanan ini memberikan rekomendasi perencanaan keuangan hingga produk asuransi yang cocok dengan profil risiko pengguna. Selain itu, beberapa perusahaan sudah mengembangkan layanan ini dengan menawarkan produk investasi reksa dana dan saham secara online menggunakan aplikasi smartphone atau website. Pada aplikasi tersebut biasanya ada pilihan investasi virtual untuk belajar tanpa menggunakan uang nyata. Ini tentu saja memberikan kemudahan bagi investor ritel atau pribadi yang tertarik belajar investasi saham sebelum terjun langsung berinvestasi. Beberapa contoh layanan manajemen investasi dan risiko ini adalah Rajapremi (untuk asuransi), Stockbit serta Bareksa (untuk investasi). Tentu saja dalam memilih layanan ini perlu ditelusuri izin operasional resmi dari OJK agar tidak tertipu.

10.3.4 Market Aggregator/Market Comparison

Teknologi keuangan market aggregator atau market comparison ini merupakan jenis layanan teknologi keuangan yang memberikan informasi dan saran terkait keuangan kepada pengguna sehingga mereka dapat melihat perbandingan dari beberapa produk dan layanan sebelum memilih (Setiyono et al., 2021). Beberapa contoh penyedia layanan ini adalah Lifepal dan Cekaja. Biasanya produk dan layanan yang dibandingkan seperti produk asuransi, kartu kredit, investasi, tabungan dan lainnya (Hakim & Hapsari, 2022). Adanya layanan ini memudahkan pengguna untuk memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan tujuan keuangan pribadi. Selain itu, layanan ini juga bisa dikatakan membantu masyarakat dalam meningkatkan literasi keuangan sehingga tidak mudah terjerumus dalam kesalahan investasi atau penipuan.

10.4 Manfaat dan Risiko Teknologi Keuangan

Sejak awal kemunculannya, teknologi keuangan memiliki tujuan untuk menjadi solusi dari masalah terkait akses keuangan yang muncul. Seiring dengan berkembangnya teknologi ini yang disertai dengan semakin banyak pihak yang menggunakannya, maka manfaat dari teknologi keuangan semakin beragam.

Berikut ini adalah beberapa manfaat kehadiran dari teknologi keuangan:

1. Transaksi keuangan semakin mudah dan cepat. Adanya teknologi keuangan memfasilitasi transaksi keuangan, pembelian dan pembayaran barang, atau transaksi lainnya dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, hasil studi menemukan bahwa pengguna layanan teknologi keuangan merasakan manfaat dari bagaimana mudahnya mempelajari penggunaan layanan teknologi ini (Aseng, 2020) sehingga mereka bisa cepat belajar dan mengerti penggunaannya yang dengan begitu memberikan manfaat bagi mereka ketika melakukan pembayaran atau mentransfer uang untuk keperluan pribadi maupun bisnis.
2. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Penggunaan teknologi keuangan berperan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Kakinuma (2023) menyatakan bahwa semakin sering produk dan layanan teknologi keuangan digunakan, maka masyarakat semakin mengerti fungsi dan manfaat dari teknologi ini yang berujung pada meningkatnya literasi keuangan mereka. Kemudian, layanan teknologi ini bisa dibilang lebih murah dan lebih mudah diakses semua kalangan sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakannya (Saputra et al., 2023). Dengan kata lain, inklusi keuangan masyarakat pun turut meningkat.
3. Inovasi. Teknologi keuangan sama seperti karakteristik dari teknologi itu sendiri yaitu inovasi. Perkembangan teknologi keuangan tidak lepas dari inovasi. Dan adanya teknologi ini turut membantu munculnya ragam inovasi keuangan dalam bentuk produk maupun

layanan baru yang akan berdampak positif terhadap industri keuangan serta semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang menggunakan (Saputra et al., 2023). Sebagai contoh, pengguna teknologi keuangan dapat memperoleh akses pilihan produk serta layanan keuangan yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan saat ini.

4. Efisiensi operasional. Bagi perusahaan penyedia produk dan layanan teknologi keuangan, adanya teknologi ini membantu mereka juga dalam pengoperasian layanan yang lebih efisien, dari segi biaya maupun waktu (Saputra et al., 2023). Perusahaan teknologi keuangan tidak perlu berinvestasi pada banyak kantor cabang dan karyawan seperti perusahaan keuangan tradisional lainnya. Selain itu, perusahaan teknologi keuangan dapat segera menyediakan produk dan layanan mereka dengan cepat kepada masyarakat secara real time. Karena mengandalkan teknologi dan layanan internet juga, maka akses terhadap layanan ini dapat dilakukan kapanpun dan di manapun oleh masyarakat tanpa perlu jauh-jauh ke kantor fisiknya.
5. Akses terhadap modal. Teknologi keuangan membuka kesempatan masyarakat untuk memperoleh modal untuk usaha atau keperluan lain. Fenwick, McCahery dan Vermeulen (2017) menjelaskan bagaimana perusahaan teknologi keuangan menawarkan sumber dana alternatif bagi pelaku usaha skala mikro, kecil, bahkan menengah (UMKM) selain bank tradisional. Bagi pelaku UMKM, alternatif sumber pendanaan seperti perusahaan teknologi keuangan ini memudahkan mereka untuk mendapatkan suntikan modal usaha dengan mudah dan cepat.

Dalam penggunaannya juga, produk dan jasa teknologi keuangan memiliki risiko yang perlu diketahui. Dari beberapa sumber (Kovas, n.d.; Saputra et al., 2023; Tedja, 2019), beberapa risiko yang perlu diwaspadai oleh pengguna adalah:

1. Keamanan dan privasi data pengguna yang bisa berpotensi bocor dan disalahgunakan,

2. Masih ada beberapa perusahaan yang layanan konsumennya belum maksimal karena keterbatasan sumber daya,
3. Risiko kegagalan bayar dana pinjaman, pencucian dana yang bisa disalahgunakan seperti dikorupsi atau terorisme,
4. Beberapa layanan masih memberikan informasi yang belum lengkap.

Bisa dikatakan segala sesuatu pasti ada risikonya apa lagi ini berkaitan dengan teknologi keuangan yang masih akan terus berkembang. Tentu sebagai pengguna teknologi ini harus mewaspadai ragam risiko tersebut sehingga tahu apa yang dapat dilakukan. Tentu saja peran dari pemerintah sangat dibutuhkan dengan memberikan payung hukum dan menyediakan perlindungan bagi konsumen maupun penyedia layanan ini secara adil dan objektif.

10.5 Teknologi Keuangan dan Literasi Keuangan

Inovasi teknologi keuangan di Indonesia diharapkan dapat mendukung literasi keuangan masyarakat. Ini mulai menunjukkan hasil di mana kehadiran teknologi keuangan membantu peningkatan literasi atau pemahaman keuangan dari masyarakat (Hakim & Hapsari, 2022; Kakinuma, 2024). Ketika masyarakat menggunakan salah satu jenis produk atau layanan teknologi keuangan yang ada, maka mereka akan belajar cara penggunaannya dan apa manfaat keuangan yang diperoleh yang mana membuat pemahaman keuangan mereka semakin berkembang. Misalnya, ketika seseorang menggunakan aplikasi e-wallet, maka dia akan belajar cara penggunaannya. Setelah dia tahu menggunakannya maka pada proses selanjutnya dia akan belajar untuk mengatur pengeluarannya. Demikian pula, ketika seseorang menggunakan aplikasi investasi online dan belajar cara berinvestasi saham, maka dia akan belajar lebih lanjut dasar-dasar berinvestasi saham dan manfaat serta risikonya. Hal ini tentu akan meningkatkan kesadaran seseorang terhadap manajemen keuangan sehingga meningkatkan literasi keuangan pribadi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan keuangan.

Tentu saja harapan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Melalui peta

jalan dari strategi nasional ini, pemerintah Indonesia menginginkan peningkatan literasi keuangan agar dapat selaras dengan tingkat inklusi keuangan masyarakat. Sehingga, dampak negatif dari kurangnya literasi keuangan seperti terjebak dalam penipuan investasi bodong dan pinjaman online ilegal dapat diturunkan atau bahkan dicegah. Dengan begitu, harapan masyarakat yang sejahtera dan berwawasan dapat tercapai.

10.6 Tantangan dan Prospek Teknologi Keuangan

Seiring dengan perkembangan dan peningkatan layanan teknologi keuangan, pastinya tidak akan terlepas dari berbagai tantangan yang sementara dan akan dihadapi pada masa mendatang. Dari beberapa sumber (Hiyanti et al., 2020; Mangkona et al., 2023), berikut adalah tantangan-tantangan teknologi keuangan:

1. Ancaman keamanan siber yang bisa menimbulkan potensi kebocoran data pengguna. Data yang tersimpan secara virtual bisa berpotensi bocor karena ancaman peretas dan pihak internal yang dengan sengaja membocorkan data pengguna untuk kepentingan pribadi.
2. Layanan teknologi keuangan ilegal membuat masyarakat skeptis dengan layanan dan produk yang legal. Tidak sedikit masyarakat yang terjebak dengan produk teknologi keuangan ilegal sehingga membuat mereka menjadi ragu-ragu menggunakan yang legal.
3. Masyarakat khususnya di kota kecil dan pedesaan masih belum sadar akan adanya produk dan layanan teknologi keuangan serta belum paham manfaatnya. Biasanya karena informasi dan sosialisasi teknologi keuangan belum mereka peroleh atau masih minim sehingga teknologi keuangan kurang dikenal di sejumlah daerah.
4. Infrastruktur pendukung di beberapa daerah di Indonesia yang belum siap. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, membuat pembangunan infrastruktur seperti jaringan internet dan telepon membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini membuat

jaringan telepon dan internet di beberapa daerah belum selancar daerah lainnya.
5. Persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan tradisional dalam menjaring pengguna. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap teknologi keuangan membuat preferensi terhadap bank-bank dan lembaga keuangan tradisional lainnya masih kuat dan menimbulkan persaingan yang ketat.

Terlepas dari ragam tantangan yang ada, teknologi keuangan tetap memiliki prospek yang menjanjikan. Dari sumber-sumber yang ada (Hiyanti et al., 2020; Mangkona et al., 2023; Suryono et al., 2020), peluang teknologi keuangan yaitu:

1. Regulasi dari pemerintah yang semakin mendukung perkembangan teknologi keuangan.
2. Kerjasama dan kolaborasi dengan pihak lain dalam menawarkan produk dan layanan kepada masyarakat.
3. Kampanye dan sosialisasi produk dan layanan teknologi keuangan yang semakin gencar dilakukan.
4. Teknologi keamanan data yang berkembang dapat membantu teknologi keuangan untuk mencegah kebocoran data pengguna.

Untuk menghadapi tantangan sekaligus menangkap peluang yang ada, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan beberapa sumber (Hiyanti et al., 2020; Mangkona et al., 2023; Suryono et al., 2020) antara lain:

1. Perusahaan penyedia produk dan layanan teknologi keuangan perlu untuk memperkuat sistem keamanan dan memperketat otorisasi sehingga dapat mencegah kebocoran data.
2. Edukasi melalui media cetak dan elektronik perlu dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui perbedaan teknologi keuangan yang legal dan ilegal sehingga tidak ragu lagi untuk menggunakan yang legal.
3. Kolaborasi dari pemerintah dan penyedia produk dan layanan ini sangat dibutuhkan untuk memperkenalkan teknologi keuangan kepada masyarakat.

4. Pembangunan infrastruktur pendukung perlu dipercepat agar teknologi keuangan dapat dijangkau luas oleh masyarakat Indonesia.
5. Strategi pemasaran yang tepat bagi teknologi keuangan untuk bersaing dan memperoleh pengguna.

Dari apa yang sudah dibahas di atas, teknologi keuangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak produk dan layanan teknologi keuangan yang muncul dan bersaing untuk menggaet pengguna sehingga saat ini masyarakat dapat leluasa memilih produk dan layanan yang sesuai. Memang ada beberapa risiko dan tantangan yang dihadapi, namun manfaat dan peluang yang menjanjikan membuat teknologi keuangan semakin berkembang dan semakin mendapat tempat di masyarakat. Diperlukan beberapa langkah strategi yang tepat untuk kemajuan teknologi keuangan khususnya di Indonesia sehingga dapat menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Bab 11

Etika dalam Keuangan

11.1 Apa itu Etika dalam Keuangan?

Etika di bidang keuangan memadukan kebenaran, integritas, kejujuran, keadilan dan kewajaran dalam semua jenis aktivitas keuangan. Etika keuangan sendiri sebenarnya merupakan bagian dari etika umum. Etika tersebut sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam jasa keuangan, di mana masyarakat saling berinteraksi satu sama lain dan melakukan segala macam transaksi keuangan atau moneter.untuk memahami hal ini dengan lebih baik, mari kita selami kedua istilah tersebut secara terpisah

11.2 Apa yang Dimaksud dengan Keuangan?

Keuangan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang pasar dan sumber daya keuangan lainnya misalnya pasar keuangan, investasi , insider trading , dan lain sebagainnya. Bidang keuangan itu beragam dan ini terutama tentang definisi atau keterkaitan banyak faktor seperti uang, risiko,dan waktu. Ini adalah aset yang berbentuk uang dengan bank bertindak sebagai perantara utama.

Dalam domain pasar keuangan ada sejumlah besar kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana moneter. Tulang punggung ini dapat membantu dan mengarahkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

Perusahaan dapat menggunakan ini sebagai metrik untuk mengetahui posisi mereka di pasar dan memanfaatkannya untuk memenangkan posisi atas yang lain. Pengetahuan tentang keuangan juga penting untuk membuat investasi, akuisisi dan keputusan lainnya di masa depan. Ini adalah jantung dan otak dari setiap organisasi dan harus diikuti dengan hati-hati.

11.3 Apa yang Dimaksud dengan Etika Keuangan?

Etika mengatur perilaku manusia bisa benar atau salah. Etika pada umumnya membentuk sikap seseorang dalam melakukan hal yang benar, dan terkadang ditentukan dalam bentuk etika bisnis dalam kaitannya dengan etika profesi dan organisasi. Perusahaan terutama didasarkan pada kebutuhan dan arahan keuangan maka perusahaan harus mengikuti jalur etika menuju masa depan.

Hal ini dapat dicapai baik secara internal maupun eksternal, sehingga menghasilkan lingkungan yang sesuai untuk karyawan, pemangku kepentingan serta posisi pasar. Etika adalah salah satu aspek yang paling kritis dan rumit dari suatu organisasi. terutama dalam domain seperti keuangan, Ada ’benar’ atau ”salah” yang terkait dengan tindakan manusia berdasarkan moralitas konvensional organisasi dan etika bisnis. Etika keuangan sangat penting karena skandal yang tak terhitung jumlahnya dan masalah etika industri keuangan. Etika di sektor keuangan terutama berkisar pada penanganan informasi material non publik dan pelaporan tindakan tidak etis.

Sangat penting untuk semua bisnis menjunjung tinggi standar etika dalam kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dengan menjadi sadar, terdidik, dan memegang standar moral yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, perusahaan, bisnis atau keuangan dan menyelesaikan segala macam tindakan dan kepentingan yang tidak etis.

11.4 Pentingnya Etika dalam Keuangan

Setelah kita membahas dasar-dasar istilah etika dan keuangan, mari kita bahas kebutuhan etika dalam industri keuangan dan jasa saat menangani krisis yang terkait dengan etika:

1. Menyediakan standar Kode Etik.
   Pasar keuangan, beberapa hambatan berkisar dari informasi yang tidak setara penyalahgunaan kekuasan dan sumber daya dan lain sebagainya. Dalam kasus kasus seperti itu dan kasus kasus yang melibatkan koneksi pihak ketiga ada kebutuhan yang sangat mendesak akan kode yang tepat untuk diikuti dalam industri ini. Dari investasi hingga perdagangan saham hingga kegiatan ekonomi perusahaan atau sistem keuangan, semua mengikuti kode etik dalam semua transaksi mereka.
2. Etika dalam keuangan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi bisnis/perusahaan.
   Tujuan utama dari industri keuangan adalah berhubungan langsung dengan industri. Ini secara langsung berhubungan dengan klien mereka dalam bentuk pengiriman produk atau layanan di mana mereka berharap untuk memenangkan kepercayaan mereka.
   Terlepas dari tujuan utama untuk mempertahankan status kompetitif dalam industri, mereka melakukannya dengan alasan etika. Selain praktek praktek seperti itu, menjadi benar secara etis akan memberikan keuntungan yang baik bagi bisnis dalam jangka panjang.
3. Etika membuat perilaku dan aktivitas bisnis/korporasi menjadi harmonis.
   Dalam industri keuangan, kita bisa mengharapkan banyak orang menjadi bagian dari suatu organisasi. karena mereka harus bekerja sama pada tingkat yang berbeda dan menuju tujuan inti yang sama, maka harus ada seperangkat aturan dan pedoman etika yang harus diikuti. Hal ini akan membantu dalam manajemen yang tepat dan produktivitas yang lebih tinggi dari para karyawan.

11.5 Permasalahan Etika di bidang Keuangan

Masalah etika yang memngaruhi proses pengelolaan keuangan antara lain:

1. Penipuan keuangan dan korupsi
2. Pencurian dan Penggelapan Karyawan
3. Pedagang
4. Konflik kepentingan dalam keputusan investasi
5. Manipulasi pasar dan kekayaan
6. Penipuan akuntansi dan transaksi
7. Kekeliruan penyajian laporan keuangan
8. Penghindaran pajak
9. Pencurian dana

Menghindari tantangan tantangan utama terkait etika ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan bersifat etis dan dapat dipercaya.

11.6 Kode Etik dalam Keuangan

Kode etik yang berbeda yang seharusnya diikuti oleh perilaku perusahaan yang berhubungan dengan keuangan terhadap karyawan pelanggan, publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Berikut adalah kode etik dalam ilmu keuangan:

1. Bertindak dengan kejujuran dan integritas saat menangani dilema dunia keuangan.
2. Tidak mengaitkan diri dengan konflik kepentingan yang nyata/jelas dalam hubungan pribadi, atau perusahaan.
3. Memberikan informasi yang lengkap,akurat, adil, relevan, obyektif dapat dimengerti dan tepat waktu dalam dan untuk berbagai dokumen dan laporan

4. Bertindak sesuai dengan semua aturan, hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku bersama dengan badan pengatur publik/swasta lainnya yang relevant.
5. Bertindak secara bertanggung jawab dan dengan itikad baik dengan kehati-hatian, kecermatan dan kompetensi tanpa adanya kesalahan penyajian fakta material apapun.
6. Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam kegiatan bisnis dan informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi
7. Mempromosikan perilaku etis di antara semua rekan kerja dan pemangku kepentingan perusahaan
8. Mematuhi dan mempromosikan kode etik di perusahaan.

Istilah- istilah kunci yang merupakan bagian integral dan informasi, investasi saham, perdagangan, pelanggan dan jenis transaksi kegiatan keuangan adalah:

1. ESG
   Bentuk lengkap ESG adalah economical, social and governace dan dampak positifnya menunjukkan apakah sistem keuangan dan informasi yang terkait itu etis atau tidak. Keuangan adalah kehidupan pada bisnis apapun. Namun keuangan seperti kebanyakan sumber daya lainnya selalu terbatas. Disisi lain keinginan selalu tidak terbatas. Oleh karena itu, penting bagi sebuah bisnis untuk mengelola manajemen keuangan secara efisien.
2. Green Finances
   Prinsip ini berbicara tentang keuangan yang berfokus pada penawaran hasil lingkungan yang terukur positif.

11.7 Etika dalam Pelaporan Keuangan

11.7.1 Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi

Dalam dunia bisnis, menjaga integritas dan etika dalam keuangan merupakan landasan utama untuk membangun kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Salah satu aspek krusial dalam mengamankan etika keuangan adalah laporan keuangan yang jujur dan transparan.

Pelaporan keuangan yang etis melibatkan kewajiban untuk menyajikan informasi finansial perusahaan secara akurat , tepat waktu dan sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi yang berlaku. Hal ini mencangkup pengucapan yang jelas mengenai aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Ketika perusahaan memberikan gambaran yang akurat melalui laporan keuangannya, hal ini membantu mencegah praktik praktik curang atau manipulatif yang dapat merugikan pemegang saham dan pasar keuangan secara umum.

Bagian terpenting dalam dari etika keuangan adalah memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Standar ini ditetapkan untuk memastikan konsistensi dan perbandingan yang adil antara laporan keuangan perusahaan. Kepatuhan terhadap standar akuntansi mencangkup penggunaan metode akuntansi yang benar, pengungkapan yang memadai, dan pemahaman yang jelas terhadap prinsip prinsip yang diterapkan. Ini tidak hanya menciptakan kerangka kerja yang adil bagi para pelaku pasar, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga kestabilan ekonomi.

11.7.2 Keterbukaan dalam Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan yang etis mencerminkan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada pemangku kepentingan. Keterbukaan dalam laporan keuangan berarti menyajikan informasi dengan cara yang transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam Prakteknya keterbukaan dalam laporan keuangan mencangkup pengungkapan semua informasi yang relevan mengenai keuangan perusahan, termasuk risiko risiko yang mungkin dihadapi. Ini menciptakan dasar kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan seperti investor,karyawan dan pelanggan

11.7.3 Menghindari Praktek Akuntansi yang Meragukan

Pelaporan Keuangan yang jujur dan akurat adalah dasar integritas bisnis. Etika dalam pelaporan keuangan mencakup kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi yang benar kepada pemegang saham. investor dan pihak terkait lainnya. Ini tidak hanya mencakup pencatatan transaksi secara tepat, tetapi juga menghindari manipulasi data atau penyembunyian informasi yang dapat merugikan kepentingan pihak terkait.

Penting untuk menjauhi praktek akuntansi yang meragukan guna memelihara kepercayaan pemangku kepentingan. Beberapa Praktek yang perlu dihindari termasuk pengakuan pendapatan yang tidak sah, penilaian aset yang tidak adil, atau pengelolaan beban yang tidak etis. Penekanan pada kepatuhan terhadap standar akuntansi internasional dan nasional menjadi kunci untuk menghindari jalan pintas yang merugikan.

11.8 Etika dalam Keputusan Keuangan

11.8.1 Investasi yang Berkelanjutan

Investasi yang berkelanjutan menjadi poin kunci dalam konteks etika hubungan. Ini mengacu pada penanaman modal dalam proyek atau perusahaan yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga mendukung tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Pemilihan memperhatikan faktor-faktor ESG (Environmental, Social, and Governance) adalah langkah positif dalam mempraktekan etika keuangan.

Pentingya etika dalam keuangan bisnis terletak pada pembentukan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etis dalam pengambilan keputusan keuangan, perusahaan tidak hanya membangun reputasi yang baik, tetapi juga turut berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan berkelanjutan. Oleh karena itu , setiap keputusan harus diawali dengan pertimbangan etis untuk mencapai kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan.

11.8.2 Pinjaman dan Kewajiban yang Bijaksana

Pengambilan pinjaman seharusnya bukan hanya tentang keuntungan finansial sebanyak mungkin, tetapi juga mengenai tanggung jawab terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Keberlanjutan pembayaran pinjaman dan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban bisnis membatu mencegah risiko keuangan yang tidak terduga.

Mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam pinjaman dan kewajiban menciptakan kondisi keuangan yang kuat, mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika. Dengan memadukan integritas dan pertimbangan matang dalam keputusan keuangan, bisnis tidak hanya menciptakan lingkungan yang etis tetapi juga membangun dasar yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan.

11.8.3 Pembayaran Pajak yang Wajar

Pembayaran pajak yang wajar dalam aspek krusial dalam etika keuangan. Bisnis yang etis memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan tidak menghindari pembayaran yang seharusnya. Ini melibatkan penghindaran praktek pengelolaan pajak agresif yang dapat merugikan masyarakat.

Pentingnya membayar pajak dengan jujur tidak hanya menghindari konsekuensi hukum, tetapi juga membangun citra positif bagi bisnis. Pelanggaran etika dalam pembayaran pajak dapat merugikan reputasi perusahaan dan memngaruhi hubungan dengan pelanggan, investor dan pihak -pihak terkait lainnya.

11.9 Prinsip-prinsip untuk Investasi yang Bertanggung Jawab

Adalah jaringan lembaga keuangan internasional yang didukung PBB yang bekerjasama untuk menerapkan enam prinsip aspirasionalnya. Tujuannya adalah untuk memahami implikasi keberlanjutan bagi investor dan mendukung para penandatanganan untuk memfasilitasi memasukkan isu isu ke dalam pengambilan keputusan investasi dan praktek kepemilikan mereka. Dalam

menerapkan prinsip-prinsip ini para penandatangan berkontribusi pada pengembangan sistem keuangan global yang lebih berkelanjutan.

Sebagai Investor institusional, kami mempunyai kewajiban untuk bertindak demi kepentingan jangka panjang terbaik bagi penerima manfaat kami. Dalam peran fidusia ini, kami percaya bahwa permasalahan lingkungan sosial , dan tata kelola perusahaan (ESG) dapat memngaruhi kinerja portofolio investasi, Kami juga menyadari bahwa penerapan prinsip prinsip ini dapat menyelaraskan investor dengan tujuan masyarakat yang lebih luas.

Oleh karena itu jika konsisten dengan tanggung jawab fiducia kami berkomitmen pada hal-hal berikut:

1. Kami akan memasukkan isu isu LST ke dalam analisis investasi dan proses pengambilan keputusan
2. Kami akan menjadi pemilik aktif dan memasukkan isu isu LST ke dalam kebijakan dan praktik kepemilikan kami.
3. Kami akan mengupayakan pengungkapan yang tepat mengenai isu isu LST oleh entitas tempat kami berinvestasi.
4. Kami akan mendorong penerimaan dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam industri investasi
5. Kami akan bekerjasama untuk meningkatkan efektifitas kami dalam menerapkan prinsip-prinsip ini
6. Kami masing-masing akan melaporkan aktivitas dan kemajuan kami dalam menerapkan prinsip-prinsip ini.

11.10 Keuangan Berkelanjutan

Keuangan Berkelanjutan adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi , norma, standar, produk , transaksi jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prinsip -prinsip keuangan berkelanjutan:

1. Prinsip investasi yang bertanggung jawab
2. Prinsip strategi dan praktek bisnis berkelanjutan
3. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup
4. Prinsip tata kelola

11.11 Implementasi Etika dalam Keuangan

Dalam menangani masalah etika dalam keuangan seperti berkisar dari kode etik yang berlaku untuk profesional keuangan hingga penggantian teori egoistik, ada berbagai macam domain yang tercakup dalam etika bisnis.

Kode kode yang mengikuti seperangkat etika keuangan yang ditetapkan secara moral ini diatur dan dipelihara oleh badan badan yang mengatur diri sendiri dan otoritas pengatur resmi. Hal ini dilakukan untuk memastikan perilaku yang bertanggung jawab secara etis dan moral dari berbagai operator yang beroperasi di pasar keuangan

Dengan pengetahuan yang tepat tentang pedoman yang harus diikuti, mendorong perilaku yang digerakkan oleh etika ditempat kerja dan mengikuti standar tertinggi etika yang diterapkan sangat penting bagi setiap profesional keuangan saat ini.

Daftar Pustaka

Afifah, R., Z. (2012). Analisis Bantuan Modal Dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (Study Kasus KPUM Di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah). Jurnal Ekonomi Semarang: UNDIP

Agarwal, S., & Zhang, J. (2020). FinTech, Lending and Payment Innovation: A Review. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 49(3), 353–367. https://doi.org/10.1111/ajfs.12294

Agoes, S.,& Ardana. I.C. (2012). Etika Bisnis dan Profesi (4 th ed.) Salemba Empat.

Alshebami, A. S., & Al Marri, S. H. (2022). The impact of financial literacy on entrepreneurial intention: The mediating role of saving behavior. Frontiers in Psychology, 13, 911605.

Ando, A. and Modigliani. F. (1963). The Life Cycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests. American Economic Review, vol.53, pp.55–84.

Ang, J.B. (2008). A Survey of Recent Developments in the Literature of Finance and Growth. Journal of Economic Surveys 22, 536-576.

Angrisani, M., Burke, J., Lusardi, A., & Mottola, G. (2020). The stability and predictive power of financial literacy: Evidence from longitudinal data. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28125/w28125.pdf

Arestis, P., Chortareas, G., Magkonis, G. (2015). The Financial Development and Growth Nexus: A Meta-Analysis. Journal of Economic Surveys 29, 549-565.

Arianti, B. F. (2022). Literasi Keuangan (Teori dan Implementasinya).

Aseng, A. C. (2020). Factors Influencing Generation Z Intention in Using FinTech Digital Payment Services. Cogito Smart Journal, 6(2), 155–166.

Aseng, A. C., & Pandeirot, L. B. (2023). E-Wallet Attractiveness among Generation Z during the COVID-19 Pandemic. Cogito Smart Journal |, 9(1).

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. (n.d.-a). Ini Dia Regulator Fintech Indonesia yang Wajib Anda Kenali. Retrieved 10 April 2024, from https://afpi.or.id/articles/detail/regulator-fintech-indonesia

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. (n.d.-b). Sejarah Perkembangan Fintech di Indonesia. Retrieved 10 April 2024, from https://afpi.or.id/articles/detail/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia

Atkinson, A., & Messy, F.-A. (2012). Measuring financial literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) pilot study.

Australia Securities & Investments Commission (ASIC). (2014). National Financial literacy strategy 2014-2017. .

Bank Indonesia. (2017). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_191217.pdf

Barro, R. (1976) Perceived Wealth in Bonds and Social Security and the Ricardian Equivalence Theorem: Reply to Feldstein and Buchanan. The Journal of Political Economy, vol.84, pp. 343–350, April.

Barro, R.J., Mankiw, N.G., Sala-i-Martin, X. (1995). Capital Mobility in Neoclassical Models of Growth. The American Economic Review 85, 103-115

Bernheim, D. (1998). Financial illiteracy, education and retirement saving. Living with Defined Contribution Pensions, 3868.

Bertens, K (1993), Etika. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management* (Edisi ke-15). Cengage Learning.

Brotodihardjo, R. S. (2008). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT. Refika Aditama

Cahyani, B. E. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Pada Paguyuban Keramik Dinoyo Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 9(2).

Caxton, W. (1483). Subtyll historyes and fables of Esope. Translated out of: Frensshe in to Englysshe by William Caxton. Photoreprint of the 1483 ed. Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum , 1972.

Charalambous, C. (2015). Wise living: Personal budgeting basics and coping with facts. The Cyprus Research Facts, 6, 1–132. https://www.cdacollege.ac.cy/cda_uploads/2022/02/90.pdf#page=7

Chhatwani, M., & Mishra, S. (2021). Does financial literacy reduce financial fragility during COVID-19? The moderation effect of psychological, economic and social factors. International Journal of Bank Marketing, 39(7), 1114–1133.

Chhatwani, M., & Mishra, S. (2021). Does financial literacy reduce financial fragility during COVID-19? The moderation effect of psychological, economic and social factors. International Journal of Bank Marketing, 39(7), 1114–1133.

Cole, H. L., George J. M., and Postlewaite, P. (1992). Social Norms, Saving Behavior, and Growth. Journal of Political Economy, vol.100, pp.1092-1125.

Cole, S. A., & Shastry, G. K. (2009). Smart money: The effect of education, cognitive ability, and financial literacy on financial market participation. Harvard Business School Boston, MA.

Dang, T. T., & Vu, H. Q. (2020). Fintech in Microfinance: a new direction for Microfinance institutions in Vietnam. Journal of Business Economics and Environmental Studies, 10(3), 13–22. https://doi.org/10.13106/jbees.2020.vol10.no3.13

Deidda, L., Fattouh, B. (2002). Non-linearity between Finance and Growth. Economic Letters 74, 339345.

Despard, M. R., Friedline, T., & Martin, S. (2020). Why do households lack emergency savings? The role of financial capability. Journal of Family

and Economic Issues, 41(3), 542–557. https://doi.org/10.1007/s10834-020-09679-8

Despard, M. R., Friedline, T., & Martin, S. (2020). Why do households lack emergency savings? The role of financial capability. Journal of Family and Economic Issues, 41(3), 542–557. https://doi.org/10.1007/s10834-020-09679-8

Di Iorio, F., Fachin, S. (2014). Savings and Investments in the OECD: A Panel Cointegration Study with a New Bootstrap Test. Empirical Economics 46, 1271-1300.

Douglas, M, and Isherwood, B. (1979). The World of Goods. Basic Books Inc. Publishers.

Dusenberry, J. (1949). Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior. Cambridge, Harvard University Press.

Erner, C., Goedde-Menke, M., & Oberste, M. (2016). Financial literacy of high school students: Evidence from Germany. The Journal of Economic Education, 47(2), 95–105.

Faizah, A. and Dwiningwarni, S.S. (2024) 'Perbandingan Keuntungan Dan Risiko Investasi Saham Dan Obligasi: Studi Kasus Pada Investor Individu', Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(1).

Fan, L., & Zhang, L. (2021). The influence of financial education sources on emergency savings: The role of financial literacy. Family & Consumer Sciences, 49(4), 344–361.

Farnsworth, V. (2016). Following the trail from political discourse to curriculum reform: Reflecting on the shape of financial capability education in England. International Handbook of Financial Literacy, 147–161.

Farwitawati, R. (2018). Pengelolaan Keuangan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Airputih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Prosiding Sembadha, 1, 225-229.

Feldstein, M., Horioka, C. (1980). Domestic Saving and International Capital Flows. The Economic Journal 90, 314-329.

Fenwick, M., McCahery, J. A., & Vermeulen, E. P. M. (2017). Fintech and the Financing of Entrepreneurs: From Crowdfunding to Marketplace Lending.

https://ssrn.com/abstract=2967891http://ssrn.com/abstract_id=2967891 Electroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=2967891

Fernandes, D., Lynch Jr, J. G., & Netemeyer, R. G. (2014). Financial literacy, financial education, and downstream financial behaviors. Management Science, 60(8), 1861–1883.

Fitriadi, S. and Marsoem, B.S. (2022) 'Analysis of the Effect of Fundamental and Maturity Factors on Yield to Maturity of Corporate Bonds Traded on the Indonesia Stock Exchange in 2020', European Journal of Business and Management Research, 7(5), pp. 39–44. Available at: https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.5.1627.

Friedman, M. (1957). A Theory of the Consumption Function. Princeton University Press.

Frühauf, F., & Retzmann, T. (2016). Financial literacy in Germany. International Handbook of Financial Literacy, 263–276.

Gaol, R. L. (2022). Pengelolaan Keuangan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Hutapaung Kecamatan Pollung. DEVOTIONIS, 16-20.

Ghozie,P.H.(2014).Make It Happen!.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Ginting, E. M., Siburian, E. S., Syahfitri, M. D., & Hasyim, H. (2023). Analisis Perilaku Konsumen dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4).

Gitman, L. and Zutter, C. (2015) Principles of Managerial Finance. 14th edn. Essex: Pearson Education Limited.

Gitman, L. J., Zutter, C. J., & Chad, J. (2014). Principles of Managerial Finance (Edisi ke-14). Pearson Education.

Goyal, K., Kumar, S. and Xiao, J.J. (2021) 'Antecedents and consequences of Personal Financial Management Behavior: a systematic literature review and future research agenda', International Journal of Bank Marketing, 39(7), pp. 1166–1207. Available at: https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2020-0612.

Guthrie, C.P. and Nicholls, C.M. (2015) 'The Personal Budget Project: A practical introduction to financial literacy', Journal of Accounting

Education, 33(2), pp. 138–163. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2015.04.002.

Hakim, L., & Hapsari, R. A. (2022). Financial Technology Law. CV Adanu Abimata.

Hanafi. (2021). Dasar-Dasar FINTECH Financial Technolgy. Aswaja Pressindo.

Harahap, A. P., & Saraswati, D. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. CV. Jakad Media Publishing.

Hartono, T. (2024, January 12). 9 Jenis Emoney Bayar Tol. Winpay. https://www.winpay.id/9-jenis-emoney-bayar-tol/#:~:text=Ada%209%20jenis%20emoney%20untuk,Card%2C%20GazCard%2C%20dan%20JakCard.

Haryadi. (2016). Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah. Gajah Mada University Pres Yogyakarta.

Hasam, M.A. (2009). Etika & Profesional Akuntan Publik, Pekbis Jurnal, I(3), 159-167

Hastings, J. S., Madrian, B. C., & Skimmyhorn, W. L. (2013). Financial literacy, financial education, and economic outcomes. Annu. Rev. Econ., 5(1), 347–373.

Hasyim, L. T. U. (2016). Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 8(1), 11–27.

Hayek, F. A. (1932) A note on the development of the doctrine of "forced" saving. Quarterly Journal of Economics, vol. 47, pp.123-133.

Hayek, F. A. (1941) The Pure Theory of Capital. London, Routledge & K. Paul.

Hicks, J. (1937). Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation. Econometrica, vol.5, pp.147-159.

Hidayat, I. P., & Fadillah, A. R. (2009). Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Operasional (Kasus Pada PT. Bank Jabar Banten Tbk). Jurnal Dipublikasikan Pada Digital Library Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi.

Hidayati, K. F. (2022, December 28). Kenalan dengan Fintech: Definisi, Sejarah, hingga Jenis-jenisnya. Glints. https://glints.com/id/lowongan/fintech-adalah/#sejarah-fintech

Hilgert, M. A., Hogarth, J. M., & Beverly, S. G. (2003). Household financial management: The connection between knowledge and behavior. Fed. Res. Bull., 89, 309.

Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(3), 326–333. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578

Hobson, J. A. (1889). From Capitalism to Socialism. London, Leonard and Virginia.

Holzmann, R. (2010). Bringing financial literacy and education to low and middle income countries: The need to review, adjust, and extend current wisdom.

https://datanesia.id (2023). Bulan Pajak Telah Tiba. Available at: https://datanesia.id/bulan-pajak-telah-tiba/

https://www.scribd.com (2024). Struktur Organisasi DJP - Kantor Pusat. Available at: https://www. scribd.com/presentation/112191965/Struktur-Organisasi-DJP-Kantor-Pusat

Hudson, C. R., & Young, J. (2023). Wealth: Factors that effect African American Wealth. The Review of Black Political Economy, 50(1), 97–116.

Hudson, C. R., & Young, J. (2023). Wealth: Factors that effect African American Wealth. The Review of Black Political Economy, 50(1), 97–116.

Hume, D (1752) Writings on economics. Edited and introduced by Eugene Rotwein. London: Nelson, 1955.

Hume, D. (1752) Political discourses. Düsseldorf : Verlag Wirtschaft und Finanzen, 1987. Facsimile reprint. Originally published: Edinburgh: printed by R. Fleming, for A. Kincaid and A. Donaldson

Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. Journal of Consumer Affairs, 44(2), 296–316.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2020). Kode Etik Akuntan Indonesia Efektif 1 Juli 2020. In Institute Akuntan Manajemen Indonesia, Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode Etik Akuntan Indonesia 2020.pdf

Infe, O. (2011). Measuring financial literacy: Core questionnaire in measuring financial literacy: Questionnaire and guidance notes for conducting an internationally comparable survey of financial literacy. Paris: OECD.

Ingale, K. K., & Paluri, R. A. (2022). Financial literacy and financial behaviour: A bibliometric analysis. Review of Behavioral Finance, 14(1), 130–154.

Janposri, P. (2021). The role of financial literacy in retirement planning and wealth accumulation among self-employed Thai workers. Journal of Population and Social Studies, 29(1), 177–194.

Janposri, P. (2021). The role of financial literacy in retirement planning and wealth accumulation among self-employed Thai workers. Journal of Population and Social Studies, 29(1), 177–194.

Jappelli, T., Pagano, M. (1994). Saving, Growth, and Liquidity Constraints. The Quarterly Journal of Economics 109, 83-109.

Johan, A., Hikmah, F., dan Anditya, A. (2019). Perpajakan optimal dalam perspektif hukum pajak berfalsafah pancasila. Jurnal Magister Hukum Udayana, 8(3), 317-337. https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p03

Kakinuma, Y. (2024). Fintech as a Gateway to Enhancing Financial Literacy. SSRN.

Kasingku, F.J. (2023) 'Saham', in Investasi dan Manajemen Aset. 1st edn. Padang: Get Press Indonesia, pp. 179–191.

Kasmir. (2012). Manajemen Perbankan (Revisi). PT. RajaGrafindo Persada.

Kemu, S.Z. (2016) 'Literasi Pasar Modal Masyarakat Indonesia', Kajian, 21(2).

Keynes, J. M. (1936) The General Theory of Employment, Interest and Money. London, Macmillan, 1974.

Khan, F., Siddiqui, M. A., & Imtiaz, S. (2022). Role of financial literacy in achieving financial inclusion: A review, synthesis and research agenda. Cogent Business & Management, 9(1), 2034236.

Kira, A. R. (2013). The factors affecting Gross Domestic Product (GDP) in developing countries: The case of Tanzania.

Klapper, L., & Lusardi, A. (2019). Financial literacy and financial resilience: Evidence from around the world. Financial Management, 49(3), 1–26. https://doi.org/10.1111/fima.12283

Klapper, L., & Lusardi, A. (2019). Financial literacy and financial resilience: Evidence from around the world. Financial Management, 49(3), 1–26. https://doi.org/10.1111/fima.12283

KNKG, (2010). Pedoman Etika Bisnis Perusahaan, PT, Elex Media Komputindo

Koh, B. S. K., Mitchell, O. S., & Rohwedder, S. (2020). Financial knowledge and portfolio complexity in Singapore. The Journal of the Economics of Ageing, 17(1), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2018.11.004

Kovas, A. (n.d.). Understanding the Risks of Fintech. Thomson Reuters. Retrieved 13 April 2024, from https://legal.thomsonreuters.com/en/insights/articles/understanding-the-risks-of-fintech

Krieckhaus , J. (2002). Reconceptualizing the Developmental State: Public Savings and Economic Growth. World Development 30, 1697-1712.

Kusumawardhani, R., Ningrum, N. K., & Rinofah, R. (2023). Investigating Digital Financial Literacy and its Impact on SMEs' Performance: Evidence From Indonesia. International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev., 8(12), 5.

Leland, H. E. (1968). Saving and Uncertainty: The Precautionary Demand for Saving. Quarterly Journal of Economics, vol. 82, pp.465-473.

Leon,F.M.(2018). Mengelola Keuangan Pribadi.Jakarta:Salemba Empat

Levine, R. (2005). Finance and growth: theory and evidence. Handbook of Economic Growth, 1, 865–934.

Levine, R. (2005). Finance and Growth: Theory and Evidence. In: Aghion P & Durlauf SN (eds.) Handbook of Economic Growth. Elsevier B.V., North Holland, Burlington, pp. 865-934.

Low, A.(2008). Managerial Risk-Taking, Behavior and Equity-Based Compensation.

Lührmann, M., Serra-Garcia, M., & Winter, J. (2018). The impact of financial education on adolescents' intertemporal choices. American Economic Journal: Economic Policy, 10(3), 309–332.

Lukum, A. (2023). Manajemen Pengelolaan Keuangan Usaha Kecil Menengah di Desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo. Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi, 2(3), 165-170.

Lusardi, A., & de Bassa Scheresberg, C. (2013). Financial literacy and high-cost borrowing in the United States. National Bureau of Economic Research.

Lusardi, A., & Messy, F.-A. (2023). The importance of financial literacy and its impact on financial wellbeing. Journal of Financial Literacy and Wellbeing, 1(1), 1–11.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). Financial literacy around the world: an overview. Journal of Pension Economics & Finance, 10(4), 497–508.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2023). The importance of financial literacy: opening a new field. Journal of Economic Perspectives, 37(4), 137–154.

Lusardi, A., & Tufano, P. (2015). Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness. Journal of Pension Economics & Finance, 14(4), 332–368.

Malinda,M.(2018) Perencanaan Keuangan.Yogyakarta : Penerbit Andi

Malthus, T. R. (1820). Principles of Political Economy : Considered With A View To Their Practical Application. London, J. Murray.

Mandeville, B. (1705). The fable of the bees, or, Private vices, public benefits. Vol. 1-2. With a commentary critical, historical, and explanatory by F.B. Kaye, Oxford, Oxford University Press , Reprinted in 1957, Originally published in 1924.

Mangkona, S., Aswirah, & Wahyudin. (2023). Transformasi Industri Keuangan Melalui Perkembangan Teknologi Finansial (Fintech): Analisis Tantangan dan Peluang. Movere Journal, 5(2), 297–304. http://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/mv

Mankiw, G. (2015) Principles of Economics. 7th edn. Stamford: Cengage Learning.

Mankiw, N. G. (2008). Principles of Microeconomics (5th ed.). South-Western Cengage Learning

Marx, K. (1867). Capital: The Process of Capitalist Production. Edited by Frederick Engels. Chicago, C.H. Kerr, 1909-1921.

Mian, A., & Sufi, A. (2018). Finance and business cycles: The credit-driven household demand channel. Journal of Economic Perspectives, 32(3), 31-58.

Monroe, A. E. (1930). Early economic thought: selections from economic literature prior to Adam Smith. Cambridge, Mass., Harvard University Press.

Naharto, M. J., dan Tjondro, E. (2014). Analisis tujuan pemungutan serta pengertian penghasilan menurut perpajakan dan persepuluhan bagi wajib pajak orang pribadi. Tax & Accounting Review, 4(1), 1-14

Nasfi, Solikin, A., Irdiani, S., Nugroho, L., Widyastuti, S., Kembauw, E., M. Luhukay, J., Alfiana, Juli Nuryani, N. N., Riyaldi, M. H., & Firmialy, S. D. (2022). Uang dan Perbankan (L. Nugroho (ed.)). Widina Bhakti Persada Bandung.

Neddy, R. (2014). Memeta Potensi Dan Karakteristik Umkm BagiPertumbuhan Usaha Baru", Infokop Nomor .29

Noctor, M., Stoney, S., & Stradling, R. (1992). Financial literacy: a discussion of concepts and competences of financial literacy and opportunities for its introduction into young people's learning. National Foundation for Educational Research.

Nursidin, M. (2023). Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(7).

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). National Strategy on Indonesian Financial Literacy (SNLKI) 2021 – 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025.

Otoritas Jasa Keuangan.(2013).Perencanaan Keuangan Ibu Rumah Tangga. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/17

Otoritas Jasa Keuangan.(2022).Buku Agenda Pengelolaan Keuangan. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/NewDetailMateri/549

Ouachani, S., Belhassine, O. and Kammoun, A. (2020) 'Measuring financial literacy: a literature review', Managerial Finance, 47(2), pp. 266–281. Available at: https://doi.org/10.1108/MF-04-2019-0175.

Ouachani, S., Belhassine, O., & Kammoun, A. (2021). Measuring financial literacy: A literature review. Managerial Finance, 47(2), 266–281.

Pagano, M. (1993). Financial Markets and Growth: An Overview. European Economic Review 37, 613-622.

Pandeirot, L. B., & Sumanti, E. R. (2021). Likuiditas dan Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di ASEAN+ 3. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 23(2), 229-242.

Pankki, S. (2021). Proposal for a national strategy to promote financial literacy in Finland.

Panos, G., & Wilson, J. (2020). Financial literacy and responsible finance in the FinTech era: capabilities and challenges. The European Journal of Finance, 26(5), 297–301. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1717569

Panos, G., & Wilson, J. (2020). Financial literacy and responsible finance in the FinTech era: capabilities and challenges. The European Journal of Finance, 26(5), 297–301. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1717569

Pigou, A. C. (1943) The Classical Stationary State. Economic Journal, vol.53, pp.343–351.

Pinto, L. E. (2013). When politics trump evidence: Financial literacy education narratives following the global financial crisis. Journal of Education Policy, 28(1), 95–120.

Pinto, L. E. (2016). Politics and argumentation in financial literacy education policy. International Handbook of Financial Literacy, 131–146.

Quesnay, F. (1758). Élémens de la philosophie rurale. A La Haye: Chez Les libraires associés, 1767.

Rahayu. (2020), Kinerja Keuangan Perusahaan. Penerbit Program Pascasarjana Universitas Prof. Moestopo (Beragma).

Raijas, A. (2020). Kartoitus talousosaamisen edistämistoiminnasta Suomessa vuonna 2020.

Ramakrishnan, D. (2011). Financial literacy-the demand side of financial inclusion. Available at SSRN 1958417.

Ramsey, F. P. (1928). A Mathematical Theory of Saving. Economic Journal, vol.38, pp.543-559.

Reilly, F.K., Brown, K.C. and Leeds, S.C. (2019) Investment Analysis & Portfolio Management. 11th edn. Boston: Cengage.

Ricardo, D. (1817). On The Principles of Political Economy And Taxation. London, J. Murray.

Risnaningsih, R. (2017). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 1(1).

Ristati, R., Zulham, Z., & Sutriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan kepribadian terhadap perilaku manajemen keuangan pada UMKM kopi di Provinsi Aceh. Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 19(3), 576-589.

Rukmana, A. Y., Afandi, A., Rahmiyanti, S., Afris, W. H., Sudirjo, F., Aseng, A. C., Tenriyola, A. P., & Herdiansyah, S. D. (2024). Inovasi dan Kreativitas dalam Kewirausahaan: Membangun Bisnis yang Berkelanjutan. CV. Get Press Indonesia. www.getpress.co.id

Sahay, R., Čihák, M., N'Diaye, P., Barajas, A., Bi, R., Ayala, D., Gao, Y., Kyobe, A., Nguyen, L., Saborowski, C., Svirydzenka, K., Yousefi, S.R. (2015). Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets. In: IMF Staff Discussion Note. International Monetary Fund.

Salam, Burhanuddin, (2002). Etika Sosial. Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia. Jakarta. Rineka Cipta.

Saputra, E., Rizki, M., Fajrillah, Harto, B., Fauzan, R., Rukmana, A. Y., Supriyanto, E., Setiyawan, S., Ukhriyawati, C. F., Pasaribu, J. S., & Nugroho, L. (2023). Teknologi Keuangan. PT. Global Eksekutif Teknologi. https://www.researchgate.net/publication/371947463

Sartono, A. (2015). Manajemen Keuangan : Teori dan Aplikasi , Edisi Keempat,. BPFE, Yogyakarta

Satriak Guntoro, & Husni Thamrin. (2021). Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 4(2), 18–24. https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8499

Sethi, D., & Acharya, D. (2018). Financial inclusion and economic growth linkage: Some cross country evidence. Journal of Financial Economic Policy, 10(3), 369–385.

Setiawan, Y. (2022). Pajak (upeti) Majapahit (wilwatikta) dalam meningkatkan ekonomi di era otonomi. Jurnal Kompilasi Hukum, 7(2). https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.121

Setiyono, W. P., Sriyono, & Prapanca, D. (2021). Financial Technology. UMSIDA Press.

Sherraden, M. S. (2010). Financial capability: What is it, and how can it be created?

Sholihah, P. I. (2012). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi pada Nasabah Bank X Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1(1).

Siamwalla, A., Pinthong, C., Poapongsakorn, N., Satsanguan, P., Nettayarak, P., Mingmaneenakin, W., & Tubpun, Y. (1990). The Thai rural credit system: public subsidies, private information, and segmented markets. The world bank economic review, 4(3), 271-295.

Siddiqui, Z., & Rivera, C. A. (2022). FinTech and FinTech ecosystem: A review of literature. Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions, 12(1), 63–73. https://doi.org/10.22495/rgcv12i1p5

Sihono, A. (2024) 'Does Dividend Policy, Audit Quality, Capital Structure And Profitability Affect Firm Value?', Klabat Accounting Review, 5(1), p. 12. Available at: https://doi.org/10.60090/kar.v5i1.1046.12-23.

Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1), 142-157

Sinurat M., & Ilham R.N. (2021) Perdagangan Saham dan Good Corporate Gorvernance (H.Efriyadi, Ed).Bintang Pustaka Madani (CV.Bintang Surya Madanai).

Smart, S.B. and Zutter, C.J. (2020) Fundamentals of Investing. 14th edn. Essex: Pearson Education Limited.

Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. University Of Chicago Press, 1977.

Soekarno,S.,dan Damayanti, S.(2011).Perencanaan Keuangan Pribadi.Bandung: Penerbit Consultancy&Contiuning Education Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung.

Soemitro, R. (1982). Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: Eresco

Solow, R.M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics 70, 65-94.

Sriyono, Lesta, R.D. and Ahrorov, Z.O. (2023) 'Boosting Stock Returns in Coal Mining: Key Strategies Revealed', in, pp. 600–610. Available at: https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_66.

Stillwell, S. (2016). Financial education in the UK: A case study of practice. International Handbook of Financial Literacy, 357–368.

Sundjaja,R.S.dkk.(2010). Manajemen Keuangan.Ed ke-7. Bandung:Literata Lintas Media

Suparnyo (2012). Hukum Pajak: Suatu Sketsa Asas. Semarang: Pustaka Magister

Supriadi, A., Arisondha, E., & Sari, T. N. (2023). Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Usaha Pada UMKM. Bandung: Widina Bhakti Persada

Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and trends of financial technology (Fintech): A systematic literature review. In Information (Vol. 11, Issue 12, p. 590). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/info11120590

Sutrisno, J & Lestari, S. (2013). Kajian Usaha Mikro Indonesia. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 2 Volume 1.

Sutrisno. (2013). Manajemen Keuangan. Edisi Kesembilan. Yogyakarta: Ekonisia.

Tansuria, B. I. (2010). Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Tansuria, B. I. (2011). Pajak Penghasilan Final: Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, Serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya. Yogyakarta: Graha Ilmu

Tansuria, B. I. (2013). Bea Meterai: Pajak atas Dokumen di Indonenesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Tansuria, B. I. (2014). Pokok-pokok Pajak Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Leutika Prio

Tansuria, B. I. (2016). Modul Perpajakan I. Unpublished

Tansuria, B. I. (2017). Withholding Income Tax: Pajak Penghasilan Pasal 21. Yogyakarta: Leutika Prio

Tedja, R. T. (2019, October 19). Risiko Penggunaan Fintech. Binus University. https://sis.binus.ac.id/2019/10/19/risiko-penggunaan-fintech/

The Indonesia Capital Market Institute (2016) Modul WPPE | MPE.

Triandaru, S., & Budisantoso, T. (2006). Bank dan lembaga keuangan lain (2nd ed.). Salemba Empat.

Ulfa, B. A., Murapi, I., Rahima, P., Aryani, R. A. I., & Suriati, S. (2020). Pengenalan Manajemen Keuangan Usaha Kecil dan Menengah. ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(1), 27-32.

Umri, S., Batara, G., & Halim, H. (2024). Accountability of Financial Management in Gue Gajah Village. Formosa Journal of Multidisciplinary Research, 3(3).

Usman, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran. Yuridika, 32(1), 134–166. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431

Utari, G. A., Arimurti, T., & Kurniati, I. N. (2012). Pertumbuhan kredit optimal. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 15(2), 3-36.

Van der Schors, A., & Simonse, O. (2016). Financial literacy in the Netherlands. International Handbook of Financial Literacy, 305–320.

Van Rooij, M., Lusardi, A., & Alessie, R. (2011). Financial literacy and stock market participation. Journal of Financial Economics, 101(2), 449–472.

Veblen, T. (1899). The Theory of the Leisure Class: an Economic Study of Institutions. Allen and Unwin, London.

Wan, J. (2011). Bubbly Saving. CAES Working Paper Series WP-2011-010, Fukuoka University, Japan. http://www.econ.fukuoka-u.ac.jp/english/researchcenter/workingpapers/WP-2011-010.pdf

Weber, M. M. (1904). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Charles Scribner's Sons, New York, 1958.

Wijaya, David. (2017). "Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya" Jakarta: PT. Grasindo.

Wiranto, B. S. (2021, July 14). Jangan Salah Paham! Ini Perbedaan Fintech P2P Lending dengan Pinjol. Alamisharia. https://alamisharia.co.id/blogs/perbedaan-p2p-lending-dan-pinjol/

Yahoo Finance (2024) IDX Composite Index.

Yushita, A. (2017). Pentingnya literasi keuangan pribadi bagi pengelolaan keuangan pribadi. Jurnal Nominal, 6(1), 11–26.

Yushita, A. (2017). Pentingnya literasi keuangan pribadi bagi pengelolaan keuangan pribadi. Jurnal Nominal, 6(1), 11–26.

Zigurat Institute of Technology. (2022, August 25). Evolution of Fintech: The 5 Key Eras. https://www.e-zigurat.com/en/blog/evolution-of-fintech/

Zou, H. (1994). The Spirit of Capitalism and Long-Run Growth. European Journal of Political Economy, vol.10, pp.279-293.

Biodata Penulis

Hendra Halim. Seorang penulis, akademisi, dan peneliti kelahiran tahun 1992 di Tanjung Morawa. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Hendra melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang ekonomi syariah dengan gelar Master Ekonomi (M.E.) di Islamic State University Ar-Raniry. Hendra terlibat dalam berbagai peran di lingkungan akademis, kewirausahaan, keuangan, pariwisata, teknologi informasi, dan pengembangan bisnis. Saat ini, ia menjabat sebagai Manajer Operasional Inkubator Kewirausahaan Universitas Syiah Kuala dan menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Sebelumnya, di tahun 2022-2023, Hendra pernah menjabat posisi sebagai Koordinator Perencanaan di Badan Pengembangan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Ia telah melaksanakan beberapa penelitian terkait keuangan, seperti "Digital Transformation Strategy to Optimize Company Performance", "The influence of money attitude, lifestyle, and personal values on purchase decision of exclusive gadgets in Aceh", " Accountability of Financial Management in Gue Gajah Village", "Pelatihan Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Bagi Pengawas dan Pengurus Koperasi Kopi Di Aceh", dan " The Influence of the Implementation of the Village Financial System (Siskeudes), Village Apparatus Competence, and Transparency on the Accountability of Village Fund Management". Selain karir akademisnya, Hendra memiliki keahlian yang diakui dengan 4 (empat) sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), diantaranya Produktivitas, Pendamping UMKM, Digital Marketing, dan Konsultan Inkubator Bisnis. Ia juga telah berkontribusi dalam literatur bisnis dan keuangan dengan bukunya yang berjudul "Cara Membahas & Menulis Kasus Manajemen Bisnis", "Digitalisasi Tourism", dan "Manajemen Keuangan Syariah". Hendra Halim, selain sebagai penulis, juga aktif sebagai Tim Pengelola Pusat Riset Komunikasi Pemasaran, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Universitas Syiah Kuala sejak tahun 2022.

E-mail: hendra.halim@usk.ac.id

Mashud, S.Kom., S.E., M.Ak dilahirkan di Ma'rang Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 15 Oktober 1983. Mashud anak dari pasangan Sompo (Ayah) dan Raju (Ibu). Pendidikan Sekolah Dasar lulus tahun 2006 di SD Negeri 7 Ma'rang, Pangkep. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama lulus tahun1999 di SLTP Negeri 1 Ma'rang Pangkep dan Pada Tahun 2002 lulus dari SMK Negeri 1 Bungoro Pangkep, Program Keahlian Akuntansi. Memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom) dari Program Studi Sistem Informasi STMIK AKBA, memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Program Studi Akuntansi STIE LPI Makassar dan memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak) di Universitas Muslim Indonesia. Saat ini penulis adalah dosen tetap di Universitas Teknologi Akba Makassar. Selain mengajar penulis juga aktif dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

E-mail: mashud@akba.ac.id,

Ika Prayanthi. Lahir di Airmadidi, Sulawesi Utara pada tanggal 25 Juni 1986.

Profesi pekerjaan penulis adalah sebagai dosen pada program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Klabat. Saat penyusunan buku ini, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen konsentrasi Akuntansi Keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Menyelesaikan Pendidikan Magister Manajemen konsentrasi keuangan di Universitas Klabat tahun 2011 serta Pendidikan Sarjana Ekonomi program studi akuntansi di Universitas Klabat tahun 2007. Penulis juga telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Sam Ratulangi pada bulan Juli 2023. Penulis aktif dalam beberapa penulisan ilmiah yang dipulikasikan baik dalam level nasional maupun internasional sejak tahun 2011 hingga tahun 2022. Penulis juga adalah reviewer aktif untuk artikel penelitian baik nasional maupun internasional.

E-mail: ikaprayanthi@unklab.ac.id

Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M.Ak, CTA, ACPA Lahir di Gorontalo tanggal 28 Agustus 1992. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Akuntansi bidang kajian Akuntansi Keuangan di Universitas Padjadjaran Bandung. Sebelumnya menyelesaikan Sarjana Ekonomi konsentrasi Auditing di Universitas Hasanuddin tahun 2015 dan Program Magister Akuntansi bidang kajian Audit dan Pelaporan Keuangan di Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2018.

Saat ini sebagai Dosen Akuntansi di Universitas Negeri Gorontalo dan di Universitas Ichsan Gorontalo. Mengampu mata kuliah Auditing, Audit IT, Audit Forensik, Audit Internal, Praktikum Audit, Akuntansi Keuangan (Advanced), Akuntansi Manajemen, Akuntansi Biaya, Teori Akuntansi, Manajemen Investasi dan Pasar Modal, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Manajemen, Aplikasi Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, Pengantar Ekonomi, Statistik Ekonomi, Ekonomi Digital Bisnis. Editor in Chief pada Jurnal: JAMAK Jurnal Mahasiswa Akuntansi.

Sebagai Pembina Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo dengan lima Perguruan Tinggi yang bergerak dalam bidang Technopreneurship. Aktif di berbagai organisasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Memiliki Sertifikasi Kompetensi Certificate in Theaching Audit (CTA) dan Associatte Certified Public Accountant (ACPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) serta Sertifikasi Profesional Data Analytic (IBM) dan Digital Marketing & E-Commerce (Google).

Kepakaran dibidang Auditing dan Pelaporan Keuangan sering diaplikasikan dalam kerjasama di pemerintah dan perusahaan. Penulis aktif pada pengembangan penelitian dan penulisan buku.

Email: michsangaffar@accountant.com

Penulis lahir di Sulawesi Utara tanggal 1 Februari 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Klabat. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada jurusan Magister sains Akuntansi. Penulis menekuni bidang menulis dalam bidang ilmu Akuntansi dan bisnis.

Penulis mengampu mata kuliah Akuntansi Manjemen, Akuntansi Biaya, Teori Portfolio dan Analisa Investasi, Prinsip-prinsip Investasi, dan Manajemen Keuangan.

E-mail: frisky.kasingku@unklab.ac.id

Lanemey Brigitha Pandeirot, S.E, MM lahir pada tanggal 23 Mei 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Klabat Airmadidi dan lulus pada tahun 2010. Mengawali kariernya dibidang perbankan sejak tahun 2011 sebagai relationship officer. Kemudian pada tahun 2018 menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Klabat Airmadidi. Saat ini penulis mengabdi sebagai dosen di almamaternya Universitas Klabat pada Program Studi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau pernah dan atau mengampu mata kuliah Cost Accounting, Managerial Finance, Managerial Accounting, Accounting for Manufacturing and Merchandising, Marketing Management serta Entrepreneurial Marketing. Penulis aktif dalam penulisan karya ilmiah seperti artikel jurnal di beberapa jurnal nasional terakreditasi SINTA. Penulis dapat dihubungi melalui email: lanemeypandeirot@unklab.ac.id dengan nomor telepon +6281343611307.

Anastasia Sri Mendari, S.E.,M.M. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang, dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Atmajaya Jogyakarta. Aktif sebagai dosen tetap program Studi Manajemen Universitas Katolik Musi Charitas sejak tahun 1993 hingga sekarang. Penulis juga melakukan pubilkasi hasil pene;itian dan pengabdian kepada masyarakat di beberapa jurnal nasional terakreditasi

Billy Ivan Tansuria saat ini berprofesi sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Klabat (UNKLAB), yang terletak di Airmadidi, Sulawesi Utara. Matakuliah yang pernah dan sedang diampu penulis meliputi Perpajakan Indonesia, Hukum Pajak, Business Finance I & II, serta Manajemen Keuangan.

Penulis menyelesaikan jenjang sarjana (SE Akuntansi) dari Fakultas Ekonomi UNKLAB, jenjang magister (MBA Manajemen Bisnis) dari AIIAS – Philippines, serta doktor (PhD Commerce in Accounting & Finance) dari AUP – Philippines.

Penulis juga menyelesaikan Program Profesi Akuntansi dan mendapat gelar Akuntan (Ak) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya – Jakarta, serta Certified Tax Technician (CTT) dari Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia (ATPI). Selain itu penulis pernah mengikuti pelatihan pajak brevet A&B dari LM Patra Jakarta (2003), brevet A,B,&C dari PPA UGM Yogyakarta (2008), brevet A&B dari TAF Consulting (2017), dan brevet A&B dari TRIEBI Universitas Trisakti Jakarta (2021).

Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: billy_tansuria@unklab.ac.id; billy_tansuria@yahoo.com.

Penulis merupakan Dosen Ilmu Administrasi dengan bidang kekhususan yakni administrasi bisnis. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan penguatan kapasitas sebagai dosen dan juga guru dalam bidang bisnis

Andrew C. Aseng menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi di Universitas Klabat, Airmadidi dan S2 Administrasi Bisnis di Adventist International Institute of Advanced Studies (AIIAS), Filipina. Saat ini beliau bekerja di almamaternya, Universitas Klabat, sebagai dosen tetap yayasan di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Selama ini penulis aktif menulis buku dan telah mempublikasikan beberapa hasil penelitian pada jurnal internasional terindeks SCOPUS dan jurnal nasional terakreditasi SINTA. Dua buku yang ditulis hasil kolaborasi dengan penulis lainnya yaitu buku Inovasi dan Kreativitas dalam Kewirausahaan: Membangun Bisnis yang Berkelanjutan dan buku Ekonomi Pendidikan. Sementara untuk artikel jurnal yang dipublikasikan dapat dilihat pada laman Google Scholar dan SINTA.

E-mail: andrew.aseng@unklab.ac.id

Lina Krisnawati lahir Purworejo, pada 17 April 1976. Ia tercatat sebagai lulusan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan jenjang S2 Magister Manajemen konsentrasi keuangan. Wanita yang kerap disapa Lina ini adalah Dosen Akuntansi Universitas Peradaban Bumiayu, praktisi perbankan syariah dan aktif dalam kegiatan organisasi perhimpunan BMT Indonesia, Lina Krisnawati bukanlah orang baru di dunia penulisan, Dengan Yayasan kita menulis telah 6 kali berpartisipasi menulis book chapter.

LITERASI KEUANGAN

Buku ini merupakan panduan komprehensif untuk memahami dunia keuangan dengan lebih baik, dirancang khusus untuk membantu pembaca meningkatkan pengetahuan literasi keuangan. Dalam buku ini, pembaca akan dibimbing melalui berbagai topik penting, dimulai dari Pengantar Literasi Keuangan yang memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya mengelola keuangan secara bijaksana. Selanjutnya, pembaca akan diajak untuk memahami konsep dasar seputar uang dan bank, serta bagaimana mengelola uang dan membuat anggaran yang efektif. Topik selanjutnya mencakup Tabungan dan Investasi Dasar, yang membantu pembaca memahami pentingnya menabung dan berinvestasi untuk masa depan keuangan yang lebih baik.

Buku ini membahas :

Bab 1 Pengantar Literasi Keuangan
Bab 2 Memahami Uang dan Bank
Bab 3 Pengelolaan Uang dan Anggaran
Bab 4 Tabungan dan Investasi
Bab 5 Pengantar Pasar Modal
Bab 6 Kredit dan Manajemen Utang
Bab 7 Perencanaan Keuangan Pribadi
Bab 8 Pajak dan Pengelolaan
Bab 9 Pengelolaan Keuangan untuk Usaha Kecil
Bab 10 Teknologi Keuangan
Bab 11 Etika dalam Keuangan

YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-113-257-4